

INFORMASI STATISTIK

PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT

2018



Sumber Daya Air



Bina Marga



Cipta Karya



Perumahan



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat diselesaikan. Adapun buku ini merupakan perwujudan tugas Pusdatin dalam pembinaan, pengembangan, pengelolaan, dan penyediaan data infrastruktur bidang pekerjaan umum serta penyelenggaraan sistem informasi mendukung manajemen Kementerian.

Sumber data dalam Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diperoleh dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Data yang disajikan dalam satuan tingkat nasional dengan rincian agregat merupakan provinsi serta analisis statistik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak terkait yang telah memberikan kontribusi baik data dan informasi maupun saran dan arahan yang positif dalam penyusunan buku ini. Kami menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penyusunan buku ini. Oleh karena itu kritik dan saran perbaikan dari semua pihak/pembaca senantiasa diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan BIS-PUPR yang akan datang.

Jakarta, November 2018

Kepala

Pusat Data dan Teknologi Informasi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Tujuan.....	2
BAB II GAMBARAN UMUM INDONESIA.....	3
A. Geografi Wilayah	4
B. Administrasi Wilayah.....	7
C. Demografi Wilayah.....	10
D. Ekonomi Wilayah	15
E. Alokasi Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat...22	
BAB III STATISTIK INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	26
A. Wilayah Sungai dan Daerah Aliran Sungai.....	27
B. Bendungan/Waduk	32
C. Bendung	51
D. Embung	53
E. Pengaman Pantai	54
F. Sabo Dam.....	56
G. Air Tanah	58
BAB IV STATISTIK INFRASTRUKTUR BINA MARGA	60
A. Jalan Nasional	62
B. Jalan Tol	64
C. Jembatan Nasional	75



D. Jalan Daerah.....	78
D.1. Jalan Provinsi.....	78
D.2. Jalan Kota	80
D.3. Jalan Kabupaten	82
BAB V STATISTIK INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA	85
A. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	86
A.1. Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan	86
A.2. Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan	95
B. Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP)	97
B.1. Persampahan	97
B.2. Pengelolaan Air Limbah.....	98
C. Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP).....	101
C.1. Kawasan Permukiman Perkotaan.....	101
C.2. Kawasan Permukiman Perdesaan.....	104
C.3. Kawasan Permukiman Khusus	105
D. Bina Penataan Bangunan (BPB).....	110
D.1. Pengembangan Kota Hijau	110
D.2. Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka.....	112
BAB VI STATISTIK INFRASTRUKTUR PERUMAHAN	116
A. Rumah Susun (Rusun).....	117
B. Rumah Khusus	120
C. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	123
D. Fasilitas Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Rumah Umum	125
E. Fasilitas Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP)	127
BAB VII STATISTIK BINA KONSTRUKSI	129
A. Badan Usaha Jasa Konstruksi	130



B. Tenaga Kerja	134
BAB VIII STATISTIK SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PUPR	139
A. Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian PUPR.....	140
B. Pengarusutamaan Gender.....	144
BAB IX PENUTUP	147



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Jumlah Pulau Berdasarkan Provinsi.....	6
Tabel 2.2 Jumlah Kabupaten dan Kota Berdasarkan Provinsi Tahun 2014-2017.....	8
Tabel 2.3 Jumlah Kecamatan dan Desa ⁽¹⁾ Berdasarkan Provinsi Tahun 2014-2017	9
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2010 dan 2017	10
Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Berdasarkan Provinsi.	12
Tabel 2.6 Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Provinsi.....	13
Tabel 2.7 PDB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2017	15
Tabel 2.8 PDB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2017.	16
Tabel 2.9 Laju Pertumbuhan Kumulatif PDB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2017.....	17
Tabel 2.10 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2017	19
Tabel 2.11 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014-2016	20
Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2015	21
Tabel 2.13 APBN Kementerian PUPR Tahun 2013-2018	22
Tabel 2.14 APBN Kementerian PUPR Tahun 2018 menurut Jenis Belanja.....	23
Tabel 2.15 Alokasi APBN Kementerian PUPR Berdasarkan Unit Organisasi Tahun 2017	25
Tabel 2.16 Alokasi APBN Kementerian PUPR Berdasarkan Unit Organisasi Tahun 2017 (lanjutan).....	25
Tabel 3.1 Wilayah Sungai Lintas Negara	27
Tabel 3.2 Wilayah Sungai Lintas Provinsi	28
Tabel 3.3 Wilayah Sungai Strategis Nasional	29
Tabel 3.4 Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	30
Tabel 3.5 Wilayah Sungai dalam Satu Kabupaten/Kota	31
Tabel 3.6 Program Pembangunan Bendungan 2014-2019	32



Tabel 3.7 Daftar 65 Bendungan Rencana di Indonesia	33
Tabel 3.8 Daftar Bendungan Eksisting di Indonesia.....	35
Tabel 3.9 Daftar Bendungan Eksisting di Indonesia (lanjutan)	45
Tabel 3.10 Jumlah Bendung di Indonesia Tahun 2018	52
Tabel 3.11 Embung di Indonesia menurut Provinsi Tahun 2018	53
Tabel 3.12 Jumlah Pengaman Pantai di Indonesia menurut Provinsi Tahun 2018.....	55
Tabel 3.13 Jumlah Sabo Dam di Indonesia menurut Provinsi Tahun 2018	57
Tabel 3.14 Jumlah Pengaman Pantai di Indonesia menurut Provinsi Tahun 2018.....	58
Tabel 4.1 Kondisi Panjang Jalan Nasional Tahun 2017	63
Tabel 4.2 Jalan Tol Beroperasi	64
Tabel 4.3 Jalan Tol Trans Jawa dalam Pembangunan.....	67
Tabel 4.4 Jalan Tol Jabodetabek dalam Pembangunan.....	69
Tabel 4.5 Jalan Tol Non Trans Jawa dalam Pembangunan	71
Tabel 4.6 Jalan Tol Trans Sumatera dalam Pembangunan	73
Tabel 4.7 Jalan Tol dalam Perencanaan.....	75
Tabel 4.8 Kondisi Jembatan Nasional Tahun 2018	77
Tabel 4.9 Kondisi Panjang Jalan Provinsi Tahun 2018	79
Tabel 4.10 Kondisi Panjang Jalan Kota Tahun 2018.....	81
Tabel 4.11 Kondisi Panjang Jalan Kabupaten Tahun 2018.....	83
Tabel 5.1 Data Teknis Sistem Penyediaan Air Minum.....	87
Tabel 5.2 Data Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (lanjutan).....	88
Tabel 5.3 Data Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum	89
Tabel 5.4 Data Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (lanjutan).....	90
Tabel 5.5 Perkembangan Kinerja PDAM Tahun 2010-2017.....	91
Tabel 5.6 Kinerja PDAM di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2017	93



Tabel 5.7 Kapasitas dan Layanan PDAM di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2017	94
Tabel 5.8 Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	96
Tabel 5.9 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Menurut Provinsi	97
Tabel 5.10 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Menurut Provinsi.....	99
Tabel 5.11 Intalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Menurut Provinsi.....	100
Tabel 5.12 Lokasi Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan.....	103
Tabel 5.13 Pos Lintas Batas Negara.....	106
Tabel 5.14 Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kawasan Perbatasan.....	106
Tabel 5.15 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas	109
Tabel 5.16 Kawasan Permukiman Nelayan/Tepi Air Percontohan	110
Tabel 5.17 Kabupaten/Kota Program Pengembangan Kota Hijau Tahun 2017	111
Tabel 5.18 Anggota Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka	113
Tabel 6.1 Jumlah Rumah Susun Menurut Provinsi Tahun 2016-2018.....	118
Tabel 6.2 Jumlah Rumah Susun berdasarkan Kegiatan Tahun 2018.....	120
Tabel 6.3 Jumlah Rumah Khusus menurut Provinsi Tahun 2016-2018	121
Tabel 6.4 Jumlah Rumah Khusus Menurut Kegiatan Tahun 2018.....	122
Tabel 6.5 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya menurut Provinsi Tahun 2015-2017	124
Tabel 6.6 Jumlah Pembangunan PSU Rumah Umum Tahun 2015-2017.....	126
Tabel 6.7 Data Penyaluran KPR Sejahtera FLPP Rumah Tapak dan Rumah Susun	127



Tabel 7.1 Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi	132
Tabel 7.2 Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi (lanjutan)	133
Tabel 7.3 Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi	135
Tabel 7.4 Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi	137
Tabel 8.1 Jumlah SDM Kementerian PUPR tahun 2011-2018	141
Tabel 8.2 Jumlah SDM Kementerian PUPR berdasarkan Unit Organisasi Tahun 2018 .	141
Tabel 8.3 Jumlah SDM menurut Golongan Tahun 2018	142
Tabel 8.4 Jumlah SDM menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2018.....	143



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Indonesia	4
Gambar 2.2 Persentase Luas Wilayah berdasarkan Pulau Terbesar Tahun 2017	5
Gambar 2.3 Rekapitulasi Wilayah Administrasi Indonesia	10
Gambar 2.4 Persentase Sebaran Penduduk Indonesia berdasarkan Pulau Terbesar Tahun 2017	13
Gambar 2.5 Persentase APBN Kementerian PUPR menurut Jenis Belanja.....	23
Gambar 2.6 Persentase Alokasi APBN Kementerian PUPR Berdasarkan Unit Organisasi Tahun 2018.....	24
Gambar 4.1 Persentase Kondisi Kemantapan Jalan tahun 2017	62
Gambar 4.2 Persentase Kondisi Jembatan Nasional Tahun 2018	76
Gambar 4.3 Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Tahun 2018.....	79
Gambar 4.4 Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Kota Tahun 2018.....	81
Gambar 4.5 Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun 2018	83
Gambar 5.1 Perkembangan Kinerja PDAM Tahun 2013-2017	92
Gambar 5.2 Persentase PDAM Dalam Kondisi Sehat Tahun 2010-2017	92
Gambar 5.3 Persentase Kinerja PDAM di Indonesia Tahun 2017	94
Gambar 6.1 Persentase Rumah Susun berdasarkan Kegiatan Tahun 2018	119
Gambar 6.2 Jumlah Rumah Khusus Tahun 2016-2018	121
Gambar 6.3 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2015-2017	124
Gambar 7.1 Persentase Kualifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi.....	131
Gambar 7.2 Persentase Kualifikasi Tenaga Ahli Konstruksi.....	135
Gambar 7.3 Persentase Tenaga Terampil Konstruksi.....	137



Gambar 8.1 Perkembangan Jumlah SDM Kementerian PUPR Tahun 2011-2018	140
Gambar 8.2 Persentase Jumlah SDM Kementerian PUPR Berdasarkan Golongan Tahun 2018	142
Gambar 8.3 Persentase pegawai Kementerian PUPR menurut Jenis Kelamin Tahun 2018	145
Gambar 8.4 Jumlah Pegawai Kementerian PUPR menurut Jenis kelamin dan Unit Organisasi Tahun 2018	146
Gambar 8.5 Jumlah Pegawai Kementerian PUPR menurut Jenis kelamin dan Unit Organisasi Tahun 2018 (lanjutan)	146

Pembangunan Infrastruktur

Terwujudnya
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
yang Handal dalam Mendukung Indonesia yang
Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong

Basuki Hadimuljono





A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu indikator kemajuan suatu negara. Program pembangunan infrastruktur adalah bagian dari pendukung program di sektor lain. Dengan adanya pembangunan maka dapat memacu pertumbuhan ekonomi, serta terciptanya lapangan pekerjaan. Pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh. Kementerian PUPR sebagai penyelenggara program pembangunan infrastruktur bertanggung jawab atas pembangunan sumber daya air, jalan dan jembatan, keciptakarya, serta perumahan.

Proses pembangunan infrastruktur perlu adanya informasi literal dan kestatistikan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi program dan pemanfaatan pembangunan. Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) memiliki fungsi salah satunya yaitu sebagai unit pengelola serta penyedia data baik literal maupun spasial, yaitu unit kerja Balai Pemetaan dan Informasi Infrastruktur (BPII). BPII memiliki tugas penyusunan informasi literal dan kestatistikan di bidang PUPR, dan penyediaan data infrastruktur bidang PUPR beserta pendukungnya yang dituangkan dalam Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Buku ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perkembangan pembangunan infrastruktur secara menyeluruh, agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat terlaksana dengan baik.

Secara garis besar Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan gambaran tentang hasil pembangunan infrastruktur PUPR yang disajikan melalui data agregat menurut provinsi. Data tersebut terkait bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, perumahan, serta data sektor pendukung lainnya.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini adalah untuk menyajikan data dan informasi statistik terkait infrastruktur bidang PUPR. Buku ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi pimpinan di lingkungan Kementerian PUPR, instansi lainnya, serta masyarakat umum.

BAB
2

GAMBARAN UMUM INDONESIA

ASTRONOMI

$6^{\circ} 04' 30''$ LU dan $11^{\circ} 00' 36''$ LS
dan antara
 $94^{\circ} 58' 21''$ BT - $141^{\circ} 01' 10''$ BT

LUAS WILAYAH

1,9 JUTA km²
luas darat

5,8 JUTA km²
luas laut



Penduduk
261.890,9 Ribu Jiwa

137 Jiwa/km²

Kepadatan

7.217
Kecamatan

83.344
Kelurahan/Desa

416 Kabupaten

98 Kota



A. Geografi Wilayah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 5 pulau besar dan 4 kepulauan. Secara keseluruhan Indonesia memiliki 16.056 pulau. Luas wilayah Indonesia yaitu 1.916.862,20 km². Secara astronomi Indonesia terletak antara 6⁰ 04' 30" Lintang Utara dan 11⁰ 00' 36" Lintang Selatan dan antara 94⁰ 58' 21" Bujur Timur - 141⁰ 01' 10" Bujur Timur. Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilalui oleh garis khatulistiwa.



Gambar 2.1 Peta Indonesia

Batas-batas negara Indonesia yaitu sebagai berikut:

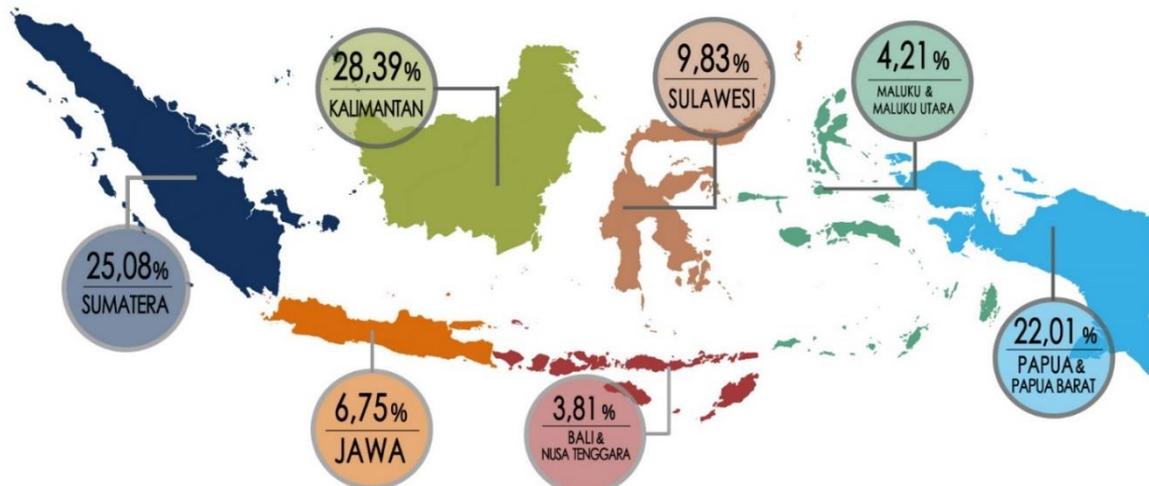
- Sebelah Utara : Negara Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Thailand, Palau, dan Laut Cina Selatan
- Sebelah Selatan : Negara Australia, Timor Leste, dan Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Samudera Hindia
- Sebelah Timur : Negara Papua Nugini dan Samudera Pasifik.



Secara geografis Indonesia memiliki posisi yang strategis yang terletak diantara dua benua, Asia dan Australia serta diapit oleh dua Samudera, Hindia dan Pasifik. Dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu jalur lintas perdagangan. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kehidupan sosial, ekonomi, serta kebudayaan masyarakat Indonesia. Jika dibentangkan dari Samudera Hindia hingga Samudera Pasifik, wilayah Indonesia berada disepanjang 3.977 mil diantara kedua samudera tersebut. Sirkum Mediterania, Sirkum Pasifik, Sirkum Lingkaran Australia merupakan 3 sirkum gunung api yang terletak di Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia salah satu negara yang memiliki hasil alam yang sangat besar, namun juga berpotensi rawan bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, dan lainnya.

Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia. Pada Gambar 2.2 dapat dilihat persentase luas Pulau Kalimantan sebesar 28,44% dari luas Indonesia atau setara dengan 544.150,07 km². Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar ketiga di dunia setelah Greenland dan Pulau Papua (termasuk negara Papua Nugini).

Wilayah terluas berdasarkan provinsi adalah Provinsi Papua, dengan luas wilayah 319.036,05 km² atau sekitar 16,64%, hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.1. Pada tabel tersebut juga dapat dilihat provinsi yang memiliki jumlah pulau terbanyak yaitu Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 4.108 pulau.



Gambar 2.2 Persentase Luas Wilayah berdasarkan Pulau Terbesar Tahun 2017



Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Jumlah Pulau Berdasarkan Provinsi

Provinsi	Ibu Kota Provinsi	Luas ⁽¹⁾ (Km ²)	Persentase Terhadap Luas Indonesia	Jumlah Pulau ⁽²⁾
Aceh	Banda Aceh	57.956,00	3,02	331
Sumatera Utara	Medan	72.981,23	3,81	232
Sumatera Barat	Padang	42.012,89	2,19	211
Riau	Pekanbaru	87.023,66	4,54	161
Jambi	Jambi	50.058,16	2,61	15
Sumatera Selatan	Palembang	91.592,43	4,78	23
Bengkulu	Bengkulu	19.919,33	1,04	10
Lampung Bandar	Lampung	34.623,80	1,81	132
Kep. Bangka Belitung	Pangkal Pinang	16.424,06	0,86	556
Kepulauan Riau	Tanjung Pinang	8.201,72	0,43	1.994
DKI Jakarta	Jakarta	664,01	0,03	110
Jawa Barat	Bandung	35.377,76	1,85	30
Jawa Tengah	Semarang	32.800,69	1,71	72
DI Yogyakarta	Yogyakarta	3.133,15	0,16	33
Jawa Timur	Surabaya	47.799,75	2,49	431
Banten	Serang	9.662,92	0,50	81
Bali	Denpasar	5.780,06	0,30	33
Nusa Tenggara Barat	Mataram	18.572,32	0,97	407
Nusa Tenggara Timur	Kupang	48.718,10	2,54	532
Kalimantan Barat	Pontianak	147.307,00	7,68	243
Kalimantan Tengah	Palangka Raya	153.564,50	8,01	64
Kalimantan Selatan	Banjarmasin	38.744,23	2,02	172
Kalimantan Timur	Samarinda	129.066,64	6,73	419
Kalimantan Utara	Bulungan	75.467,70	3,94	34
Sulawesi Utara	Manado	13.851,64	0,72	287
Sulawesi Tengah	Palu	61.841,29	3,23	1.632
Sulawesi Selatan	Makassar	46.717,48	2,44	314
Sulawesi Tenggara	Kendari	38.067,70	1,99	527
Gorontalo	Gorontalo	11.257,07	0,59	123
Sulawesi Barat	Mamuju	16.787,18	0,88	41
Maluku	Ambon	46.914,03	2,45	1.286
Maluku Utara	Ternate	31.982,50	1,67	856
Papua Barat	Manokwari	102.955,15	5,37	4.108
Papua	Jayapura	319.036,05	16,64	556
Indonesia		1.916.862,20	100,00	16.056

Sumber : Kementerian Dalam Negeri - Statistik Indonesia 2017

Catatan : ⁽¹⁾ Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017

⁽²⁾ Berdasarkan informasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018



B. Administrasi Wilayah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Sistem pemerintahan yang dijalankan di Indonesia adalah presidensial dengan presiden sebagai kepala negara. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipilih secara langsung melalui pemilihan umum (Pemilu) setiap 5 tahun sekali. Setiap provinsi di Indonesia dipimpin oleh Gubernur dan memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi. Wilayah kabupaten dipimpin oleh Bupati dan memiliki DPRD Kabupaten. Sedangkan kota dipimpin oleh walikota dan memiliki DPRD Kota.

Indonesia memiliki 34 provinsi, setelah Kalimantan Utara ditetapkan menjadi provinsi pada tahun 2012. Di Indonesia terdapat 5 provinsi yang memiliki status otonomi khusus yaitu Provinsi Aceh, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, dan Papua Barat. Kelima daerah ini memiliki hak istimewa legislatur dan tingkat otonomi yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lain.

Provinsi Aceh memiliki hak istimewa untuk menerapkan hukum syariah sejak tahun 2003. DKI Jakarta diberi status khusus sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), selain itu DKI Jakarta memiliki peran dan fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan NKRI sebagai daerah otonom. Sedangkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat status khusus sebagai pengakuan terhadap perannya dalam mendukung Indonesia pada masa revolusi. Provinsi Papua yang semula bernama Irian Jaya mendapat status otonomi khusus pada tahun 2001. Sama halnya dengan Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat yang dahulu bernama Irian Jaya Barat mendapat status otonomi khusus pada tahun 2001.

Tahun 2017 Indonesia tercatat memiliki 416 kabupaten dan 98 kota. Pada kabupaten dan kota tersebut memiliki 7.217 kecamatan dan 83.344 desa. Dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3. bahwa Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah kabupaten terbanyak di Indonesia, yaitu sebanyak 29 kabupaten. Sedangkan untuk provinsi yang memiliki kota terbanyak adalah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur, masing-masing sebanyak 9 kota.

Jumlah kecamatan dan desa di Indonesia sejak tahun 2014-2017 selalu bertambah. Dapat dilihat pada tabel 2.3, jumlah total kecamatan tahun 2017 mencapai 7.217 kecamatan, dan jumlah desa mencapai 83.344 desa.



Tabel 2.2 Jumlah Kabupaten dan Kota Berdasarkan Provinsi Tahun 2014-2017

Provinsi	Jumlah Kabupaten				Jumlah Kota			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Aceh	18	18	18	18	5	5	5	5
Sumatera Utara	25	25	25	25	8	8	8	8
Sumatera Barat	12	12	12	12	7	7	7	7
Riau	10	10	10	10	2	2	2	2
Jambi	9	9	9	9	2	2	2	2
Sumatera Selatan	13	13	13	13	4	4	4	4
Bengkulu	9	9	9	9	1	1	1	1
Lampung	13	13	13	13	2	2	2	2
Kep. Bangka Belitung	6	6	6	6	1	1	1	1
Kepulauan Riau	5	5	5	5	2	2	2	2
DKI Jakarta	1	1	1	1	5	5	5	5
Jawa Barat	18	18	18	18	9	9	9	9
Jawa Tengah	29	29	29	29	6	6	6	6
DI Yogyakarta	4	4	4	4	1	1	1	1
Jawa Timur	29	29	29	29	9	9	9	9
Banten	4	4	4	4	4	4	4	4
Bali	8	8	8	8	1	1	1	1
Nusa Tenggara Barat	8	8	8	8	2	2	2	2
Nusa Tenggara Timur	21	21	21	21	1	1	1	1
Kalimantan Barat	12	12	12	12	2	2	2	2
Kalimantan Tengah	13	13	13	13	1	1	1	1
Kalimantan Selatan	11	11	11	11	2	2	2	2
Kalimantan Timur	7	7	7	7	3	3	3	3
Kalimantan Utara	4	4	4	4	1	1	1	1
Sulawesi Utara	11	11	11	11	4	4	4	4
Sulawesi Tengah	12	12	12	12	1	1	1	1
Sulawesi Selatan	21	21	21	21	3	3	3	3
Sulawesi Tenggara	15	15	15	15	2	2	2	2
Gorontalo	5	5	5	5	1	1	1	1
Sulawesi Barat	6	6	6	6	0	0	0	0
Maluku	9	9	9	9	2	2	2	2
Maluku Utara	8	8	8	8	2	2	2	2
Papua Barat	12	12	12	12	1	1	1	1
Papua	28	28	28	28	1	1	1	1
Indonesia	416	416	416	416	98	98	98	98

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017, Statistik Indonesia 2017

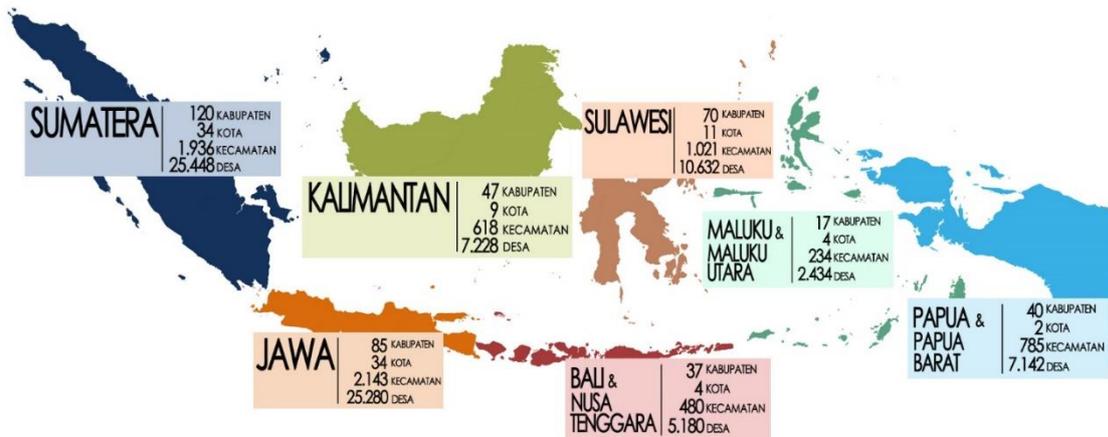


Tabel 2.3 Jumlah Kecamatan dan Desa⁽¹⁾ Berdasarkan Provinsi Tahun 2014-2017

Provinsi	Jumlah Kecamatan				Jumlah Desa			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Aceh	289	289	289	289	6.513	6.513	6.513	6.509
Sumatera Utara	440	440	443	449	6.015	6.112	6.113	6.113
Sumatera Barat	179	179	179	179	1.145	1.131	1.117	1.160
Riau	164	166	166	169	1.835	1.847	1.847	1.876
Jambi	138	138	141	141	1.551	1.562	1.562	1.562
Sumatera Selatan	231	232	232	236	3.257	3.265	3.261	3.263
Bengkulu	127	129	129	128	1.524	1.524	1.520	1.515
Lampung	227	227	228	228	2.631	2.643	2.643	2.643
Kepulauan Bangka Belitung	47	47	47	47	381	387	387	391
Kepulauan Riau	66	66	70	70	416	416	416	416
DKI Jakarta	44	44	44	44	267	267	267	267
Jawa Barat	626	626	627	627	5.962	5.962	5.962	5.963
Jawa Tengah	573	573	573	573	8.578	8.559	8.559	8.559
DI Yogyakarta	78	78	78	78	438	438	438	438
Jawa Timur	664	664	665	666	8.499	8.501	8.501	8.501
Banten	155	155	155	155	1.551	1.551	1.551	1.552
Bali	57	57	57	57	716	716	716	716
Nusa Tenggara Barat	116	116	116	116	1.141	1.141	1.141	1.141
Nusa Tenggara Timur	306	306	307	307	3.270	3.270	3.279	3.323
Kalimantan Barat	174	174	174	174	2.005	2.005	2.072	2.132
Kalimantan Tengah	136	136	136	136	1.569	1.574	1.574	1.574
Kalimantan Selatan	152	152	152	152	2.009	2.009	2.008	2.008
Kalimantan Timur	103	103	103	103	1.026	1.032	1.032	1.032
Kalimantan Utara	50	50	53	53	479	479	482	482
Sulawesi Utara	167	168	171	171	1.830	1.832	1.838	1.838
Sulawesi Tengah	172	175	175	175	1.985	2.013	2.018	2.019
Sulawesi Selatan	306	306	306	307	3.030	3.033	3.033	3.054
Sulawesi Tenggara	213	216	220	222	2.268	2.292	2.328	2.336
Gorontalo	77	77	77	77	735	735	735	735
Sulawesi Barat	69	69	69	69	649	648	650	650
Maluku	118	118	118	118	1.190	1.224	1.235	1.238
Maluku Utara	115	115	115	116	1.196	1.196	1.196	1.196
Papua Barat	175	181	189	217	1.590	1.614	1.614	1.825
Papua	470	499	541	568	4.375	4.445	4.787	5.317
Indonesia	7.024	7.071	7.145	7.217	81.626	81.936	82.395	83.344

Sumber : Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 29 Tahun 2018 Tanggal 15 Januari 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2017

Catatan : ⁽¹⁾ Termasuk Kelurahan dan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT)



Gambar 2.3 Rekapitulasi Wilayah Administrasi Indonesia

C. Demografi Wilayah

Indonesia merupakan negara majemuk. Sebagai negara kesatuan kemajemukan tak lintas membuat Indonesia menjadi terkotak-kotak. Sebagai mana semboyan Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika, beraneka ragam namun tetap satu. Kemajemukan Indonesia dapat dilihat dari keberagaman suku, bahasa, agama, dan adat istiadat yang dimiliki Indonesia.

Menurut data BPS terdapat sekitar 1.300 suku bangsa di Indonesia. Suku Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia, dengan jumlah populasinya sebesar 95,2 juta jiwa atau sekitar 40% dari populasi Indonesia. Terdapat sebanyak 2.500 bahasa daerah yang digunakan di Indonesia, jumlah ini melebihi jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2010 dan 2017

Provinsi	Penduduk (ribu jiwa)		
	2010 ⁽¹⁾	2010 ⁽²⁾	2017 ⁽²⁾
Aceh	4.494,4	4.523,1	5.189,5
Sumatera Utara	12.982,2	13.028,7	14.262,1
Sumatera Barat	4.846,9	4.865,3	5.321,5
Riau	5.538,4	5.574,9	6.657,9
Jambi	3.092,3	3.107,6	3.515,0
Sumatera Selatan	7.450,4	7.481,6	8.267,0
Bengkulu	1.715,5	1.722,1	1.934,3
Lampung	7.608,4	7.634,0	8.289,6
Kepulauan Bangka Belitung	1.223,3	1.230,2	1.430,9
Kepulauan Riau	1.679,2	1.692,8	2.082,7



Provinsi	Penduduk (ribu jiwa)		
	2010 ⁽¹⁾	2010 ⁽²⁾	2017 ⁽²⁾
DKI Jakarta	9.607,8	9.640,4	10.374,2
Jawa Barat	43.053,7	43.227,1	48.037,6
Jawa Tengah	32.382,7	32.443,9	34.257,9
DI Yogyakarta	3.457,5	3.467,5	3.762,2
Jawa Timur	37.476,8	37.565,8	39.293,0
Banten	10.632,2	10.688,6	12.448,2
Bali	3.890,8	3.907,4	4.246,5
Nusa Tenggara Barat	4.500,2	4.516,1	4.955,6
Nusa Tenggara Timur	4.683,8	4.706,2	5.287,3
Kalimantan Barat	4.396,0	4.411,4	4.932,5
Kalimantan Tengah	2.212,1	2.220,8	2.605,3
Kalimantan Selatan	3.626,6	3.642,6	4.119,8
Kalimantan Timur	3.553,1	3.576,1	3.575,4
Kalimantan Utara	-	-	691,1
Sulawesi Utara	2.270,6	2.277,7	2.461,0
Sulawesi Tengah	2.635,0	2.646,0	2.966,3
Sulawesi Selatan	8.034,8	8.060,4	8.690,3
Sulawesi Tenggara	2.232,6	2.243,6	2.602,4
Gorontalo	1.040,2	1.044,8	1.168,2
Sulawesi Barat	1.158,6	1.164,6	1.331,0
Maluku	1.533,5	1.541,9	1.744,7
Maluku Utara	1.038,1	1.043,3	1.209,3
Papua Barat	760,4	765,3	915,4
Papua	2.833,4	2.857,0	3.265,2
Indonesia	237.641,3	238.518,8	261.890,9

Sumber : Sensus Penduduk (SP) 2010 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, BPS RI

Catatan : ⁽¹⁾ Hasil Sensus Penduduk 2010, Status Mei

⁽²⁾ Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010-2035, Status Juni

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 (bulan Mei) adalah 237.641.300 jiwa. Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010-2035, jumlah penduduk Indonesia tahun 2017 adalah 261.890,9 jiwa. Tabel 2.4 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yaitu sebanyak 48.037,6 jiwa, diikuti dengan Provinsi Jawa Timur yaitu sebanyak 39.293,0 jiwa. Pada Tabel 2.5 dapat dilihat laju pertumbuhan penduduk hasil proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010-2015 (bulan Juni) adalah sebesar 1,34%.



Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Berdasarkan Provinsi

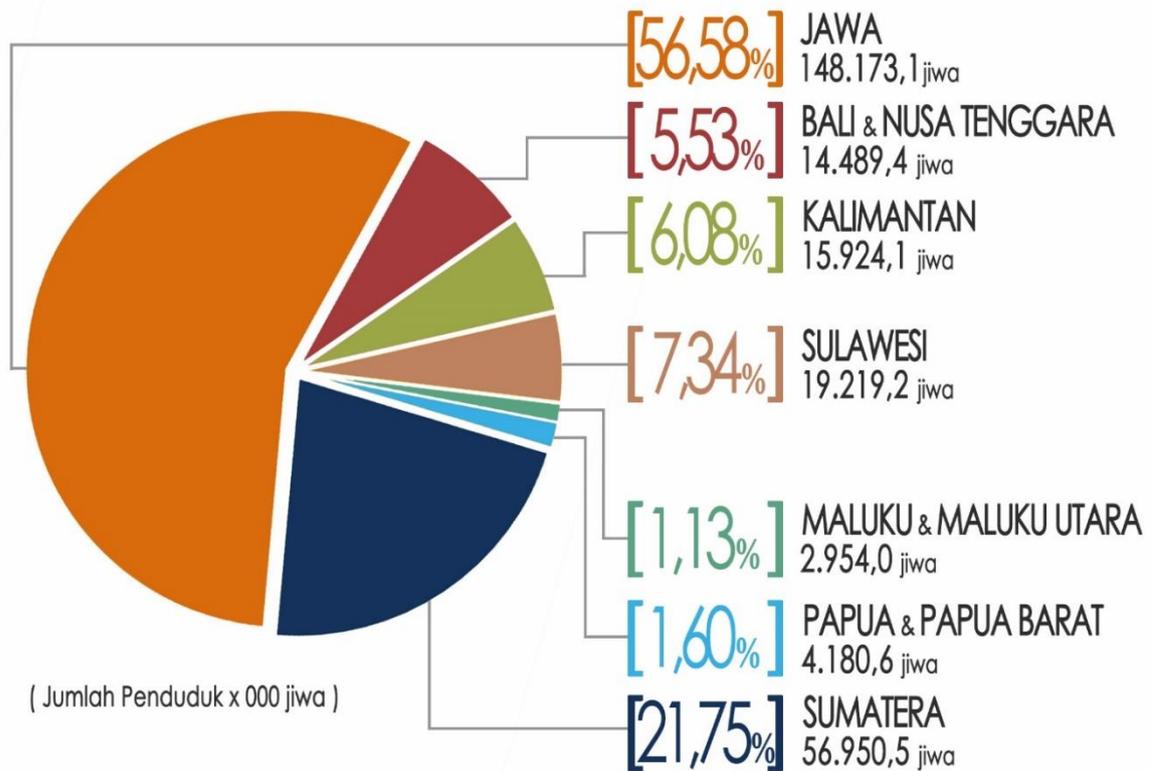
Provinsi	Laju Pertumbuhan penduduk per tahun		Rasio Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin	
	2000-2010	2010-2017 ⁽²⁾	2010	2017
Aceh	2,36 ⁽³⁾	1,98	99,4	99,8
Sumatera Utara	1,10	1,30	99,4	99,6
Sumatera Barat	1,34	1,29	98,1	99,2
Riau	3,58	2,57	105,9	105,4
Jambi	2,56	1,78	104,2	104,2
Sumatera Selatan	1,85	1,44	103,3	103,3
Bengkulu	1,67	1,67	104,2	104
Lampung	1,24	1,18	105,7	105,1
Kepulauan Bangka Belitung	3,14	2,18	107,6	108,3
Kepulauan Riau	4,95	3,01	105,2	104,2
DKI Jakarta	1,41	1,05	102,5	100,8
Jawa Barat	1,90	1,52	103,2	102,7
Jawa Tengah	0,37	0,78	98,4	98,4
DI Yogyakarta	1,04	1,17	97,4	97,9
Jawa Timur	0,76	0,64	97,2	97,5
Banten	2,78	2,20	104,4	103,9
Bali	2,15	1,20	101,3	101,4
Nusa Tenggara Barat	1,17	1,34	93,9	94,3
Nusa Tenggara Timur	2,07	1,68	98,3	98,2
Kalimantan Barat	0,91	1,61	104,3	103,7
Kalimantan Tengah	1,79	2,31	108,6	109,5
Kalimantan Selatan	1,99	1,77	102,2	102,9
Kalimantan Timur	3,81	2,31	110,9	110,2
Kalimantan Utara	0,0	3,9	0,0	113
Sulawesi Utara	1,28	1,11	104,1	104,2
Sulawesi Tengah	1,95	1,65	104,8	104,3
Sulawesi Selatan	1,17	1,08	95,1	95,5
Sulawesi Tenggara	2,08	2,14	100,6	101,1
Gorontalo	2,26	1,61	100,3	100,4
Sulawesi Barat	2,68	1,93	100,4	100,7
Maluku	2,80	1,78	101,9	101,7
Maluku Utara	2,47	2,13	104,5	104,1
Papua Barat	3,71	2,59	112,0	111,2
Papua	5,39	1,93	113,0	111,1
Indonesia	1,49	1,34	101,0	101,0

Sumber : Sensus Penduduk (SP) 2010 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, BPS RI

Catatan : ⁽¹⁾ Hasil SP 2010, Status Mei

⁽²⁾ Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2010-2035 (pertengahan tahun/juni).

⁽³⁾ Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2000-2010 untuk Aceh dihitung menggunakan data Sensus Penduduk Aceh Nias (SPAN) 2005 dan SP2010



Gambar 2.4 Persentase Sebaran Penduduk Indonesia berdasarkan Pulau Terbesar Tahun 2017

Sebaran penduduk di Indonesia tidak merata di tiap pulau dan provinsi. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.7, sebaran penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yakni sebesar 56,58% dari total jumlah penduduk Indonesia, dengan jumlah penduduk mencapai 148.173,1 jiwa menjadikan Pulau Jawa sebagai pulau terpadat di Indonesia.

Kepadatan penduduk di Pulau Jawa dapat terlihat dari angka kepadatan penduduk Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 yang mencapai 15.624 jiwa/km², angka ini merupakan yang terbesar di Indonesia. Persentase penduduk yang terbesar pada tahun 2017 adalah provinsi Jawa Barat, sebesar 18,34% dari keseluruhan penduduk Indonesia.

Tabel 2.6 Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Provinsi

Provinsi	Persentase Penduduk		Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	
	2010	2017	2010	2017
Aceh	1,90	1,98	78	90
Sumatera Utara	5,46	5,45	179	195
Sumatera Barat	2,04	2,03	116	127
Riau	2,34	2,54	64	77



Provinsi	Persentase Penduduk		Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	
	2010	2017	2010	2017
Jambi	1,30	1,34	62	70
Sumatera Selatan	3,14	3,16	82	90
Bengkulu	0,72	0,74	86	97
Lampung	3,20	3,17	220	239
Kepulauan Bangka Belitung	0,52	0,55	75	87
Kepulauan Riau	0,71	0,80	206	254
DKI Jakarta	4,04	3,96	14.518	15.624
Jawa Barat	18,12	18,34	1.222	1.358
Jawa Tengah	13,60	13,08	989	1.044
DI Yogyakarta	1,45	1,44	1.107	1.201
Jawa Timur	15,75	15,00	786	822
Banten	4,48	4,75	1.106	1.288
Bali	1,64	1,62	676	735
Nusa Tenggara Barat	1,89	1,89	243	267
Nusa Tenggara Timur	1,97	2,02	97	109
Kalimantan Barat	1,85	1,88	30	33
Kalimantan Tengah	0,93	0,99	14	17
Kalimantan Selatan	1,53	1,57	94	106
Kalimantan Timur	1,50	1,37	17	28
Kalimantan Utara	0,00	0,26	0	9
Sulawesi Utara	0,95	0,94	164	178
Sulawesi Tengah	1,11	1,13	43	48
Sulawesi Selatan	3,38	3,32	173	186
Sulawesi Tenggara	0,94	0,99	59	68
Gorontalo	0,44	0,45	93	104
Sulawesi Barat	0,49	0,51	69	79
Maluku	0,65	0,67	33	37
Maluku Utara	0,44	0,46	33	38
Papua Barat	0,32	0,35	8	9
Papua	1,20	1,25	9	10
Indonesia	100	100	124	137

Sumber : Sensus Penduduk (SP) 2010 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, BPS

EKONOMI WILAYAH



LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI
2017^{XX}

5,07%

XX Angka Sangat Sementara

LAJU PERTUMBUHAN PDRB MENURUT PROVINSI

MALUKU UTARA
7,67%

(tertinggi)



NUSA
TENGGARA BARAT
0,11%

(terendah)

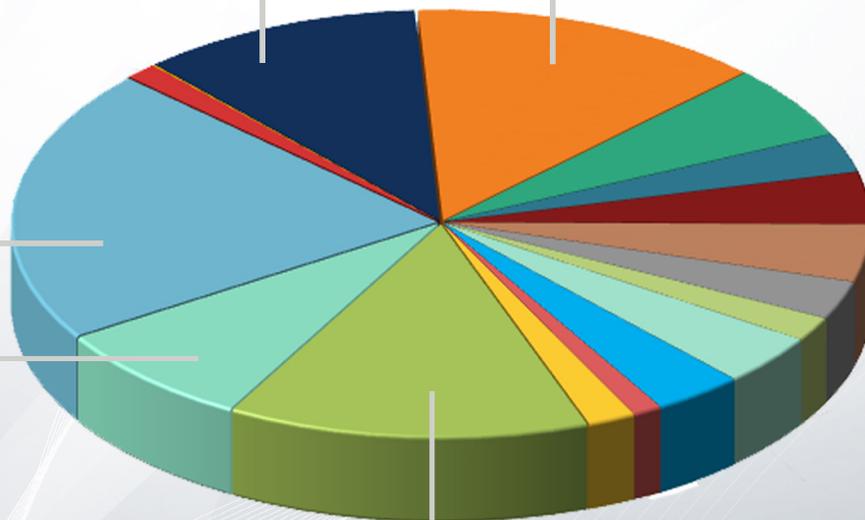
DISTRIBUSI
PERSENTASE PDB
ATAS DASAR
HARGA BERLAKU
MENURUT
LAPANGAN USAHA

5 Jenis lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar

10,37%
KONSTRUKSI

13,01%
PERDAGANGAN BESAR & ECERAN
REPARASI MOBIL & SEPEDA MOTOR

56,58%
INDUSTRI PENGOLAHAN



7,57%
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN

13,14%
PERTANIAN, KEHUTANAN & PERIKANAN

D. Ekonomi Wilayah

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu negara dalam suatu periode tertentu, sedangkan pada tingkat regional (provinsi) kondisi ekonomi digambarkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDB dan PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. PDB merupakan nilai akhir dari keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi dalam suatu negara, termasuk yang dihasilkan warga negara lain yang tinggal di negara tersebut.

Perhitungan nilai PDB dan PDRB dapat dilakukan dengan dua cara yaitu atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Nilai PDB dan PDRB atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan nilai PDB dan PDRB atas dasar harga konstan dihitung berdasarkan harga pada satu tahun tertentu yang kemudian dijadikan dasar. PDB dan PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat struktur ekonomi pada tahun tersebut, sedangkan pertumbuhan ekonomi suatu negara dari tahun ke tahun dapat dilihat dari nilai PDB dan PDRB atas dasar harga konstan.

Industri pengolahan merupakan lapangan usaha dengan nilai PDB atas dasar harga konstan paling tinggi sejak tahun 2015-2017. Pada tahun 2015 sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar yaitu 21,54% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional atau sebesar 1.934.533,2 miliar rupiah. Angka tersebut meningkat menjadi 2.103.066,4 miliar rupiah pada tahun 2017 atau sekitar 21,22%. Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor tertinggi kedua yang memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2015-2017 yaitu 13,23% atau sebesar 1.311.463,7 miliar rupiah .

Tabel 2.7 PDB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2017

PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)	PDB Atas Dasar Harga Konstan (miliar rupiah)		
	2015	2016*	2017**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.171.445,8	1.210.749,8	1.256.894,3
Pertambangan dan Penggalian	767.327,2	774.593,1	779.925,4
Industri Pengolahan	1.934.533,2	2.016.876,8	2.103.066,4
Pengadaan Listrik dan Gas	94.894,8	100.009,9	101.551,3
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.369,0	7.634,5	7.986,4
Konstruksi	879.163,9	925.062,5	987.883,5



PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)	PDB Atas Dasar Harga Konstan (miliar rupiah)		
	2015	2016*	2017**
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.207.164,5	1.255.759,4	1.311.463,7
Transportasi dan Pergudangan	348.855,9	374.843,4	406.679,4
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	268.922,4	282.823,4	298.514,9
Informasi dan Komunikasi	421.769,8	459.208,1	504.278,9
Jasa Keuangan dan Asuransi	347.269,0	378.193,1	398.919,0
Real Estate	266.979,6	279.500,5	289.789,4
Jasa Perusahaan	148.395,5	159.321,7	172.763,8
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	310.054,6	319.946,1	326.526,8
Jasa Pendidikan	283.020,1	293.779,7	304.525,0
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	97.465,8	102.487,8	109.448,0
Jasa lainnya	144.904,2	156.523,4	170.073,7
Nilai Tambah Bruto Atas Harga Dasar	8.699.535,3	9.097.313,2	9.530.289,9
Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk	282.981,8	337.319,1	382.459,4
Produk Domestik Bruto	8.982.517,1	9.434.632,3	9.912.749,3

Sumber: Badan Pusat Statistik RI

Catatan: didasarkan pada berbagai sensus, survei dan sumber lainnya

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 2.8 menunjukkan bahwa selama tiga tahun sektor industri pengolahan memiliki nilai PDB atas dasar harga berlaku tertinggi. Pada tahun 2015 nilai PDB atas dasar harga berlaku pada sektor industri pengolahan sebesar 2.418.891,7,4 miliar rupiah atau sebesar 20,99%, tahun 2017 sebesar 2.739.415,0 miliar rupiah atau sebesar 20,16%. Sektor kedua yang berkontribusi besar terhadap struktur ekonomi nasional yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu sebesar 1.785.880,7 miliar rupiah atau 13,14%.

Tabel 2.8 PDB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2017

PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)	PDB Atas Dasar Harga Berlaku (miliar rupiah)		
	2015	2016*	2017**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.555.207,0	1.671.330,3	1.785.880,7
Pertambangan dan Penggalan	881.694,1	890.868,3	1.028.772,2
Industri Pengolahan	2.418.891,7	2.545.203,5	2.739.415,0
Pengadaan Listrik dan Gas	129.833,7	142.344,4	162.339,9
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.546,3	8.942,5	9.720,3



PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)	PDB Atas Dasar Harga Berlaku (miliar rupiah)		
	2015	2016*	2017**
Konstruksi	1.177.084,1	1.287.659,3	1.409.833,8
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.532.876,7	1.635.259,0	1.767.718,3
Transportasi dan Pergudangan	578.464,3	644.999,5	735.229,6
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	341.555,8	363.055,5	387.467,1
Informasi dan Komunikasi	406.016,5	449.188,9	515.888,9
Jasa Keuangan dan Asuransi	464.399,9	520.087,5	571.128,5
Real Estate	327.601,4	350.488,2	379.782,5
Jasa Perusahaan	190.267,9	211.623,6	238.217,0
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	449.382,4	479.793,6	502.238,9
Jasa Pendidikan	387.611,4	418.346,8	446.785,3
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	123.191,5	132.544,6	144.966,5
Jasa lainnya	190.581,0	211.455,6	239.122,0
Nilai Tambah Bruto Atas Harga Dasar	11.163.205,7	11.963.191,1	13.064.506,5
Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk	363.127,1	443.583,0	524.290,8
Produk Domestik Bruto	11.526.332,8	12.406.774,1	13.588.797,3

Sumber: Badan Pusat Statistik RI

Catatan: didasarkan pada berbagai sensus, survei dan sumber lainnya

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Laju pertumbuhan PDB dapat digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil, dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan, dasar pembuatan prakiraan bisnis khususnya persamaan penjualan. Perkembangan laju pertumbuhan kumulatif PDB Indonesia sangat fluktuatif, tahun 2015 hingga tahun 2016 terjadi peningkatan dari 4,88% menjadi 5,03%, sebesar 0,15%. Sedangkan pada tahun 2017 laju pertumbuhan kumulatif PDB sebesar 5,07%. Selama tahun 2017 komponen konstruksi mengalami laju pertumbuhan tertinggi diantara komponen PDB menurut pengeluaran. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.10 dibawah ini.

Tabel 2.9 Laju Pertumbuhan Kumulatif PDB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2017

PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)	Laju Pertumbuhan Kumulatif (%)		
	2015	2016*	2017**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,75	3,36	3,81
Pertambangan dan Penggalan	-3,42	0,95	0,69



PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)	Laju Pertumbuhan Kumulatif (%)		
	2015	2016*	2017**
Industri Pengolahan	4,33	4,26	4,27
Pengadaan Listrik dan Gas	0,9	5,39	1,54
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,07	3,6	4,61
Konstruksi	6,36	5,22	6,79
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,54	4,03	4,44
Transportasi dan Pergudangan	6,71	7,45	8,49
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,31	5,17	5,55
Informasi dan Komunikasi	9,7	8,88	9,81
Jasa Keuangan dan Asuransi	8,58	8,9	5,48
Real Estate	4,11	4,69	3,68
Jasa Perusahaan	7,69	7,36	8,44
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,63	3,19	2,06
Jasa Pendidikan	7,33	3,8	3,66
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,69	5,15	6,79
Jasa lainnya	8,08	8,02	8,66
Nilai Tambah Bruto Atas Harga Dasar	4,17	4,57	4,76
Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk	32,55	19,2	13,38
Produk Domestik Bruto	4,88	5,03	5,07

Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Catatan : Didasarkan pada berbagai sensus, survei dan sumber lainnya

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Indikator ekonomi makro di suatu provinsi salah satunya adalah PDRB. PDRB dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan dalam lingkup provinsi. Berdasarkan pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

Berdasarkan Tabel 2.10 tahun 2017 Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan yang paling tinggi dibandingkan provinsi lainnya yaitu sebesar 2.410.373 miliar rupiah dan 1.635.856 miliar rupiah. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan terendah adalah Provinsi Maluku Utara, masing-masing sebesar 32.273 miliar rupiah dan 23.211 miliar rupiah.

Tabel 2.10 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2017

Provinsi	Nilai PDRB (miliar rupiah)		
	2015	2016*	2017**
Aceh	129.093	137.303	146.483
Sumatera Utara	571.722	628.394	684.069
Sumatera Barat	179.952	196.443	214.585
Riau	652.762	682.291	705.679
Jambi	155.066	171.654	191.099
Sumatera Selatan	331.766	354.547	383.759
Bengkulu	50.334	55.394	60.676
Lampung	252.883	280.141	308.451
Kepulauan Bangka Belitung	60.987	65.095	69.973
Kepulauan Riau	199.570	216.571	229.743
DKI Jakarta	1.989.089	2.176.633	2.410.373
Jawa Barat	1.524.975	1.652.758	1.786.092
Jawa Tengah	1.010.987	1.093.121	1.187.049
DI Yogyakarta	101.441	110.009	119.173
Jawa Timur	1.691.477	1.857.598	2.019.200
Banten	479.300	518.271	564.429
Bali	176.413	194.618	215.361
Nusa Tenggara Barat	105.665	116.528	123.927
Nusa Tenggara Timur	76.121	83.948	91.160
Kalimantan Barat	146.654	161.382	177.469
Kalimantan Tengah	100.064	112.140	126.176
Kalimantan Selatan	137.056	146.280	159.594
Kalimantan Timur	505.105	509.085	592.503
Kalimantan Utara	61.722	66.247	77.406
Sulawesi Utara	91.146	100.543	110.164
Sulawesi Tengah	107.573	120.204	134.243
Sulawesi Selatan	340.390	379.632	418.932
Sulawesi Tenggara	87.714	97.012	107.465
Gorontalo	28.493	31.702	34.548
Sulawesi Barat	32.988	35.959	39.618
Maluku	34.346	37.054	39.879
Maluku Utara	26.638	29.157	32.273
Papua Barat	62.888	66.631	71.789
Papua	150.307	175.552	191.615
Indonesia	11.652.686	12.659.898	13.824.954

Sumber : Badan Pusat Statistik RI dan Sumber Lainnya

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara



Tabel 2.11 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014-2016

Provinsi	Nilai PDRB (Miliar Rupiah)		
	2015	2016*	2017**
Aceh	112.666	116.384	121.263
Sumatera Utara	440.956	463.775	487.531
Sumatera Barat	140.719	148.134	155.964
Riau	448.993	458.997	471.420
Jambi	125.037	130.501	136.557
Sumatera Selatan	254.045	266.854	281.544
Bengkulu	38.066	40.080	42.080
Lampung	199.537	209.814	220.657
Kepulauan Bangka Belitung	45.962	47.851	50.008
Kepulauan Riau	155.131	162.924	166.198
DKI Jakarta	1.454.564	1.540.078	1.635.856
Jawa Barat	1.207.232	1.275.528	1.342.953
Jawa Tengah	806.765	849.313	894.050
DI Yogyakarta	83.474	87.688	92.301
Jawa Timur	1.331.376	1.405.561	1.482.148
Banten	368.377	387.824	409.960
Bali	129.127	137.286	144.964
Nusa Tenggara Barat	89.338	94.538	94.645
Nusa Tenggara Timur	56.771	59.705	62.788
Kalimantan Barat	112.347	118.193	124.307
Kalimantan Tengah	78.891	83.909	89.565
Kalimantan Selatan	110.863	115.738	121.864
Kalimantan Timur	440.676	439.088	452.847
Kalimantan Utara	49.316	51.165	54.535
Sulawesi Utara	70.425	74.771	79.495
Sulawesi Tengah	82.787	91.053	97.552
Sulawesi Selatan	250.803	269.423	288.909
Sulawesi Tenggara	72.993	77.748	83.038
Gorontalo	22.069	23.508	25.093
Sulawesi Barat	25.964	27.525	29.362
Maluku	24.859	26.284	27.812
Maluku Utara	20.380	21.557	23.211
Papua Barat	52.346	54.711	56.907
Papua	130.312	142.221	148.824
Indonesia	9.033.169	9.499.730	9.996.207

Sumber : Badan Pusat Statistik RI dan Sumber Lainnya

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara



Laju pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu daerah pada kurun waktu tertentu. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan pada 3 tahun terakhir yakni dimulai tahun 2015 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar konstan tahun 2015 mencapai 4,99% meningkat menjadi 5,16% tahun 2016 dan 5,23% pada tahun 2017. Sampai dengan tahun 2017 terdapat 3 provinsi yang mengalami peningkatan laju pertumbuhan PDRB cukup tinggi yaitu Provinsi Aceh, Riau, dan Papua masing-masing sebesar 4,03%, 2,01%, dan 1,79%. Sedangkan 3 provinsi yang mengalami penurunan laju pertumbuhan PDRB yang cukup signifikan yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Penurunan laju pertumbuhan PDRB yang paling mencolok adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu sebesar 15,94%.

Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2015

Provinsi	Laju Pertumbuhan (%)		
	2015	2016*	2017**
Aceh	-0,73	3,30	4,19
Sumatera Utara	5,10	5,18	5,12
Sumatera Barat	5,53	5,27	5,29
Riau	0,22	2,23	2,71
Jambi	4,21	4,37	4,64
Sumatera Selatan	4,42	5,04	5,51
Bengkulu	5,13	5,29	4,99
Lampung	5,13	5,15	5,17
Kepulauan Bangka Belitung	4,08	4,11	4,51
Kepulauan Riau	6,02	5,02	2,01
DKI Jakarta	5,91	5,88	6,22
Jawa Barat	5,05	5,66	5,29
Jawa Tengah	5,47	5,27	5,27
DI Yogyakarta	4,95	5,05	5,26
Jawa Timur	5,44	5,57	5,45
Banten	5,45	5,28	5,71
Bali	6,03	6,32	5,59
Nusa Tenggara Barat	21,76	5,82	0,11
Nusa Tenggara Timur	4,92	5,17	5,16
Kalimantan Barat	4,88	5,20	5,17
Kalimantan Tengah	7,01	6,36	6,74
Kalimantan Selatan	3,82	4,40	5,29
Kalimantan Timur	-1,20	-0,36	3,13
Kalimantan Utara	3,40	3,75	6,59
Sulawesi Utara	6,12	6,17	6,32
Sulawesi Tengah	15,50	9,98	7,14
Sulawesi Selatan	7,19	7,42	7,23
Sulawesi Tenggara	6,88	6,51	6,81



Provinsi	Laju Pertumbuhan (%)		
	2015	2016*	2017**
Gorontalo	6,22	6,52	6,74
Sulawesi Barat	7,31	6,01	6,67
Maluku	5,48	5,73	5,81
Maluku Utara	6,10	5,77	7,67
Papua Barat	4,15	4,52	4,01
Papua	7,35	9,14	4,64
Indonesia	4,99	5,16	5,23

Sumber : Statistik Indonesia 2017

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

E. Alokasi Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pembangunan infrastruktur merupakan hal penting dalam proses pertumbuhan suatu bangsa baik pada sektor ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertanian, dan sektor-sektor lainnya. Peran aktif pemerintah, swasta, serta masyarakat sangat dibutuhkan guna terlaksananya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Salah satu peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur adalah dengan pengalokasian anggaran untuk pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur, termasuk infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan salah satu kementerian/lembaga yang menerima alokasi APBN terbesar. Tabel 2.13 menampilkan besaran alokasi APBN Kementerian PUPR sejak tahun 2013-2018. Pada tahun 2018 Kementerian PUPR mendapat APBN sebesar 114.331,9 miliar rupiah. Besarnya anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian PUPR digunakan untuk menjalankan program-program pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan dan jembatan, pengembangan perumahan dan permukiman serta program pembangunan infrastruktur lainnya.

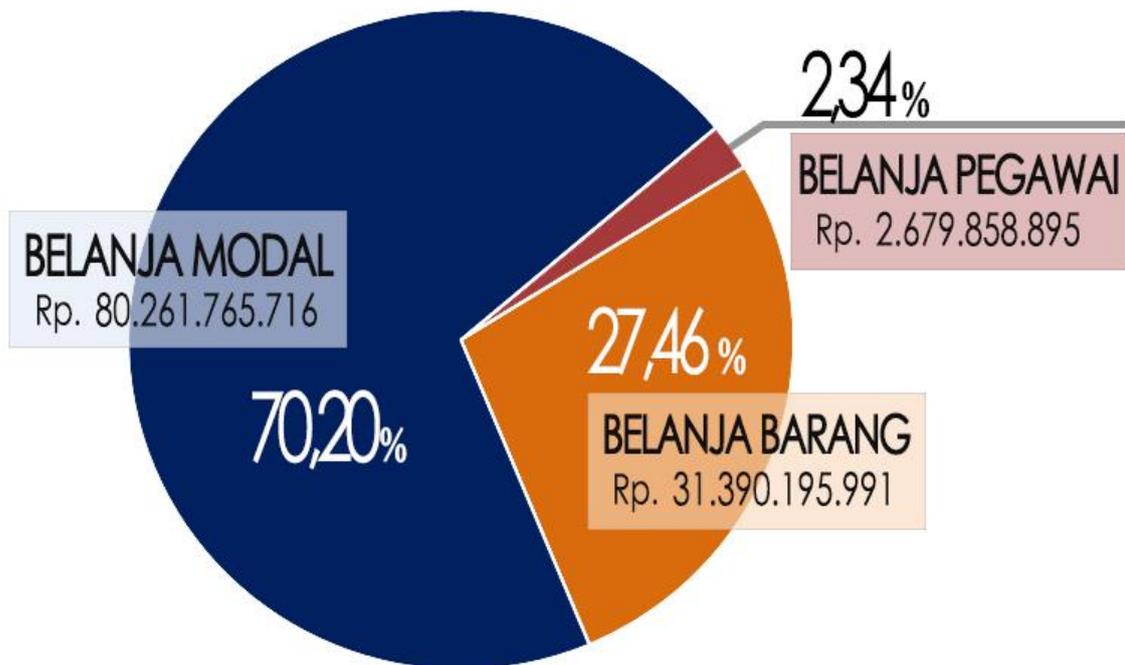
Tabel 2.13 APBN Kementerian PUPR Tahun 2013-2018

Tahun	APBN Kementerian PUPR (ribu rupiah)
2013	89.529.710.470
2014	76.323.290.338
2015	119.689.427.065

Tahun	APBN Kementerian PUPR (ribu rupiah)
2016	98.191.487.770
2017	104.343.326.735
2018	114.331.920.602

Sumber: Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri

Berdasarkan jenis belanja APBN dibagi menjadi 3 yaitu belanja pegawai, barang, dan modal. Persentase belanja modal merupakan yang terbesar yaitu sebesar 70,20% atau sebesar 80.261,8 miliar rupiah. Belanja barang memiliki persentase sebesar 27,46% atau sebesar 31.390,2 miliar rupiah, dan sebesar 2,34% sisanya dialokasikan untuk belanja pegawai senilai 2.679,9 miliar rupiah.



Gambar 2.5 Persentase APBN Kementerian PUPR menurut Jenis Belanja

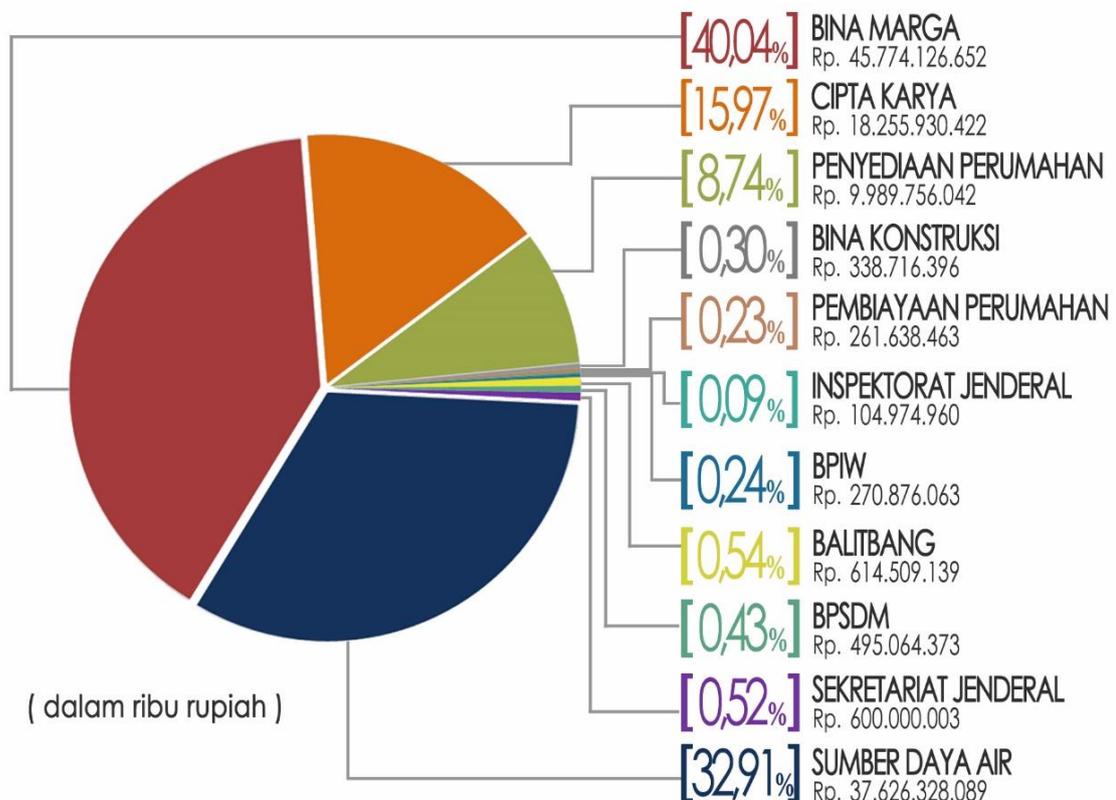
Tabel 2.14 APBN Kementerian PUPR Tahun 2018 menurut Jenis Belanja

Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (ribu rupiah)
Pegawai	2.679.858.895
Barang	31.390.195.991

Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (ribu rupiah)
Modal	80.261.765.716
Bantuan Sosial	100.000
Total	114.331.920.602

Sumber: Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri

Bila dilihat dari unit organisasi alokasi APBN yang terbesar dialokasikan untuk Ditjen Bina Marga sebesar 40,04%. Kemudian persentase alokasi APBN kesepuluh unit organisasi lainnya secara berurutan yaitu Ditjen SDA sebesar 32,91%; Ditjen Cipta Karya sebesar 15,97%; Ditjen Penyediaan Perumahan sebesar 8,74%; Balitbang sebesar 0,54%; Sekretariat Jenderal sebesar 0,52%; BPSDM sebesar 0,43%; Ditjen Bina Konstruksi sebesar 0,30%; BPIW sebesar 0,24%; Ditjen Pembiayaan Perumahan 0,23%; dan Inspektorat Jenderal 0,09%. Pada Tabel 2.15 menampilkan besaran nilai anggaran menurut unit organisasi.



Gambar 2.6 Persentase Alokasi APBN Kementerian PUPR Berdasarkan Unit Organisasi Tahun 2018



Tabel 2.15 Alokasi APBN Kementerian PUPR Berdasarkan Unit Organisasi Tahun 2017

Unit Organisasi	Pagu Anggaran (Ribu Rupiah)			
	RPM	PLN	RMP	PNBP
Sekretariat Jenderal	599.804.941	-	-	195.062
Ditjen SDA	29.700.655.658	2.361.044.365	200.000.000	174.970
Ditjen Bina Marga	31.493.429.291	5.231.985.768	673.437.672	4.014.440
Ditjen Cipta Karya	14.005.553.285	4.107.934.548	95.000.000	2.471.880
Ditjen Penyediaan Perumahan	9.383.756.042	606.000.000	-	-
Ditjen Bina Konstruksi	338.613.646	-	-	102.750
Ditjen Pembiayaan Perumahan	173.919.033	10.000.000	-	-
Inspektorat Jenderal	104.974.960	-	-	-
BPIW	247.359.063	7.839.000	-	-
BALITBANG	582.704.939	13.848.200	-	17.956.000
BPSDM	493.170.893	-	-	1.893.480
Total	87.123.941.751	12.338.651.881	968.437.672	26.808.582

Sumber: Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri

Tabel 2.16 Alokasi APBN Kementerian PUPR Berdasarkan Unit Organisasi Tahun 2017
(lanjutan)

Unit Organisasi	Pagu Anggaran (ribu rupiah)			
	BLU	HLN	SBSN	TOTAL
Sekretariat Jenderal	-	-	-	600.000.003
Ditjen SDA	-	-	5.364.453.096	37.626.328.089
Ditjen Bina Marga	20.000.000	-	8.351.259.481	45.774.126.652
Ditjen Cipta Karya	-	44.970.709	-	18.255.930.422
Ditjen Penyediaan Perumahan	-	-	-	9.989.756.042
Ditjen Bina Konstruksi	-	-	-	338.716.396
Ditjen Pembiayaan Perumahan	77.719.430	-	-	261.638.463
Inspektorat Jenderal	-	-	-	104.974.960
BPIW	-	15.678.000	-	270.876.063
BALITBANG	-	-	-	614.509.139
BPSDM	-	-	-	495.064.373
Total	97.719.430	60.648.709	13.715.712.577	114.331.920.602

Sumber: Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri

**BAB
3**

STATISTIK INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

Wilayah Sungai di **INDONESIA**

**DAERAH
ALIRAN SUNGAI**

Strategis Nasional	3.252
Lintas Negara	306
Lintas Provinsi	896
Lintas Kabupaten/Kota	3.244
Dalam Kabupaten/Kota	279

65 BENDUNGAN
Periode 2014 - 2019

PULAU

SUMATERA , 775,20 juta m ³
JAWA , 2.188,21 juta m ³
KALIMANTAN , 921,96 juta m ³
BALI , 24,22 juta m ³
NUSA TENGGARA BARAT , 149,29 juta m ³
NUSA TENGGARA TIMUR , 146,50 juta m ³
SULAWESI , 1.292,94 juta m ³
MALUKU , 57,00 juta m ³
PAPUA , 153,37 juta m ³

Total Volume
5.708,69 juta m³

A. Wilayah Sungai dan Daerah Aliran Sungai

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dijelaskan bahwa wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km². Sedangkan daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, wilayah sungai terdiri dari satu atau lebih Daerah Aliran Sungai (DAS) dan/atau pulau-pulau kecil, yang meliputi:

1. Wilayah sungai lintas negara;
2. Wilayah sungai lintas provinsi;
3. Wilayah sungai strategis nasional;
4. Wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan
5. Wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

Tabel 3.1 sampai dengan Tabel 3.5 menyajikan data wilayah sungai berdasarkan statusnya serta jumlah daerah aliran sungai yang terdapat pada wilayah sungai tersebut. Jumlah daerah aliran sungai tersebut merupakan hasil rekapitulasi Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04/PRT/M/2015.

Tabel 3.1 Wilayah Sungai Lintas Negara

Nama Wilayah Sungai	Lokasi	Jumlah Daerah Aliran Sungai
Benanain	NTT - Timor Leste	45
Noelmina	NTT - Timor Leste	186
Sesayap	Kalimantan Utara - Serawak (Malaysia)	19
Mamberamo - Tami - Apauvar	Papua - Papua Nugini	27
Einlanden - Digul - Bikuma	Papua - Papua Nugini	29

Sumber : Lampiran I.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.



Tabel 3.2 Wilayah Sungai Lintas Provinsi

Nama Wilayah Sungai	Provinsi	Jumlah Daerah Aliran Sungai
Alas - Singkil	Aceh - Sumatera Utara	8
Batang Natal - Batang Batahan	Sumatera Utara - Sumatera Barat	40
Rokan	Sumatera Utara - Riau - Sumatera Barat	15
Kampar	Riau - Sumatera Barat	7
Indragiri - Akuaman	Riau - Sumatera Barat	24
Batanghari	Jambi - Sumatera Barat	2
Teramang - Muar	Bengkulu - Jambi	15
Nasal - Padang Guci	Bengkulu - Sumatera Selatan - Lampung	19
Musi - Sugihan - Banyuasin - Lemau	Sumatera Selatan - Jambi - Bengkulu - Lampung	28
Mesuji - Tulang Bawang	Lampung - Sumatera Selatan	2
Cidanau - Ciujung - Cidurian *	Banten - Jawa Barat	34
Ciliwung - Cisadane *	DKI Jakarta - Banten - Jawa Barat	15
Cimanuk - Cisanggarung	Jawa Barat - Jawa Tengah	25
Citanduy	Jawa Barat - Jawa Tengah	24
Progo - Opak - Serang	DI Yogyakarta - Jawa Tengah	3
Bengawan Solo	Jawa Timur - Jawa Tengah	96
Jelai - Kendawangan	Kalimantan Tengah - Kalimantan Barat	11
Barito	Kalimantan Tengah - Kalimantan Selatan	4
Mahakam	Kalimantan Timur - Kalimantan Utara	12
Berau - Kelay	Kalimantan Timur - Kalimantan Utara	15
Dumoga - Sangkub	Sulawesi Utara - Gorontalo	55
Limboto - Bolango - Bone	Gorontalo - Sulawesi Utara	75
Randangan	Gorontalo - Sulawesi Tengah	14
Palu - Lariang	Sulawesi Tengah - Sulawesi Barat - Sulawesi Selatan	52
Parigi - Poso	Sulawesi Tengah - Sulawesi Selatan	50
Kalukku - Karama	Sulawesi Barat - Sulawesi Selatan - Sulawesi Tengah	74
Pompengan - Larona	Sulawesi Selatan - Sulawesi Tenggara	27
Saddang	Sulawesi Selatan - Sulawesi Barat	24
Towari - Lasusua	Sulawesi Tenggara - Sulawesi Selatan	28
Lasolo - Konaweha	Sulawesi Tenggara - Sulawesi Tengah	25
Omba	Papua Barat - Papua	73

Sumber : Lampiran I.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.

Catatan: * Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai tersebut dengan tetap menjamin kebutuhan air baku Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tabel 3.3 Wilayah Sungai Strategis Nasional

Nama Wilayah Sungai	Provinsi	Jumlah Daerah Aliran Sungai
Aceh - Meureudu	Aceh	30
Woyla - Bateue	Aceh	13
Jambo Aye	Aceh	13
Belawan - Ular - Padang	Sumatera Utara	11
Toba - Asahan	Sumatera Utara	1
Siak	Riau	2
Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	117
Bangka	Kepulauan Bangka Belitung	63
Seputih - Sekampung	Lampung	42
Citarum *	Jawa Barat	19
Serayu - Bogowonto	Jawa Tengah	15
Jratunseluna	Jawa Tengah	69
Brantas	Jawa Timur	220
Lombok	Nusa Tenggara Barat	197
Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	555
Flores	Nusa Tenggara Timur	472
Kapuas	Kalimantan Barat	9
Mentaya - Katingan	Kalimantan Tengah	2
Tondano - Sangihe - Talaud - Miangas	Sulawesi Utara	89
Paguyaman	Gorontalo	20
Walanae - Cenranae	Sulawesi Selatan	39
Jeneberang	Sulawesi Selatan	58
Halmahera Utara	Maluku Utara	130
Halmahera Selatan	Maluku Utara	265
Ambon - Seram	Maluku	166
Kepulauan Yamdena - Wetar	Maluku	153
Bali - Penida	Bali	391
Kamundan - Sebyar	Papua Barat	91

Sumber : Lampiran I.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.



Tabel 3.4 Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota

Nama Wilayah Sungai	Provinsi	Jumlah Daerah Aliran Sungai
Madura - Bawean	Jawa Timur	173
Teunom - Lambeuso	Aceh	14
Pase - Peusangan	Aceh	10
Tamiang - Langsa	Aceh	17
Baru - Kluet	Aceh	21
Wampu - Besitang	Sumatera Utara	13
Bah Bolon	Sumatera Utara	5
Nias	Sumatera Utara	43
Sibundong - Batang Toru	Sumatera Utara	16
Barumon - Kualuh	Sumatera Utara	2
Batang Angkola - Batang Gadis	Sumatera Utara	5
Masang - Pasaman	Sumatera Barat	8
Silaut - Tarusan	Sumatera Barat	17
Reteh	Riau	3
Bengkalis - Meranti	Riau	37
Pengabuan - Lagan	Jambi	5
Sebelat - Ketahun - Lais	Bengkulu	19
Bengkulu - Alas - Talo	Bengkulu	9
Belitung	Kepulauan Bangka Belitung	91
Semangka	Lampung	116
Cibaliung - Cisawarna	Banten	75
Ciliman - Cibungur	Banten	27
Cisadea - Cibareno	Jawa Barat	74
Ciwulan - Cilaki	Jawa Barat	72
Pemali - Comal	Jawa Tengah	32
Bodri - Kuto	Jawa Tengah	12
Welang - Rejoso	Jawa Timur	36
Bondoyudo - Bedadung	Jawa Timur	47
Pekalen - Sampean	Jawa Timur	56
Baru - Bajulmati	Jawa Timur	60
Sumba	Nusa Tenggara Timur	130
Flotim Kepulauan - Lembata - Alor	Nusa Tenggara Timur	439
Sambas	Kalimantan Barat	4
Mempawah	Kalimantan Barat	5
Pawan	Kalimantan Barat	6
Seruyan	Kalimantan Tengah	3
Kahayan	Kalimantan Tengah	2
Cengal - Batulicin	Kalimantan Selatan	62

Nama Wilayah Sungai	Provinsi	Jumlah Daerah Aliran Sungai
Karangan	Kalimantan Timur	43
Kayan	Kalimantan Utara	9
Poigar - Ranoyapo	Sulawesi Utara	24
Lambunu - Buol	Sulawesi Tengah	99
Bongka - Mentawa	Sulawesi Tengah	109
Kepulauan Banggai	Sulawesi Tengah	185
Laa - Tambalako	Sulawesi Tengah	89
Poleang - Roraya	Sulawesi Tenggara	174
Muna	Sulawesi Tenggara	106
Buton	Sulawesi Tenggara	95
Kepulauan Sula - Obi	Maluku Utara	184
Buru	Maluku	53
Kepulauan Kei - Aru	Maluku	211
Wapoga - Mimika	Papua	97

Sumber : Lampiran I.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.

Tabel 3.5 Wilayah Sungai dalam Satu Kabupaten/Kota

Nama Wilayah Sungai	Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Aliran Sungai
Simeulue	Aceh	Simeuleu	26
Siberut - Pagai - Sipora	Sumatera Barat	Mentawai	86
Kubu	Riau	Rokan Hilir	8
Bukit Batu	Riau	Bengkalis	2
Rawa	Riau	Siak	6
Guntung - Kateman	Riau	Indragiri Hilir	4
Enggano	Bengkulu	Bengkulu Utara	10
Kepulauan Seribu	DKI Jakarta	Kepulauan Seribu	40
Kepulauan Karimunjawa	Jawa Tengah	Jepara	20
Wiso - Gelis	Jawa Tengah	Jepara	27
Pulau Laut	Kalimantan Selatan	Kota Baru	41
Kendilo	Kalimantan Timur	Paser	9

Sumber : Lampiran I.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.



B. Bendungan/Waduk

Pengertian bendungan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2010 tentang Bendungan, yaitu bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (*tailing*), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. Sedangkan waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan. Tujuan pembangunan bendungan antara lain adalah untuk meningkatkan manfaat serta fungsi sumber daya air, pengendalian daya rusak air, fungsi pengamanan tampungan limbah tambang (*tailing*) atau tampungan lumpur.

Tak hanya itu bendungan juga dapat dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga air, dan tempat berwisata. Manfaat pembangunan bendungan ada dua yaitu *single purpose dam* dan *multi purpose dam*. *Single purpose dam* merupakan bendungan yang dibangun dengan tujuan khusus, misal hanya sebagai penyedia air irigasi atau pengendali banjir. *Multi purpose dam* dibangun dengan manfaat beragam seperti penyedia air irigasi, air baku atau air minum, sebagai pembangkit listrik, dan tempat wisata disaat yang bersamaan. Hal penting dalam pemeliharaan bendungan adalah ketersediaan air, bendungan dibangun untuk membendung air sungai sebagai cadangan air. Penanggung jawab pembangunan serta pemeliharaan bendungan adalah pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, atau badan usaha.

Program pembangunan bendungan Tahun 2014-2019 di rencanakan sebanyak 65 buah bendungan tersebar di seluruh Indonesia, dengan total volume 5.708,69 juta m³ dengan manfaat irigasi 483.614 ha.

Tabel 3.6 Program Pembangunan Bendungan 2014-2019

No.	Pulau	Volume (juta m ³)	Irigasi (ha)	Manfaat			Jumlah (buah)
				Reduksi Banjir (m ³ /det)	Air Baku (m ³ /det)	Listrik (MW)	
1	Sumatera	775,20	130.582	1.889	10	58	10
2	Jawa	2.188,21	198.438	5.008	30	152	24
3	Kalimantan	921,96	28.679	1.120	14	21	5
4	Bali	24,22	2.375	-	3	3	3
5	Nusa Tenggara Barat	149,29	13.646	1.044	1	10	5

No.	Pulau	Volume (juta m ³)	Irigasi (ha)	Manfaat			Jumlah (buah)
				Reduksi Banjir (m ³ /det)	Air Baku (m ³ /det)	Listrik (MW)	
6	Nusa Tenggara Timur	146,50	14.377	1.859	1	4	7
7	Sulawesi	1.292,94	80.017	1.596	11	47	9
8	Maluku	57,00	10.000	471	1	6	1
9	Papua	153,37	5.500	-	-	65	1
Total		5.708,69	483.614	12.986,48	70,48	365,01	65

Sumber : Pusat Bendungan, Ditjen Sumber Daya Air (Status November 2018)

Tabel 3.7 Daftar 65 Bendungan Rencana di Indonesia

No	Nama Bendungan	Lokasi	Volume (juta m ³)	Irigasi (ha)	Manfaat		
					Reduksi Banjir (m ³ /det)	Air Baku (m ³ /det)	Listrik (MW)
Bendungan Selesai 2017							
1	Paya Seunara	Aceh	1,38	-	-	0,13	-
2	Bajul Mati	Jawa Timur	10,00	1.800	-	0,11	0,34
3	Nipah	Jawa Timur	3,00	1.150	-	0,11	-
4	Rajui	Aceh	2,67	1.000	-	0,20	-
5	Titab	Bali	13,00	1.794	-	0,35	1,50
6	Jatigede	Jawa Barat	980,57	87.804	1.400	3,50	110,00
7	Teritip	Kalimantan Timur	10,50	-	-	0,25	-
8	Raknamo	Nusa Tenggara Timur	14,09	1.250	310	0,10	0,20
9	Tanju	Nusa Tenggara Barat	18,27	2.250	218,89	0,05	-
Total Bendungan 2017			1.053,48	97.048	1.928,89	4,80	112,04
Bendungan On Going							
1	Marangkayu	Kalimantan Timur	12,37	1.507	0,73	0,45	1,35
2	Tugu	Jawa Timur	9,30	1.200	42,47	0,01	0,40
3	Kuningan	Jawa Barat	28,70	3.000	-	0,30	0,50
4	Bendo	Jawa Timur	43,11	7.800	490,00	0,37	-
5	Gongseng	Jawa Timur	22,43	6.191	133,27	0,30	0,70
6	Tukul	Jawa Timur	8,68	600	-	0,30	0,26
7	Karalloe	Sulawesi Selatan	40,50	10.000	-	0,40	5,00
8	Gondang	Jawa Tengah	9,15	4.680	639,22	0,20	0,33
9	Logung	Jawa Tengah	20,15	5.354	105,00	0,20	0,50
10	Pidekso	Jawa Tengah	25,00	1.500	-	0,30	-



No	Nama Bendungan	Lokasi	Volume (juta m ³)	Irigasi (ha)	Manfaat		
					Reduksi Banjir (m ³ /det)	Air Baku (m ³ /det)	Listrik (MW)
11	Mila	Nusa Tenggara Barat	6,57	1.689	177,74	0,10	-
12	Rotiklot	Nusa Tenggara Timur	3,30	139	500,00	0,04	0,15
13	Sei Gong	Kepulauan Riau	11,80	-	-	0,40	-
14	Sindangheula	Banten	9,26	1.289	50,00	0,80	-
15	Keu Reuto	Aceh	215,94	9.420	896,00	0,05	6,34
16	Karian	Banten	314,70	21.350	-	12,80	1,80
17	Lolak	Sulawesi Utara	16,10	2.214	-	0,50	3,30
18	Bintang Bano	Nusa Tenggara Barat	65,84	6.695	647,00	0,55	8,80
19	Passeloreng	Sulawesi Selatan	138,00	8.509	-	0,31	2,50
20	Tapin	Kalimantan Selatan	70,52	5.472	107,00	0,50	3,30
21	Ciawi	Jawa Barat	6,45	-	116,00	-	-
22	Sukamahi	Jawa Barat	1,68	-	13,53	-	-
23	Way Sekampung	Lampung	68,06	72.713	185,00	2,48	5,40
24	Kuwil Kawangkoan	Sulawesi Utara	23,37	-	470,00	4,50	1,40
25	Cipanas	Jawa Barat	280,81	9.243	475,00	0,85	3,00
26	Ladongi	Sulawesi Tenggara	45,95	3.604	1,27	0,12	1,30
27	Napun Gete	Nusa Tenggara Timur	14,34	300	219,43	0,21	0,71
28	Leuwikeris	Jawa Barat	81,44	11.276	57,00	0,85	20,00
29	Pamukkulu	Sulawesi Selatan	97,30	6.256	2,50	0,13	0,20
30	Way Apu	Maluku	57,00	10.000	471,00	0,50	6,00
31	Temef	Nusa Tenggara Timur	45,78	6.000	230,00	0,01	2,60
32	Margatiga	Lampung	147,25	10.950	-	0,80	-
33	Semantok	Jawa Timur	32,67	1.900	237,18	0,31	-
34	Lausimeme	Sumatera Utara	28,00	-	68,17	3,00	2,80
Total Bendungan On Going			1.971,52	230.851	6.334,51	32,65	78,64
Konstruksi 2018							
1	Sidan	Bali	3,82	-	-	1,75	0,65
2	Komerling II/Tigadihadji	Sumatera Selatan	130	18.219	-	1	40
3	Bener	Jawa Tengah	90,39	15.519	210	1,5	6
4	Randugunting	Jawa Tengah	14,42	630	-	0,15	-

No	Nama Bendungan	Lokasi	Volume (juta m ³)	Irigasi (ha)	Manfaat		
					Reduksi Banjir (m ³ /det)	Air Baku (m ³ /det)	Listrik (MW)
5	Jlantah	Jawa Tengah	11,96	1.493	-	0,15	0,25
6	Sadawarna	Jawa Barat	67,94	4.500	1.039	4,5	-
7	Beringin Sila	Nusa Tenggara Barat	46,45	3.500	-	0,076	1,44
8	Manikin	Nusa Tenggara Timur	28,2	310	600	0,7	0,1
9	Bulango Ulu	Gorontalo	117	4.194	-	1,16	2,7
10	Bagong	Jawa Timur	17,4	854	-	0,465	0,5
11	Meninting	Nusa Tenggara Barat	12,16	1.519	-	0,15	0,8
12	Rukoh	Aceh	128,66	11.950	390	0,85	1,2
13	Tamblang	Bali	7,4	581	-	0,41	0,38
Total Bendungan 2018			675,80	63.269	2.239,00	12,86	54,05
Konstruksi 2019							
1	Mbay	Nusat Tenggara Timur	34,14	6.378	-	0,234	0,2
2	Jenelata	Sulawesi Selatan	224,72	23.240	475	3,12	10,9
3	Pelosika	Sulawesi Tenggara	590,00	22.000	647	0,808	20
4	Kolhua	Nusa Tenggara Timur	6,65	-	-	0,15	0,04
5	Lambakan	Kalimantan Timur	718,00	20.000	215	12	15
6	Jragung	Jawa Tengah	129,00	6.435	-	2	6
7	Riam Kiwa	Kalimantan Selatan	110,57	1.700	797	1	0,9
8	Tiro	Aceh	41,44	6.330	350	0,85	2
9	Digoel	Papua	153,37	5.500	-	0,01	65
Total Bendungan 2019			2.007,89	85.205	2.484	19,94	119,84
Total Keseluruhan 65 Bendungan			5.708,69	476.373	12.986	70,24	364,56

Sumber : Pusat Bendungan, Ditjen Sumber Daya Air (Status November 2018)

Tabel 3.8 Daftar Bendungan Eksisting di Indonesia

No	Bendungan Eksisting	Wilayah Sungai	DAS	Provinsi	Kab Kota
1	Sianjo - anjo	Alas-Singkil	Singkil	Aceh	Aceh Singkil
2	Keuliling		Aceh	Aceh	Aceh Besar
3	Rajui	Aceh-Meureudu	Batee	Aceh	Pidie
4	Leubok	Aceh-Meureudu	Aceh	Aceh	Aceh Besar



No	Bendungan Eksisting	Wilayah Sungai	DAS	Provinsi	Kab Kota
5	Paya Seunara	Aceh-Meureudu	Sabang	Aceh	Sabang
6	Sipansihaporas	Sibundong-Batang Toru	Woyla	Sumatera Utara	Tapanuli Tengah
7	Siruar	Toba-Asahan	Asahan	Sumatera Utara	Toba Samosir
8	Martabe	Sibundong-Batang Toru	Batang Toru	Sumatera Utara	Tapanuli Selatan
9	Sigura-gura	Toba-Asahan	Asahan	Sumatera Utara	Toba Samosir
10	Tangga	Toba-Asahan	Asahan	Sumatera Utara	Toba Samosir
11	Kotapanjang	Kampar	Kampar	Riau	Kampar
12	Musi	Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau	Musi	Bengkulu	Kepahiang
13	Batu Tegi	Seputih-Sekampung	Sekampung	Lampung	Talang Padang
14	Way Jepara	Seputih-Sekampung	Jepara	Lampung	Metro
15	Way Rarem	Mesuji-Tulangbawang	Tulang Bawang	Lampung	Kotabumi
16	Way Linggo	Semangka	Semangka	Lampung	Lampung Barat
17	Duriangkang	Kepulauan Batam-Bintan	Balo	Kepulauan Riau	Batam
18	Muka Kuning	Kepulauan Batam-Bintan	Tiban Lama	Kepulauan Riau	Batam
19	Sei Harapan	Kepulauan Batam-Bintan	Ladi	Kepulauan Riau	Batam
20	Lagoi	Kepulauan Batam-Bintan	Bintan	Kepulauan Riau	Bintan
21	Ladi	Kepulauan Batam-Bintan	Tiban Lama	Kepulauan Riau	Batam
22	Darma	Cimanuk-Cisanggarung	Cisanggarung	Jawa Barat	Kuningan
23	Situ Sedong	Cimanuk-Cisanggarung	Cikalapu	Jawa Barat	Cirebon
24	Jatigede		Cimanuk	Jawa Barat	Sumedang
25	Situ Ciburuy	Citarum	Citarum	Jawa Barat	Bandung
26	Situ Patok	Cimanuk-Cisanggarung	Kenari	Jawa Barat	Cirebon
27	Situ Lembang	Citarum	Citarum	Jawa Barat	Bandung
28	Situ Ranca Beureum	Cimanuk-Cisanggarung	Cibuaya	Jawa Barat	Majalengka
29	Situ Bolang	Cimanuk-Cisanggarung	Cibuaya	Jawa Barat	Indramayu
30	Jatiluhur / Djuanda		Citarum	Jawa Barat	Purwakarta
31	Cipancuh	Citarum	CiboDAS	Jawa Barat	Indramayu
32	Situ Kamojing	Citarum	Cikarokrok	Jawa Barat	Karawang
33	Pongkor	Ciliwung-Cisadane	Cisadane	Jawa Barat	Bogor



No	Bendungan Eksisting	Wilayah Sungai	DAS	Provinsi	Kab Kota
34	Cileunca	Citarum	Citarum	Jawa Barat	Bogor
35	Cipanunjang	Citarum	Citarum	Jawa Barat	Bandung
36	Cirata	Citarum	Citarum	Jawa Barat	Purakarta
37	Saguling	Citarum	Citarum	Jawa Barat	Bandung Barat
38	Nawangan	Bengawan Solo	Bengawan Solo	Jawa Tengah	Wonogiri
39	Song Putri	Bengawan Solo	Bengawan Solo	Jawa Tengah	Wonogiri
40	Ngancar	Bengawan Solo	Bengawan Solo	Jawa Tengah	Wonogiri
41	Plumbon	Bengawan Solo	Bengawan Solo	Jawa Tengah	Wonogiri
42	Parang Joho	Bengawan Solo	Bengawan Solo	Jawa Tengah	Wonogiri
43	Kedung Uling	Bengawan Solo	Bengawan Solo	Jawa Tengah	Wonogiri
44	Wonogiri / Gajah Mungkur	Bengawan Solo	Bengawan Solo	Jawa Tengah	Wonogiri
45	Krisak	Bengawan Solo	Bengawan Solo	Jawa Tengah	Wonogiri
46	Mulur	Bengawan Solo	Bengawan Solo	Jawa Tengah	Sukoharjo
47	Lalung	Bengawan Solo	Bengawan Solo	Jawa Tengah	Karanganyar
48	WaLintang	Serayu-Bogowonto	Wawar	Jawa Tengah	Kebumen
49	Delingan	Bengawan Solo	Bengawan Solo	Jawa Tengah	Karanganyar
50	Sempor	Serayu-Bogowonto	Telomoyo	Jawa Tengah	Kebumen
51	Botok	Bengawan Solo	Bengawan Solo	Jawa Tengah	Sragen
52	Cengklik	Bengawan Solo	Bengawan Solo	Jawa Tengah	Boyolali
53	Gebyar	Bengawan Solo	Bengawan Solo	Jawa Tengah	Sragen/Solo
54	Kembangan	Bengawan Solo	Bengawan Solo	Jawa Tengah	Sragen
55	Ketro	Bengawan Solo	Bengawan Solo	Jawa Tengah	Sragen
56	Klego	Bengawan Solo	Bengawan Solo	Jawa Tengah	Boyolali
57	Penjalin	Pemali-Comal	Pemali	Jawa Tengah	Brebes
58	Kedung Ombo	Jratun Seluna	Serang	Jawa Tengah	Boyolali
59	Simo	Jratun Seluna	Serang	Jawa Tengah	Grobogan
60	Butak	Jratun Seluna	Serang	Jawa Tengah	Grobogan
61	Nglangon	Jratun Seluna	Serang	Jawa Tengah	Purwodadi
62	Sanggeh	Jratun Seluna	Serang	Jawa Tengah	Grobogan
63	Jati Barang	Jratun Seluna	K.Garang	Jawa Tengah	Semarang
64	Malahayu	Cimanuk-Cisanggarung	Kabuyutan	Jawa Tengah	Brebes



No	Bendungan Eksisting	Wilayah Sungai	DAS	Provinsi	Kab Kota
65	Cacaban	Pemali-Comal	Cacaban	Jawa Tengah	Tegal
66	Greneng	Jratun Seluna	Serang	Jawa Tengah	Blora
67	Tempuran	Jratun Seluna	Serang	Jawa Tengah	Blora
68	Panohan	Jratun Seluna	K.Grubugan	Jawa Tengah	Rembang
69	Lodan	Bengawan Solo	Kesambi	Jawa Tengah	Rembang
70	Grawan	Jratun Seluna	Babadan	Jawa Tengah	Rembang
71	Banyukuwung	Jratun Seluna	Babadan	Jawa Tengah	Rembang
72	Gembong	Jratun Seluna	K.Juwana	Jawa Tengah	Kudus
73	Gunung Rowo	Jratun Seluna	K.Juwana	Jawa Tengah	Pati
74	Garung	Serayu-Bogowonto	Serayu	Jawa Tengah	Wonosobo
75	Mrica	Serayu-Bogowonto	Serayu	Jawa Tengah	Banjarnegara
76	Sermo	Progo-Opak-Serang	Serang	DI Yogyakarta	Kulon Progo
77	Sengguruh		Brantas	Jawa Timur	Malang
78	Karang Kates / Sutami		Brantas	Jawa Timur	Malang
79	Lahor		Brantas	Jawa Timur	Malang
80	Wlingi		Brantas	Jawa Timur	Blitar
81	Ngepeh		Brantas	Jawa Timur	Trenggalek
82	Wonorejo		Brantas	Jawa Timur	Tulung Agung
83	Bajulmati	Baru-Bajulmati	Bajulmati	Jawa Timur	Situbondo
84	Selorejo		Brantas	Jawa Timur	Malang
85	Sampean Baru	Pekalen-Sampean	Sampean	Jawa Timur	Bondowoso
86	Tlogo Ngebel	Bengawan Solo	Bengawan Solo	Jawa Timur	Ponorogo
87	Gonggang	Bengawan Solo	Bengawan Solo	Jawa Timur	Magetan
88	Oro - Oro Ombo		Brantas	Jawa Timur	Nganjuk
89	Telaga Pasir / Sarangan	Bengawan Solo	Bengawan Solo	Jawa Timur	Magetan
90	Dawuhan	Bengawan Solo	Bengawan Solo	Jawa Timur	Madiun
91	Saradan	Bengawan Solo	Bengawan Solo	Jawa Timur	Madiun
92	Bening / Widas		Brantas	Jawa Timur	Nganjuk
93	Kedung Sengon		Brantas	Jawa Timur	Nganjuk
94	Sumber Kepuh	Brantas	Brantas	Jawa Timur	Nganjuk
95	Notopuro	Bengawan Solo	Bengawan Solo	Jawa Timur	Madiun
96	Wr. Jenggot / Grojokan	Brantas	Brantas	Jawa Timur	Jombang
97	Kedung Brubus	Bengawan Solo	Bengawan Solo	Jawa Timur	Madiun
98	Sangiran	Bengawan Solo	Bengawan Solo	Jawa Timur	Ngawi



No	Bendungan Eksisting	Wilayah Sungai	DAS	Provinsi	Kab Kota
99	Pondok	Bengawan Solo	Bengawan Solo	Jawa Timur	Ngawi
100	Kedung Bendo	Bengawan Solo	Bengawan Solo	Jawa Timur	Madiun
101	Pacal	Bengawan Solo	Bengawan Solo	Jawa Timur	Bojonegoro
102	Nglambangan	Bengawan Solo	Bengawan Solo	Jawa Timur	Bojonegoro
103	Prijetan	Bengawan Solo	Bengawan Solo	Jawa Timur	Bojonegoro
104	Gondang	Bengawan Solo	Corong	Jawa Timur	Lamongan
105	Canggih	Bengawan Solo	Corong	Jawa Timur	Lamongan
106	Klamps	Kepulauan Madura	Blega	Jawa Timur	Sampang
107	Manyar	Bengawan Solo	Bengawan Solo	Jawa Timur	Lamongan
108	Cungkup	Bengawan Solo	Bengawan Solo	Jawa Timur	Lamongan
109	Nipah	Kepulauan Madura	Nipah	Jawa Timur	Sampang
110	Gintung	Ciliwung-Cisadane	Angke	Banten	Tangerang Selatan
111	Krenceng	Cidanau-Ciujung-Cidurian	Cikebeletes	Banten	Cilegon
112	Telaga Tunjung	Bali-Penida	Yeh Ho	Bali	Tabanan
113	Benel	Bali-Penida	Aya Barat	Bali	Jembrana
114	Palasari	Bali-Penida	Sangianggede	Bali	Jembrana
115	Titab	Bali-Penida	Saba	Bali	Buleleng
116	Grokgak	Bali-Penida	Gerokgak	Bali	Buleleng
117	Pancor	Lombok	Tampah	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah
118	Batu Bokah	Lombok	Dodokan	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah
119	Labangka	Sumbawa	Labangka	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
120	Sepit	Lombok	Dodokan	Nusa Tenggara Barat	Mataram
121	Jangkih Jawe	Lombok	Dodokan	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah
122	Batu Nampar	Lombok	Pare Ganti	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur
123	Selante	Sumbawa	Nangagali	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
124	Kengkang	Lombok	Kelep	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat



No	Bendungan Eksisting	Wilayah Sungai	DAS	Provinsi	Kab Kota
125	Pare	Lombok	Supak	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah
126	Gapit	Sumbawa	Boal	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
127	Lamenta	Sumbawa	Boal	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
128	Telaga Lebur	Lombok	Kelep	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat
129	Tibu Kuning	Lombok	Siung	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat
130	Sepayung Dalam	Sumbawa	Nangagali	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
131	Sejari I	Sumbawa	Kembang Sari	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
132	Tolotangga	Sumbawa	Nontodue	Nusa Tenggara Barat	Bima
133	Jompong	Sumbawa	Jompong	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
134	Pengga	Lombok	Dodokan	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah
135	Muer	Sumbawa	Bera	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
136	Lingkuk Lamun	Lombok	Rere Penembem	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur
137	Mapasan	Lombok	Dodokan	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah
138	Batujai	Lombok	Dodokan	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah
139	Kaswangi	Sumbawa	Barore	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
140	Soncolopi	Sumbawa	Sawe	Nusa Tenggara Barat	Dompu
141	Kali Ujung	Lombok	Rere Penembem	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur



No	Bendungan Eksisting	Wilayah Sungai	DAS	Provinsi	Kab Kota
142	Bringe	Lombok	Rere Penembem	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah
143	Brangkolong	Sumbawa	Bera	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
144	Pelaperado	Sumbawa	Palaparado	Nusa Tenggara Barat	Bima
145	Parado Kanca	Sumbawa	Palaparado	Nusa Tenggara Barat	Bima
146	Waerita	Flores	Kalimati	Nusa Tenggara Timur	Sikka
147	Surabaya	Lombok	Dodokan	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah
148	Laju	Sumbawa	Lido	Nusa Tenggara Barat	Bima
149	Mamak	Sumbawa	Moyo	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
150	Tiu Kulit	Sumbawa	Bera	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
151	Peneda Gandor	Lombok	Aikampat	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur
152	Pandanduri	Lombok	Palung	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur
153	Waworoda	Sumbawa	Waworoda	Nusa Tenggara Barat	Bima
154	Pemasar	Sumbawa	Bera	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
155	Jelantik	Lombok	Dodokan	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah
156	Jambu	Sumbawa	Depa	Nusa Tenggara Barat	Dompu
157	Mengkoang	Sumbawa	Nangabangka	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
158	Ncera	Sumbawa	Lapasariuru	Nusa Tenggara Barat	Bima



No	Bendungan Eksisting	Wilayah Sungai	DAS	Provinsi	Kab Kota
159	Sumi	Sumbawa	Cabang	Nusa Tenggara Barat	Bima
160	Lanangga	Sumbawa	Labalaju	Nusa Tenggara Barat	Dompu
161	Batu Bulan	Sumbawa	Moyo	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
162	Mantar	Sumbawa	Mantar	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
163	Serading	Sumbawa	Kebantubeh	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
164	Woro	Sumbawa	Campa	Nusa Tenggara Barat	Bima
165	Tonda Selatan	Sumbawa	Tarei	Nusa Tenggara Barat	Dompu
166	Roi Roka	Sumbawa	Lapasariuru	Nusa Tenggara Barat	Bima
167	Pernek	Sumbawa	Moyo	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
168	Senang	Lombok	Tanggek	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur
169	Gunung Paok	Lombok	Renggung Perempung	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur
170	Olat Rawa	Sumbawa	Olatrawa Atas	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
171	Kesi	Sumbawa	Bonto	Nusa Tenggara Barat	Dompu
172	Kowo	Sumbawa	Angi	Nusa Tenggara Barat	Bima
173	Kempo	Sumbawa	Lanco	Nusa Tenggara Barat	Dompu
174	Penyaring	Sumbawa	Moyo	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
175	Sanggupasante	Sumbawa	Kambu	Nusa Tenggara Barat	Dompu

No	Bendungan Eksisting	Wilayah Sungai	DAS	Provinsi	Kab Kota
176	Saneo	Sumbawa	Tarei	Nusa Tenggara Barat	Dompu
177	Oi Toi	Sumbawa	Kanahi	Nusa Tenggara Barat	Bima
178	Wera I	Sumbawa	Nangawera	Nusa Tenggara Barat	Bima
179	Lasi II	Sumbawa	Wai	Nusa Tenggara Barat	Dompu
180	Kapalengga	Noel Mina	Le Gonggo	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao
181	Manubulu	Noel Mina	Le Kayubeluba	Nusa Tenggara Timur	Kupang
182	Matasio	Noel Mina	Serubeba	Nusa Tenggara Timur	Kupang
183	Lere	Noel Mina	Raekore	Nusa Tenggara Timur	Kupang
184	Benkoko	Noel Mina	Kuanheun	Nusa Tenggara Timur	Kupang
185	Oel Tua	Noel Mina	Baumata	Nusa Tenggara Timur	Kupang
186	Tilong	Noel Mina	Noel Baki	Nusa Tenggara Timur	Kupang
187	Karinga	Sumba	Kabaru	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur
188	Lokojange	Sumba	Labariri	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat
189	Rakawatu	Sumba	TiDAS	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur
190	Haekrit	Benanain	Umaklaran	Nusa Tenggara Timur	Belu
191	Haliwen	Benanain	Umaklaran	Nusa Tenggara Timur	Belu
192	Padang Panjang	Flotim Kepulauan-Lembata-Alor	Irawuri	Nusa Tenggara Timur	Belu



No	Bendungan Eksisting	Wilayah Sungai	DAS	Provinsi	Kab Kota
193	Danau Tua		Meoain	Nusa Tenggara Timur	Kupang
194	Riam Kanan	Barito	Barito	Kalimantan Selatan	Banjar
195	Manggar	Mahakam	Manggar	Kalimantan Timur	Balikpapan
196	Samboja	Mahakam	Samboja	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara
197	Benanga	Mahakam	Mahakam	Kalimantan Timur	Samarinda
198	Teritip		Mahakam	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur
199	Merancang	Berau-Kelai	Berau	Kalimantan Timur	Berau
200	Beriwit	Berau-Kelai	Berau	Kalimantan Timur	Berau
201	Namuk	Mahakam	Mahakam	Kalimantan Timur	Kutai Barat
202	Binalatung	Sesayap	Tarakan	Kalimantan Utara	Tarakan
203	Bili Bili	Jeneberang	Jeneberang	Sulawesi Selatan	Gowa
204	Salomeko	Jeneberang	Luppereng	Sulawesi Selatan	Watampone
205	Ponre - Ponre	Walanae-Cenranae	Bila Walanae	Sulawesi Selatan	Bone
206	Kalola	Walanae-Cenranae	Bila Walanae	Sulawesi Selatan	Wajo
207	Bakaru	Saddang	Sadang	Sulawesi Selatan	Pinrang
208	Balambano	Pompengan-Larona	Larona	Sulawesi Selatan	Luwu Timur
209	Karebbe	Pompengan-Larona	Larona	Sulawesi Selatan	Luwu Timur
210	Larona (Batubesi)	Pompengan-Larona	Larona	Sulawesi Selatan	Luwu Timur
211	Abusur	Kepulauan Yamdena-Wetar	Ilputih	Maluku	Wohreli
212	Gosowong	Kepulauan Yamdena-Wetar	Ilputih	Maluku Utara	Halmahera Utara
213	Lereh II			Papua	Jayapura
214	Kalibumi			Papua	Nabire
215	Tami			Papua	Kota Jayapura

Sumber : Subdit Data dan Informasi Ditjen Sumber Daya Air, Status Juli 2018

Tabel 3.9 Daftar Bendungan Eksisting di Indonesia (lanjutan)

No	Bendungan Eksisting	Irigasi (ha)	Manfaat Irigasi		Volume (m ³)	Tipe
			DMI	PLTA		
1	Sianjo - anjo	850	70.000	-	1.523.000	Urugan Tanah Homogen
2	Keuliling	4.791	-	-	18.360.000	Urugan Tanah Dengan Inti
3	Rajui	1.000	50.000	-	2.050.000	Urugan Zonal Dengan Inti
4	Leubok	515	-	-	807.000	Urugan Zonal
5	Paya Seunara	515	-	-	807.000	Urugan Homogen Dilapisi
6	Sipansihapora s	-	-	-	-	BG
7	Siruar	-	-	-	-	BG
8	Martabe	-	-	-	-	UB
9	Sigura-gura	-	-	-	-	BG
10	Tangga	-	-	-	-	BL
11	Kotapanjang	-	-	-	-	BG
12	Musi	-	-	-	-	BG
13	Batu Tegi	67	0,23	-	860.000.000	Urugan Batu Dengan Inti
14	Way Jepara	7	-	-	34.850.000	Urugan Tanah Homogen
15	Way Rarem	22	-	-	72.400.000	Urugan Batu Dengan Inti
16	Way Linggo	-	-	-	-	UT
17	Duriangkang	-	-	-	-	UT
18	Muka Kuning	-	-	-	-	UT
19	Sei Harapan	-	-	-	-	UT
20	Lagoi	-	-	-	-	UT
21	Ladi	-	-	-	-	BG
22	Darma	22.060	-	-	37.900.000	Urugan Tanah Dengan Inti
23	Situ Sedong	629	-	-	2.100.000	Urugan Tanah Dengan Inti
24	Jatigede	90.000	3.500	110,00	979.000.000	Urugan Batu
25	Situ Ciburuy	137	-	-	2.580.000	Urugan Tanah Dengan Inti
26	Situ Patok	3.000	-	-	14.000.000	Urugan Tanah Homogen
27	Situ Lembang	-	-	-	337.000	Urugan Tanah Dengan Inti
28	Situ Ranca Beureum	188	-	-	-	Urugan Tanah Homogen
29	Situ Bolang	365	-	-	1.237.705	Urugan Tanah Dengan Inti



No	Bendungan Eksisting	Irigasi (ha)	Manfaat Irigasi		Volume (m ³)	Tipe
			DMI	PLTA		
30	Jatiluhur / Djuanda	227.062	-	15.000.000,00	1.000.000.000	Urugan Tanah Dengan Inti
31	Cipancuh	6.400	-	-	6.000.000	Urugan Tanah Homogen
32	Situ Kamojing	655	-	-	2.358.000	Komposit beton
33	Pongkor	-	-	-	-	UT
34	Cileunca	-	-	-	-	UT
35	Cipanunjang	-	-	-	-	UT
36	Cirata	-	-	-	-	UMB
37	Saguling	-	-	-	-	UB
38	Nawangan	354	-	-	800.000	Urugan Tanah Homogen
39	Song Putri	506	0,03	-	725.000	Urugan Batu Dengan Inti
40	Ngancar	1.300	-	-	2.050.000	Urugan Tanah Homogen
41	Plumbon	392	-	-	1.050.000	Urugan Tanah Homogen
42	Parang Joho	650	-	-	1.760.000	Urugan Tanah Homogen
43	Kedung Uling	402	-	-	470.000	Urugan Tanah Homogen
44	Wonogiri / Gajah Mungkur	23.600	-	1.240.000	433.000.000	Urugan Batu Dengan Inti
45	Krisak	274	-	-	3.717.000	Urugan Tanah Homogen
46	Mulur	43	-	-	420.000	Urugan Tanah Homogen
47	Lalung	2.000	-	-	-	Urugan Tanah Homogen
48	WaLintang	31.101	-	1.600.000,00	440.000.000	Beton komposit
49	Delingan	2.000	-	-	-	Urugan Tanah Homogen
50	Sempor	6.478	-	110.000,00	39.960.000	Urugan Batu Dengan Inti
51	Botok	2.488	-	-	13.440.000	Urugan Tanah Homogen
52	Cengklik	1.578	-	-	9.773.000	Urugan Tanah Homogen
53	Gebyar	1.421	-	-	-	Urugan Tanah Homogen
54	Kembangan	358	-	-	-	Urugan Tanah Homogen
55	Ketro	400	-	-	2.800.000	Urugan Tanah Homogen

No	Bendungan Eksisting	Irigasi (ha)	Manfaat Irigasi		Volume (m ³)	Tipe
			DMI	PLTA		
56	Klego	1.353	-	-	2.740.000	Urugan Tanah Homogen
57	Penjalin	29.000	-	-	9.500.000	Urugan Tanah Homogen
58	Kedung Ombo	61.444	1.500	2.390.000,00	723.000.000	Urugan Batu Dengan Inti
59	Simo	482	-	-	429.000	Urugan Tanah Homogen
60	Butak	366	-	-	1.600.000	Urugan Tanah Homogen
61	Nglangon	750	-	-	2.180.000	Urugan Tanah Homogen
62	Sanggeh	50	-	-	385.000	Urugan Tanah Homogen
63	Jati Barang	2	0,01	156.000,00	20.400.000	Urugan Tanah Dengan Inti
64	Malahayu	12.000	-	-	39.880.000	Urugan Tanah Random
65	Cacaban	17.481	-	-	9.000.000	Urugan Tanah Homogen
66	Greneng	251	-	-	1.825.000	Urugan Tanah Homogen
67	Tempuran	820	-	-	1.680.000	Urugan Tanah Homogen
68	Panohan	329	0,10	-	921.000	Urugan Batu Dengan Inti
69	Lodan	382	0,02	-	-	Urugan Tanah Homogen
70	Grawan	160	0,01	-	474.150	Urugan Tanah Homogen
71	Banyukuwung	775	0,20	-	2.420.000	Urugan Tanah Homogen
72	Gembong	3.855	-	-	9.500.000	Urugan Tanah Homogen
73	Gunung Rowo	6.052	-	-	5.160.000	Urugan Tanah Homogen
74	Garung	-	-	-	-	BG
75	Mrica	-	-	-	-	UB
76	Sermo	7.152	-	-	25.000.000	Urugan Batu Dengan Inti
77	Sengguruh	895	-	-	23.000.000	Beton Komposit
78	Karang Kates / Sutami	34.000	-	-	157.170.000	Urugan Tanah Homogen
79	Lahor	1.100	-	-	29.020.000	Urugan Tanah
80	Wlingi	13.600	-	-	24.000.000	Beton Komposit
81	Ngepoh	438	-	-	57.100	Pasangan Batu



No	Bendungan Eksisting	Irigasi (ha)	Manfaat Irigasi		Volume (m ³)	Tipe
			DMI	PLTA		
82	Wonorejo	7.540	8.020	-	107.240.000	Urugan Batu Dengan Inti
83	Bajulmati	1.800	0,11	-	-	
84	Selorejo	5.700	-	49,00	36.570.000	Urugan Tanah Homogen
85	Sampean Baru	9.800	-	-	1.500.000	Urugan Batu Dengan Inti
86	Tlogo Ngebel	7	-	2.700.000,00	3.950.000	Urugan Tanah Dengan Inti
87	Gonggang	2.500	0,05	-	-	Urugan Zonal Dengan Inti
88	Oro - Oro Ombo	7	0,50	-	120.010	Urugan Tanah Homogen
89	Telaga Pasir / Sarangan	7.700	-	-	3.050.000	Pasangan Batu Kali
90	Dawuhan	1.273	-	-	3.000.000	Urugan Tanah Homogen
91	Saradan	990	-	-	2.340.000	Urugan Tanah Homogen
92	Bening / Widas	9.120	-	-	27.850.000	Urugan Tanah Homogen
93	Kedung Sengon	439	-	-	-	Pasangan Batu
94	Sumber Kepuh	895	-	-	-	Urugan Tanah Homogen
95	Notopuro	2.433	-	-	2.080.000	Urugan Tanah Homogen
96	Wr. Jenggot / Grojokan	871	-	-	250.000	Urugan Tanah Homogen
97	Kedung Brubus	900	-	-	2.025.000	Urugan Zonal Dengan Inti
98	Sangiran	1.545	-	-	10.600.000	Urugan Batu Dengan Inti
99	Pondok	3.450	-	-	22.400.000	Urugan Batu Dengan Inti
100	Kedung Bendo	1.341	-	-	1.700.000	Urugan Tanah Homogen
101	Pacal	16.000	-	-	41.080.000	Urugan Tanah Homogen
102	Nglambangan	803	-	-	-	Urugan Tanah Homogen
103	Prijetan	4.008	-	-	12.100.000	Urugan Tanah Homogen
104	Gondang	10.500	-	-	21.210.000	Urugan Tanah Homogen
105	Canggih	219	-	-	-	Urugan Tanah Homogen
106	Klampis	2.080	0,07	-	10.250.000	Beton Gravity

No	Bendungan Eksisting	Irigasi (ha)	Manfaat Irigasi		Volume (m ³)	Tipe
			DMI	PLTA		
107	Manyar	860	-	-	-	Urugan Tanah Homogen
108	Cungkup	400	-	-	-	Urugan Tanah Homogen
109	Nipah	1.150	-	-	-	Batuan Gabung
110	Gintung	700	-	-	720.000	Urugan Tanah Homogen
111	Krenceng	-	-	-	-	UT
112	Telaga Tunjung	-	-	-	-	Urugan Batu
113	Benel	1.050	0,17	-	-	Urugan Batu
114	Palasari	-	-	-	-	Urugan Batu
115	Titab	-	-	-	-	-
116	Grogak	200	-	-	-	Urugan Batu
117	Pancor	100,00	-	-	-	Urugan Tanah
118	Batu Bokah	306,00	-	-	-	Urugan Tanah
119	Labangka	200,00	-	-	-	Urugan Tanah
120	Sepit	176,00	-	-	-	Urugan Tanah
121	Jangkih Jawe	350,00	-	-	-	Urugan Tanah
122	Batu Nampar	300,00	-	-	-	Urugan Tanah
123	Selante	612,00	-	-	-	Urugan Tanah
124	Kengkang	10,00	-	-	-	Urugan Tanah
125	Pare	600,00	-	-	-	Batuan Gabung
126	Gapit	1.300,00	0,01	0,05	-	Urugan Tanah
127	Lamenta	220	-	-	-	Urugan Tanah
128	Telaga Lebur	210	-	-	-	Urugan Tanah
129	Tibu Kuning	235	-	-	-	Urugan Tanah
130	Sepayung Dalam	500	-	-	-	Urugan Tanah
131	Sejari I	500	-	-	-	Urugan Tanah
132	Tolotangga	200	-	-	-	Urugan Tanah
133	Jompong	100	-	-	-	Urugan Tanah
134	Pengga	3.589	0,01	-	-	Urugan Batu
135	Muer	286	0,01	-	-	Batuan Gabung
136	Lingkuk Lamun	1.163	-	-	-	Batuan Gabung
137	Mapasan	80	-	-	-	Urugan Tanah
138	Batujai	3.140	0,06	-	-	Batuan Gabung
139	Kaswangi	543	-	-	-	Urugan Tanah
140	Soncolopi	150	-	-	-	Urugan Tanah
141	Kali Ujung	300	-	-	-	Urugan Tanah
142	Bringe	350	-	-	-	Urugan Tanah



No	Bendungan Eksisting	Irigasi (ha)	Manfaat Irigasi		Volume (m ³)	Tipe
			DMI	PLTA		
143	Brangkolong	764	-	-	-	Urugan Tanah
144	Pelaperado	3.895	0,01	0,25	-	Urugan Batu
145	Parado Kanca	350	-	-	-	Urugan Tanah
146	Waerita	174	-	-	-	Urugan Batu
147	Surabaya	1.125	-	-	-	Urugan Tanah
148	Laju	200	-	-	-	Urugan Tanah
149	Mamak	5.428	-	0,50	-	Urugan Batu
150	Tiu Kulit	1.800	0,01	0,07	-	Urugan Batu
151	Peneda Gandor	450	-	-	-	Urugan Batu
152	Pandanduri	5.168	-	-	-	Urugan Tanah
153	Waworoda	255	-	-	-	Urugan Batu
154	Pemasar	620	-	-	-	Urugan Tanah
155	Jelantik	350	-	-	-	Urugan Tanah
156	Jambu	700	-	-	-	Urugan Tanah
157	Mengkoang	350	-	-	-	Urugan Tanah
158	Ncera	138	-	-	-	Urugan Tanah
159	Sumi	2.272	0,01	0,15	-	Urugan Tanah
160	Lanangga	300	-	-	-	Urugan Tanah
161	Batu Bulan	1.300	0,21	-	-	Urugan Batu
162	Mantar	-	-	-	-	Urugan Tanah
163	Serading	200	-	-	-	Urugan Tanah
164	Woro	200	-	-	-	Urugan Tanah
165	Tonda Selatan	460	-	-	-	Urugan Tanah
166	Roi Roka	800	-	-	-	Batuan Gabung
167	Pernek	220	-	-	-	Urugan Tanah
168	Senang	200	-	-	-	Urugan Tanah
169	Gunung Paok	51	-	-	-	Urugan Tanah
170	Olat Rawa	-	-	-	-	Urugan Tanah
171	Kesi	220	-	-	-	Urugan Tanah
172	Kowo	220	-	-	-	Urugan Tanah
173	Kempo	255	-	-	-	Urugan Tanah
174	Penyaring	200	-	-	-	Urugan Tanah
175	Sanggupasante	391	-	-	-	Urugan Batu
176	Saneo	160	-	-	-	Urugan Tanah
177	Oi Toi	300	-	-	-	Urugan Tanah
178	Wera I	-	-	-	-	Urugan Tanah
179	Lasi II	200	-	-	-	Urugan Tanah
180	Kapalengga	135,00	-	-	-	Urugan Tanah
181	Manubulu	301,00	-	-	-	Urugan Tanah
182	Matasio	75,00	-	-	-	Urugan Tanah
183	Lere	129,00	-	-	-	Urugan Tanah
184	Benkoko	70,00	-	-	-	Urugan Tanah

No	Bendungan Eksisting	Irigasi (ha)	Manfaat Irigasi		Volume (m ³)	Tipe
			DMI	PLTA		
185	Oel Tua	300,00	-	-	-	Urugan Tanah
186	Tilong	1.484,00	-	-	-	Urugan Batu
187	Karinga	214,00	-	-	-	Urugan Tanah
188	Lokojange	420,00	-	-	-	Urugan Tanah
189	Rakawatu	174,00	-	-	-	
190	Haekrit	200,00	-	-	-	Urugan Tanah
191	Haliwen	300,00	-	-	-	Urugan Tanah
192	Padang Panjang	-	-	-	-	
193	Danau Tua	750	-	-	-	Urugan Tanah
194	Riam Kanan	-	-	-	-	UT
195	Manggar	-	0,90	-	-	Urugan Tanah
196	Samboja	1.167	-	-	-	Urugan Tanah
197	Benanga	800	0,11	-	-	Urugan Tanah
198	Teritip	-	0,26	-	2.431.000	Urugan Tanah Homogen
199	Merancang	1.200	-	0,40	-	Urugan Tanah
200	Beriwit	-	-	-	-	
201	Namuk	-	-	-	-	UB
202	Binalatung	-	0,20	-	-	Urugan Tanah
203	Bili Bili	25.783	-	2.400.000,00	-	Urugan Batu
204	Salomeko	1.723	-	-	-	Urugan Tanah
205	Ponre - Ponre	4.411	-	-	-	Urugan Batu
206	Kalola	4.200	-	0,15	-	Urugan Batu
207	Bakaru	-	-	-	-	BG
208	Balambano	-	-	-	-	BG
209	Karebbe	-	-	-	-	BG
210	Larona (Batubesi)	-	-	-	-	UB
211	Abusur	-	-	-	-	Urugan Tanah
212	Gosowong	-	-	-	-	UT
213	Lereh II	-	-	-	-	
214	Kalibumi	-	-	-	-	
215	Tami	-	-	-	-	Urugan Tanah Homogen

Sumber : Subdit Data dan Informasi Ditjen Sumber Daya Air, Status Juli 2018

C. Bendung

Bendung merupakan bangunan air yang dibangun melintasi sungai. Bendung berfungsi untuk meninggikan muka air dari sungai yang dibendung sehingga air dapat disadap dan



dialirkan ke saluran melalui bangunan pengambilan. Selain itu bendung juga dapat mengatur debit air sungai untuk mengantisipasi banjir pada musim hujan.

Bendungan terbagi menjadi 2 tipe berdasarkan konstruksinya yaitu bendung sederhana dan bendung permanen. Bendung permanen dibagi menjadi 2 yaitu bendung gerak dan bendung tetap. Bendung gerak adalah bangunan air yang dilengkapi dengan pintu bendung yang dapat digerakan untuk mengatur ketinggian muka air sungai. Sedangkan bendung tetap adalah bangunan air yang terdiri dari ambang tetap sehingga ketinggian muka air tidak dapat diatur. Tabel dibawah ini menyajikan jumlah bendung di Indonesia menurut provinsi.

Tabel 3.10 Jumlah Bendung di Indonesia Tahun 2018

Provinsi	Jumlah Bendung
Aceh	-
Sumatera Utara	8
Sumatera Barat	-
Riau	4
Jambi	-
Sumatera Selatan	1
Bengkulu	1
Lampung	1
Kepulauan Bangka Belitung	-
Kepulauan Riau	1
DKI Jakarta	-
Jawa Barat	2
Jawa Tengah	40
DI Yogyakarta	188
Jawa Timur	-
Banten	-
Bali	-
Nusa Tenggara Barat	1
Nusa Tenggara Timur	-
Kalimantan Barat	-
Kalimantan Tengah	-
Kalimantan Selatan	-
Kalimantan Timur	-
Kalimantan Utara	-
Sulawesi Utara	-
Sulawesi Tengah	-

Provinsi	Jumlah Bendung
Sulawesi Selatan	-
Sulawesi Tenggara	-
Gorontalo	5
Sulawesi Barat	-
Maluku	-
Maluku Utara	-
Papua Barat	-
Papua	3
Indonesia	255

Sumber : Subdit Data dan Informasi Ditjen Sumber Daya Air, Status Juli 2018

D. Embung

Embung adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam yang berfungsi sebagai penampung air hujan dan air limbah. Air hujan yang ditampung dipergunakan pada saat musim kemarau. Sedangkan embung potensi adalah titik-titik yang memungkinkan bagi pembangunan embung atau bangunan konservasi air buatan, seperti bendungan atau waduk. Selain sebagai tempat penampungan air embung juga memiliki fungsi sebagai tempat hidup berbagai tumbuhan dan hewan disekitarnya. Tabel 3.11 dibawah ini menyajikan jumlah embung di Indonesia menurut provinsi.

Tabel 3.11 Embung di Indonesia menurut Provinsi Tahun 2018

Provinsi	Jumlah Embung
Aceh	57
Sumatera Utara	48
Sumatera Barat	72
Riau	33
Jambi	12
Sumatera Selatan	3
Bengkulu	-
Lampung	480
Kepulauan Bangka Belitung	114
Kepulauan Riau	36
DKI Jakarta	
Jawa Barat	651
Jawa Tengah	264
D.I. Yogyakarta	249



Provinsi	Jumlah Embung
Jawa Timur	198
Banten	109
Bali	36
Nusa Tenggara Barat	84
Nusa Tenggara Timur	343
Kalimantan Barat	24
Kalimantan Tengah	3
Kalimantan Selatan	-
Kalimantan Timur	21
Kalimantan Utara	18
Sulawesi Utara	24
Sulawesi Tengah	-
Sulawesi Selatan	102
Sulawesi Tenggara	135
Gorontalo	18
Sulawesi Barat	9
Maluku	112
Maluku Utara	-
Papua Barat	-
Papua	-
Indonesia	3.255

Sumber : Subdit Data dan Informasi Ditjen Sumber Daya Air, Status Juli 2018

E. Pengaman Pantai

Bangunan pelindung pantai bertujuan untuk melindungi pantai terhadap kerusakan karena serangan gelombang dan arus, yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok, diantaranya:

Groin adalah struktur pengaman pantai yang dibangun menjorok tegak lurus terhadap arah pantai. Bahan konstruksinya umumnya kayu, baja, beton (pipa beton) dan batu. Perlindungan pantai dengan menggunakan groin biasanya dilakukan dengan membuat suatu seri bangunan yang terdiri dari beberapa groin yang ditempatkan dengan jarak tertentu. Hal ini dimaksudkan agar perubahan garis pantai tidak terlalu signifikan.

Jetty adalah bangunan tegak lurus pantai yang diletakan di kedua sisi muara sungai yang berfungsi untuk mengurangi pendangkalan alur oleh sedimen pantai. Struktur yang terdiri dari tiang-tiang pancang yang menyangga dek kayu atau baja diatasnya yang biasa

digunakan sebagai akses pejalan kaki, memancing, dan penelitian disebut Piers yang digolongkan ke dalam Jetty.

Breakwater atau dalam hal ini pemecah gelombang lepas pantai adalah bangunan yang dibuat sejajar pantai dan berada pada jarak tertentu dari garis pantai. Pemecah gelombang dibangun sebagai salah satu bentuk perlindungan pantai terhadap erosi dengan menghancurkan energi gelombang sebelum sampai ke pantai, sehingga terjadi endapan dibelakang bangunan. Endapan ini dapat menghalangi transport sedimen sepanjang pantai. Breakwater dibagi menjadi dua *Attached Breakwater* sebagai perlindungan perairan pelabuhan atau yang berhubungan langsung dengan pantai atau daratan dan *Detached Breakwater* sebagai perlindungan pantai terhadap erosi atau yang tidak berhubungan dengan garis pantai dan dibuat sejajar pantai dan berada pada jarak tertentu dari garis pantai.

Tabel 3.12 Jumlah Pengaman Pantai di Indonesia menurut Provinsi Tahun 2018

Provinsi	Jumlah Pengaman Pantai	Panjang (m)
Aceh	11	3.272,88
Sumatera Utara	6	1.071,00
Sumatera Barat	6	14.700,00
Riau	15	4.343,00
Jambi	3	500,00
Sumatera Selatan	-	-
Bengkulu	4	1.351,00
Lampung	9	2.564,00
Kepulauan Bangka Belitung	19	19.952,00
Kepulauan Riau	13	6.300,06
Dki Jakarta	3	3.395,00
Jawa Barat	11	-
Jawa Tengah	8	3.930,00
D.I. Yogyakarta	13	-
Jawa Timur	8	4.006,00
Banten	30	5.192,00
Bali	249	60.548,26
Nusa Tenggara Barat	-	-
Nusa Tenggara Timur	22	7.845,00
Kalimantan Barat	8	2.550,00
Kalimantan Tengah	1	500,00
Kalimantan Selatan	2	3.200,00
Kalimantan Timur	-	-
Kalimantan Utara	2	-
Sulawesi Utara	55	2.714,00
Sulawesi Tengah	14	8.226,00



Provinsi	Jumlah Pengaman Pantai	Panjang (m)
Sulawesi Selatan	-	-
Sulawesi Tenggara	20	8.000,37
Gorontalo	-	-
Sulawesi Barat	21	167.723,52
Maluku	33	-
Maluku Utara	18	9.712,00
Papua Barat	4	820,00
Papua	23	2.370,00
Indonesia	631	344.786,09

Sumber : Subdit Data dan Informasi Ditjen Sumber Daya Air, Status Juli 2018

F. Sabo Dam

Sabo atau pengendalian pasir memiliki sistem pengendalian erosi, sedimen, lahar hujan, dan penanggulangan tanah longsor. Bangunan sabo dam biasanya terletak di sungai di dekat gunung vulkanik yang berfungsi untuk menangkap aliran debris atau lahar sehingga debit aliran menjadi berkurang atau pengendalian sedimen. Selain itu sabo juga bisa berfungsi untuk mengarahkan dan memperlambat aliran material di sungai, tempat pengendapan, pengarah aliran untuk mencegah penyebaran, dan membatasi terjadinya aliran lahar atau bahaya sekunder gunung api. Efektivitas bangunan sabo dam selain harus tepat letaknya juga mesti diperhatikan pula kapasitas tampungannya.

Pengendalian banjir lahar ini dibagi menjadi tiga zona yaitu daerah hulu (daerah produksi sedimen), daerah tengah (daerah transpor sedimen), dan daerah hilir (daerah endapan sedimen). Penerapan teknologi sabo tergantung dari zonanya. Di daerah hulu dilakukan dengan membangun dam seri tingkat (stepped dam) dan dam pengendali sedimen (check dam). Selain itu penggunaan vegetasi juga penting untuk menghambat laju produksi sedimen. Tujuannya pembangunan dam ini untuk menjaga longsor tebing sungai akibat gerusan kaki tebing dan meredam tenaga gerusan. Sementara itu, di daerah tengah digunakan dam konsolidasi (consolidation dam) dan kantong sedimen/lahar (sand pocket) yang dimaksudkan untuk memperlambat kecepatan banjir, menstabilkan dasar sungai, mengarahkan alur sungai, mengubah sifat aliran massa menjadi aliran individu, serta menahan dan mengendalikan material sedimen.

Untuk daerah hilir, dilakukan kanalisasi (channel works) dan pembangunan ambang dasar (ground sill) serta tanggul. Jenis sabo dam yang dibangun di daerah hilir ini bertujuan untuk mengatur arah alur sungai, mengalirkan air banjir dan mencegah erosi dasar sungai,



mengatur dan menstabilkan kemiringan dasar sungai, dan mengamankan/melindungi lokasi muara sungai. Perbedaan bangunan sabo ini diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mengendalikan banjir lahar di daerah vulkanik.

Tabel 3.13 Jumlah Sabo Dam di Indonesia menurut Provinsi Tahun 2018

Provinsi	Jumlah Sabo Dam
Aceh	-
Sumatera Utara	-
Sumatera Barat	19
Riau	-
Jambi	-
Sumatera Selatan	-
Bengkulu	-
Lampung	-
Kepulauan Bangka Belitung	-
Kepulauan Riau	-
Dki Jakarta	-
Jawa Barat	27
Jawa Tengah	165
D.I. Yogyakarta	111
Jawa Timur	111
Banten	-
Bali	86
Nusa Tenggara Barat	-
Nusa Tenggara Timur	-
Kalimantan Barat	-
Kalimantan Tengah	-
Kalimantan Selatan	-
Kalimantan Timur	-
Kalimantan Utara	-
Sulawesi Utara	35
Sulawesi Tengah	56
Sulawesi Selatan	25
Sulawesi Tenggara	-
Gorontalo	-
Sulawesi Barat	-
Maluku	-
Maluku Utara	-
Papua Barat	-
Papua	-
Indonesia	635

Sumber : Subdit Data dan Informasi Ditjen Sumber Daya Air, Status Juli 2018



G. Air Tanah

Air tanah merupakan salah satu sumber daya air selain air sungai dan juga air hujan. Air tanah memegang peranan penting terutama dalam menjaga keseimbangan dan ketersediaan bahan baku untuk kepentingan rumah tangga ataupun industri. Lapisan dalam bumi yang mudah dilewati atau membawa air disebut dengan akuifer atau pembawa air. Air tanah mengisi lapisan tanah karena adanya proses infiltrasi dan perkolasi. Infiltrasi adalah gerakan resapan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah dan Perkolasi adalah gerakan air yang meresap ke dalam tanah melalui celah bebatuan hingga menjadi jenuh. Air tanah berasal dari air hujan yang meresap ke dalam bumi dan keluar ke permukaan bumi dalam bentuk mata air atau resapan.

Tabel 3.14 Jumlah Pengaman Pantai di Indonesia menurut Provinsi Tahun 2018

Provinsi	Jumlah Air Tanah	Irigasi (ha)	Debit Pompa (l/det)
Aceh	38	682	682
Sumatera Utara	37	-	-
Sumatera Barat	10	-	-
Riau	-	-	-
Jambi	-	-	-
Sumatera Selatan	-	-	-
Bengkulu	-	-	-
Lampung	77	-	-
Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-
Kepulauan Riau	-	-	-
Dki Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	-	-	-
Jawa Tengah	101	-	-
D.I. Yogyakarta	7	-	-
Jawa Timur	55	-	-
Banten	-	-	-
Bali	19	335	335
Nusa Tenggara Barat	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	71	808	808
Kalimantan Barat	-	-	-
Kalimantan Tengah	-	-	-
Kalimantan Selatan	-	-	-
Kalimantan Timur	4	-	-

Provinsi	Jumlah Air Tanah	Irigasi (ha)	Debit Pompa (l/det)
Kalimantan Utara	-	-	-
Sulawesi Utara	47	810	810
Sulawesi Tengah	-	-	-
Sulawesi Selatan	-	-	-
Sulawesi Tenggara	13	260	260
Gorontalo	-	-	-
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	11	-	-
Maluku Utara	-	-	-
Papua Barat	-	-	-
Papua	52	260	260
Indonesia	542	3.155	3.155

Sumber : Subdit Data dan Informasi Ditjen Sumber Daya Air, Status Juli 2018

BAB
4

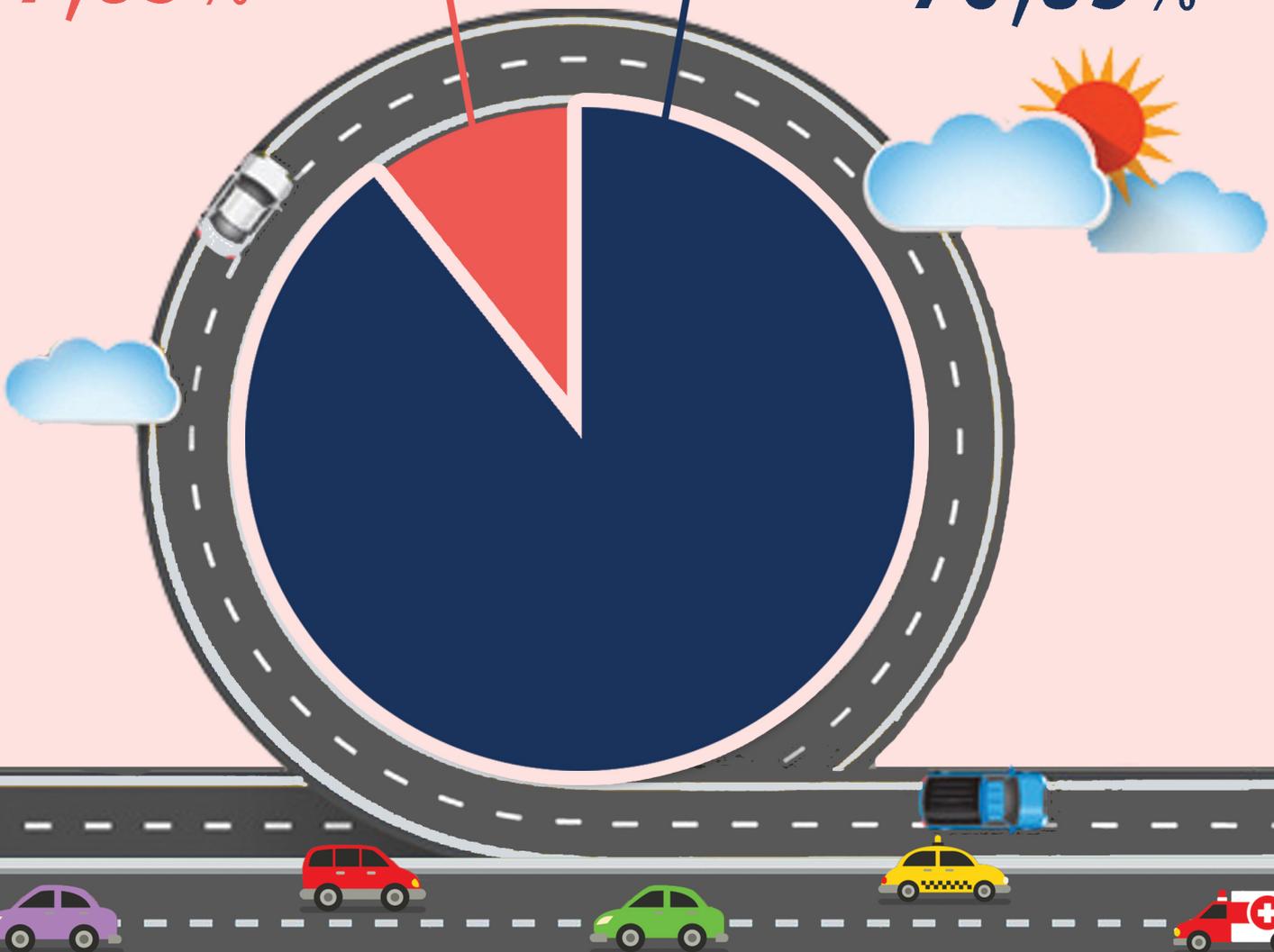
STATISTIK INFRASTRUKTUR BINA MARGA

537.991,20 km
Jembatan

47.017,27 km
Jalan Nasional

Tidak Mantap
9,65%

Mantap
90,35%





Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan merupakan nadi bagi mobilitas masyarakat. Sebagai penunjang transportasi darat jaringan jalan dan jembatan yang baik dapat berdampak baik pada sektor ekonomi suatu daerah. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi prioritas pemerintah mengingat semakin besar jumlah penduduk.

Berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 2004, terdapat 3 peran jalan yaitu:

1. Jalan sebagai prasarana transportasi berperan penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan, keamanan, serta kemakmuran rakyat.
2. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
3. Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah RI.

Sesuai peruntukannya jalan terbagi 2 yaitu jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum merupakan jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas umum. Sedangkan jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. Jalan umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.

Fungsi jalan dibedakan berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas angkutan jalan yaitu:

1. Jalan Arteri, jalan yang berfungsi melayani angkutan utama jarak jauh, dengan kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
2. Jalan Kolektor, jalan yang berfungsi melayani angkutan pengumpul jarak sedang, dengan kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
3. Jalan Lokal, jalan yang berfungsi melayani angkutan setempat jarak dekat, dengan kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi
4. Jalan Lingkungan, jalan yang berfungsi melayani angkutan lingkungan jarak dekat, dengan kecepatan rata-rata rendah.

Fungsi jalan tersebut terdapat pada sistem jaringan jalan primer dan sekunder. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah Indonesia, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Sedangkan sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di kawasan perkotaan. Jalan umum berdasarkan

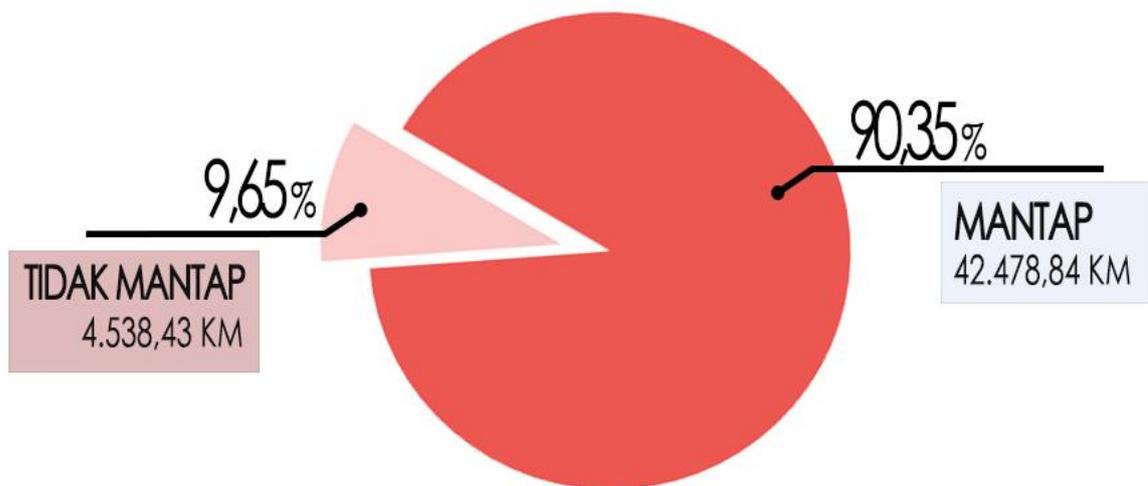


statusnya dikelompokkan menjadi jalan nasional, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

A. Jalan Nasional

Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. Wewenang penyelenggaraan jalan nasional berada pada pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR. Wewenang tersebut meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Kondisi jalan nasional di Indonesia secara umum dalam kondisi mantap dengan persentase sebesar 90,35%, sedangkan kondisi tidak mantap sebesar 9,65%. Provinsi dengan persentase jalan mantap terbesar adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 99,75%. Provinsi lainnya yang memiliki persentase tinggi yaitu Provinsi Jawa Tengah sebesar 97,41% dan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 97,31%. Sedangkan provinsi dengan persentase kondisi mantap terendah adalah Provinsi Papua Barat yaitu sebesar 78,67%.



Gambar 4.1 Persentase Kondisi Kemantapan Jalan tahun 2017

Tabel 4.1 Kondisi Panjang Jalan Nasional Tahun 2017

Provinsi	Panjang Total (km)	Mantap		Tidak Mantap	
		km	(%)	km	(%)
Aceh	2.102,07	2.001,85	95,23	100,22	4,77
Sumatera Utara	2.632,22	2.290,02	87,00	342,20	13,00
Sumatera Barat	1.448,81	1.325,34	91,48	123,47	8,52
Riau	1.336,61	1.139,77	85,27	196,84	14,73
Jambi	1.317,93	1.197,36	90,85	120,57	9,15
Sumatera Selatan	1.600,16	1.333,31	83,32	266,85	16,68
Bengkulu	792,61	768,69	96,98	23,92	3,02
Lampung	1.292,21	1.145,95	88,68	146,26	11,32
Kepulauan Bangka Belitung	600,4	598,90	99,75	1,50	0,25
Kepulauan Riau	586,83	540,76	92,15	46,06	7,85
DKI Jakarta	53,31	50,41	94,56	2,9	5,44
Jawa Barat	1.789,20	1.705,13	95,30	84,07	4,70
Jawa Tengah	1.518,09	1.478,72	97,41	39,37	2,59
DI Yogyakarta	247,91	240,11	96,85	7,80	3,15
Jawa Timur	2.361,23	2.075,72	87,91	285,50	12,09
Banten	564,89	493,94	87,44	70,95	12,56
Bali	2.117,57	1.987,93	93,88	129,64	6,12
Nusa Tenggara Barat	2.002,08	1.803,35	90,07	198,74	9,93
Nusa Tenggara Timur	1.204,30	1.096,52	91,05	107,78	8,95
Kalimantan Barat	1.710,90	1.611,24	94,17	99,66	5,83
Kalimantan Tengah	585,16	529,62	90,51	55,54	9,49
Kalimantan Selatan	629,39	612,49	97,31	16,90	2,69
Kalimantan Timur	934,55	906,18	96,96	28,37	3,04
Kalimantan Utara	1.857,91	1.675,44	90,18	182,47	9,82
Sulawesi Utara	1.663,92	1.509,19	90,7	154,73	9,30
Sulawesi Tengah	2.373,40	2.254,90	95,01	118,50	4,99
Sulawesi Selatan	1.745,92	1.588,72	91,00	157,20	9,00
Sulawesi Tenggara	1.497,81	1.393,31	93,02	104,50	6,98
Gorontalo	748,60	710,98	94,97	37,62	5,03
Sulawesi Barat	763,17	686,73	89,98	76,44	10,02
Maluku	1.771,67	1.503,58	84,87	268,09	15,13
Maluku Utara	1.203,34	1.029,23	85,53	174,11	14,47
Papua Barat	1.326,38	1.043,49	78,67	282,89	21,33
Papua	2.636,73	2.149,99	81,54	486,74	18,46
Indonesia	47.017,27	42.478,84	90,35	4.538,43	9,65

Sumber: Subdirektorat Analisa Data dan Pengembangan Sistem, Direktorat Jenderal Bina Marga.
Status 5 Februari 2018



B. Jalan Tol

Jalan tol termasuk dalam jalan umum dan merupakan bagian sistem jaringan jalan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar sejumlah uang tertentu. Tarif tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi. Tarif tol ditetapkan oleh Menteri, yang kemudian akan dievaluasi dan disesuaikan setiap 2 tahun sekali.

Pembangunan jalan tol diselenggarakan antara lain untuk memperlancar lalu lintas, meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang dan jasa, meringankan beban dana pemerintah, serta meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan. Wewenang penyelenggaraan jalan tol dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Wewenang tersebut meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan jalan tol. Selain pemerintah pengusahaan jalan tol juga dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun swasta.

Jalan tol diperuntukkan bagi kendaraan bermotor yang dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan tonase. Golongan jenis kendaraan bermotor yang dapat melalui jalan tol adalah sebagai berikut :

- a. Golongan 1 : sedan, jip, pick up/truk kecil, dan bus.
- b. Golongan 2 : truk dengan 2 gandar.
- c. Golongan 3 : truk dengan 3 gandar.
- d. Golongan 4 : truk dengan 4 gandar.
- e. Golongan 5 : truk dengan 5 gandar.
- f. Golongan 6 : kendaraan bermotor roda 2.

Pada Tabel 4.2 dapat dilihat ruas-ruas jalan tol yang telah beroperasi sejak tahun 1978-2018. Hingga Juli 2018 sudah terdapat 46 ruas jalan tol telah beroperasi.

Tabel 4.2 Jalan Tol Beroperasi

No	Ruas Jalan Tol	Panjang (km)		BUJT	Mulai Beroperasi
		Jalan Utama	Akses		
1.	Jakarta – Bogor – Ciawi	50	9	PT. Jasa Marga	1978
2.	Jakarta – Tangerang	27	6	PT. Jasa Marga	1984
3.	Surabaya – Gempol	46,55	6	PT. Jasa Marga	1984
4.	Jakarta – Cikampek	72	11	PT. Jasa Marga	1985

No	Ruas Jalan Tol	Panjang (km)		BUJT	Mulai Beroperasi
		Jalan Utama	Akses		
5.	Padalarang – Cileunyi	35,63	28,77	PT. Jasa Marga	1986
6.	Prof. DR Soedyatmo	14,3		PT. Jasa Marga	1986
7.	Cawang – Tomang – Pluit (CTC/Lingkar Dalam Kota Jakarta)	23,55		PT. Jasa Marga	1997
8.	Semarang Seksi A,B,C	24,75		PT. Jasa Marga	1983
9.	Belawan – Medan – Tj. Morowa	33,7	9	PT. Jasa Marga	1989
10.	Pondok Aren – Bintaro Viaduct – Ulujami	5,55		PT. Jasa Marga	1999
11.	JORR E1 Selatan (Taman Mini – Hankam Raya)	4		PT. Jasa Marga	2007
12.	JORR E1 Utara (Hankam – Cikunir)	8,1	0,3	PT. Jasa Marga	2007
13.	JORR E2 (Cikunir – Cakung)	9,07		PT. Jasa Marga	2007
14.	JORR E3 (Cakung – Cilincing)	3,75		PT. Jasa Marga	2007
15.	JORR W1 (Kebun Jeruk – Penjarangan)	9,85	0,55	PT. Jakarta Lingkar Barat I	2010
16.	JORR W2 Selatan (Pondok Pinang – Ulujami)	5,72	0,48	PT. Jasa Marga	2005
17.	JORR W2 Utara (Kebon Jeruk – Ulujami)	7,87		PT. Marga Lingkar Jakarta	2013 dan 2014
18.	Cikampek – Padalarang	58,50		PT. Jasa Marga	2005
19.	Jembatan Surabaya – Madura (Suramadu *)	5,4	15,85	PT. Jasa Marga	2009
20.	Tangerang – Merak	72,29	5,59	PT. Marga Mandala Sakti	1992
21.	Cawang – Tj. Priok – Ancol Timur – Jembatan Tiga/Pluit (Ir. Wiyoto Wiyono, MSc.)	27,05		PT. Citra Marga Nusaphala Persada	1989
22.	Surabaya – Gresik	20,7		PT. Margabumi Matraraya	1993
23.	JORR S	14,83		PT. Utama Karya	1995
24.	Ujung Pandang Seksi 1 dan 2	6,05		PT. Bosawa Marga Nusantara	1998
25.	Serpong – Pondok Aren	7,25		PT. Bintaro Serpong Damai	1999
26.	SS Waru – Bandara Juanda	12,8		PT Citra Margatama Surabaya	2008
27.	Makassar Seksi IV	11,6		PT Jalan Tol Seksi Empat	2008
28.	Bogor Ring Road Seksi I, IIA, IIB	7,85		PT Marga Sarana Jabar	2009, 2014, dan 2018



No	Ruas Jalan Tol	Panjang (km)		BUJT	Mulai Beroperasi
		Jalan Utama	Akses		
29.	Kanci – Pejagan	35		PT Semesta Marga Raya	2010
30.	Surabaya – Mojokerto	36,27		PT. Jasamarga Surabaya Mojokerto	2011
31.	Cinere – Jagorawi	3,5		PT. Translingkar Kita Jaya	2012
32.	Nusa Dua - Ngurah Rai – Benoa (Bali Mandara)	10		PT. Jasamarga Bali Tol	2013
33.	Semarang – Solo Seksi I, II, dan III	40,4		PT. Trans Marga Jateng	2011 dan 2014
34.	Kertosono – Mojokerto Seksi I, II, dan III	39,6		PT Marga Harjaya Infrastruktur	2014, 2016 dan 2017
35.	Gempol – Pandaan	12,05	1,56	PT Jasamarga Pandaan Tol	2015
36.	Cikampek – Palimanan	116,75		PT Lintas Marga Sedaya	2015
37.	Pejagan – Pemalang Seksi I dan II	20,2		PT Pejagan Pemalang Tol Road	2016
38.	Gempol – Pasuruan Seksi I dan II	20,5		PT Transmarga Jatim Pasuruan	2017 dan 2018
39.	Akses Tanjung Priuk	11,4		Satker Tanjung Priuk	2017
40.	Palembang – Simpang Indralaya Seksi I	7,75		PT. Utama Karya	2017
41.	Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi II, III, IV, V, dan VI	41,65		PT. Jasamarga Kualanamu Tol	2017
42.	Medan – Binjai Seksi II dan III	10,46		PT. Utama Karya	2017
43.	Bekasi – Cawang – Kampung Melayu (Becakayu) Seksi IB dan IC	8,4		PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga	2017
44.	Soreang – Pasir Koja	8,15		PT. Citra Marga Lintas Jabar	2017
45.	Bakauheni – Terbanggi Besar (Segmen Pelabuhan Bakauheni – SS Bakauheni dan Segmen SS Lemantang – SS Kotabaru)	13,9		PT. Utama Karya	2018
46.	Ngawi – Kertosono Seksi I, II, dan III	49,51		PT. Ngawi Kertosono Jaya	2018

Sumber : Badan Pengaturan Jalan Tol (BPJT), status 6 Juli 2018.

Keterangan: *) Selama masa transisi sebelum diperoleh BUJT permanen PT Jasa Marga (Persero) Tbk melaksanakan operasi dan pemeliharaan Jembatan Surabaya-Madura selama 6 tahun (2012-2017)



Pada Tabel 4.3, Tabel 4.4, Tabel 4.5, dan Tabel 4.6 disajikan data jalan tol trans jawa, trans jabodetabek, trans non jawa, dan trans sumatera dalam pembangunan. Jalan tol trans jawa terdapat 9 ruas jalan yang sedang dalam tahap pembangunan. Pada jalan tol trans jabotabek terdapat 13 ruas jalan yang sedang dalam tahap pembangunan. Sedangkan jalan tol trans non jawa dan trans sumatera masing-masing memiliki 7 ruas jalan tol yang sedang dalam pembangunan.

Tabel 4.3 Jalan Tol Trans Jawa dalam Pembangunan

No.	Ruas	Panjang (km)	Progres (%)		BUJT	
			Tanah Bebas	Konstruksi		
1.	Pejagan – Pemasang	Seksi 1 (Pejagan – Brebes Barat)	14,2	100	100	PT. Pejagan Pemasang Tol Road
		Seksi 2 (Brebes Barat – Brebes Timur)	6	100	100	
		Seksi 3 (Brebes Timur – Tegal Timur)	10,4	100	100	
		Seksi 4 (Tegal Timur – Pemasang)	26,9	100	100	
		Total	57,50	100	100	
2.	Pemasang – Batang	Seksi 1 (SS Pemasang – SS Pekalongan)	23,3	99,95	80,17	PT. Pemasang Batang Tol Road
		Seksi 2 (SS Pekalongan – Batang)	15,9	99,46	79,34	
		Total	39,20	99,21	79,76	
3.	Batang – Semarang	Seksi 1 (Batang – Batang Timur)	3,2	100	81,1	PT. Jasamarga Semarang Batang
		Seksi 2 (Batang Timur – Weleri)	36,4	99,88	81,1	
		Seksi 3 (Weleri – Kendal)	11,05	97,89	85,22	
		Seksi 4 (Kendal – Kaliwungu)	13,5	98,28	86,99	
		Seksi 5 (Kaliwungu – Semarang)	10,1	93,88	86,99	
		Total	74,20	98,48	84,44	
4.	Semarang – Solo	Seksi 1 (Semarang – Ungaran)	10,85	100	100	PT. Trans Marga Jateng
		Seksi 2 (Ungaran – Bawen)	11,95	100	100	
		Seksi 3 (Bawen – Salatiga)	17,6	100	100	
		Seksi 4 (Salatiga – Boyolali)	24,13	99	69,24	
		Seksi 5 (Boyolali – Kartusuro)	8,41			
		Total	72,94	99,55	86,28	
5.	Solo – Ngawi	Seksi 1a (Colomadu – Karanganyar) (Pemerintah)	0,9	100	100	PT. Solo Ngawi Jaya
		Seksi 1b (Colomadu – Karanganyar) (Pemerintah)	1,47	100	100	



No.	Ruas	Panjang (km)	Progres (%)		BUJT	
			Tanah Bebas	Konstruksi		
		JBH Solo – Kertosono MYC (Pemerintah)	0,9	100	100	
		Colomadu – Karanganyar (Pemerintah)	17,78	100	100	
		Total	21,07	100	100	
		Seksi 3 - Paket 1 (Solo –Mantingan) (BUJT)	35,15	97,86	96,01	
		Seksi 4 - Paket 2 (Mantingan – Ngawi) (BUJT)	34,2	97,39	89,72	
		Total	69,35	97,63	92,65	
6.	Ngawi – Kertosono	Seksi 1 (Ngawi – IC Madiun)	20	99,74	100	PT. Ngawi Kertosono Jaya
		Seksi 2 (IC Madiun – IC Caruban)	8,45	100	100	
		Seksi 3 (IC Caruban – Wilangan (Ngajuk))	21,06	99,97	100	
		Seksi 4 (Saradan (Wilangan) – Kertosono)	37,39	99,11	100	
		Total	49,57	99,88	100	
7.	Gempol – Pasuruan	Seksi 1 (Gempol – Rembang)	13,9	100	100	PT. Transmar ga Jatim Pasuruan
		Seksi 2 (Rembang – Pasuruan)	6,6	99,09	100	
		Seksi 3 (Pasuruan – Grati)	13,65	89,63	36,77	
		Total	34,15	95,68	74,73	
8.	Pasuruan – Probolinggo	Seksi 1 (Grati – Tonggas)	13,5	93,5	77,99	PT. Trans Jawa Paspro Jalan Tol
		Seksi 2 (Tonggas – Probolinggo)	6,9	93,12	74,63	
		Seksi 3 (Probolinggo Barat – Probolinggo Timur)	10,9	98,47	77,49	
		Seksi 4 (Probolinggo Timur – IC Gending)	13,7	0	0	
		Total	45	94	53,61	
9.	Probolinggo – Banyuwangi	Seksi 1 (SS Kraksaan – SS Paiton)	15,75	0	0	PT. Jasamarga Probolinggo Banyuwangi
		Seksi 2 (SS Paiton – SS Besuki)	21,89	0	0	
		Seksi 3 (SS Besuki – SS Situbondo)	43,48	0	0	
		Seksi 4 (SS Situbondo – SS Asembagus)	17,65	0	0	
		Seksi 5 (SS Asembagus –SS Bajulmati)	43,61	0	0	
		Seksi 6 (SS Bajulmati – SS Ketapang)	21,45	0	0	
		Total	172,91	0	0	

Sumber: Badan Pengaturan Jalan Tol (BPJT), status 6 Juli 2018

Tabel 4.4 Jalan Tol Jabodetabek dalam Pembangunan

No.	Ruas	Panjang (km)	Progres (%)		BUJT	
			Tanah Bebas	Konstruksi		
1	Bekasi – Cawang – Kp. Melayu	Seksi 1a	3,5	74,48	68,50	PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga
		Seksi 1b & 1c (Casablanca – Jaka Sampurna)	8,4		100	
		Seksi 2 (Jaka Sampurna – Marga Jaya)	4,1	0	14,53	
		Total	16	48,98	71,21	
2	Cinere – Jagorawi	Seksi 1 (Jagorawi – Raya Bogor)	3,70	100	100	PT. Trans Lingkar Kita Jaya
		Seksi 2 (Raya Bogor – Kukusan)	5,5	97,94	89,76	
		Seksi 2a (Cisalak – Margonda)	3,5	98,91	88,36	
		Seksi 2b (Margonda – Kukusan)	2	96,25	92,22	
		Seksi 3 (Kukusan – Cinere)	5,5	8,41	0	
		Total	14,7	65,19	59	
3	Depok – Antasari	Seksi 1 (Antasari – Brigif/Cinere)	5,80	93	99,32	PT. Citra Waspphoto wa
		Seksi 2 (Brigif – Sawangan)	6,3	40,61	15,32	
		Seksi 2a (Brigif – Krukut)	2,7	99,57	35,75	
		Seksi 2b (Krukut – Sawangan)	3,6	11,27	0	
		Seksi 3 (Sawangan – Bojonggede)	9,5	0	0	
		Total	21,6	36,79	31,1	
4	Cimanggis – Cibitung	Seksi 1 (Junction Cimanggis – Trans Yogie IC)	3,20	73,29	80,9	PT. Cimanggis Cibitung Tollways
		Seksi 2 (On/Off Ramp Jatikarya – Cibitung Junction)	23,3	44,89	18,76	
		Total	26,5	47,48	26,26	
5	Cibitung – Cilincing	Seksi 1 (SS Cibitung – SS Telaga Asih)	8,38	49,27	25,44	PT. Cibitung Tanjung Priok Portways
		Seksi 2 (SS Telaga Asih – SS Tambung Utara)	9,13	63	0,88	
		Seksi 3 (Tambun Utara – Taruma Jaya)	10,67	47,3	1,99	
		Seksi 4 (Taruma Jaya – Cilincing)	4,58	0	0	
		Total	32,76	49,19	6,92	
6	Serpong – Balaraja	Seksi 1 (BSD – Legok)	11,30	81	0	PT. Trans Bumi Serbaraja
		Seksi 2 (Legok – Tigaraksa Selatan)	10,7	0	0	
		Seksi 3 (Tigaraksa Selatan – Balaraja)	17,8	0	0	



No.	Ruas	Panjang (km)	Progres (%)		BUJT	
			Tanah Bebas	Konstruksi		
		Total	39,8		0	
7.	Bogor Ring Road	Seksi 1 (Sentul – Kedung Halang)	3,90	100	100	PT. Marga Sarana Jabar
		Seksi 2 (Kedung Halang – Simpang Yasmin)	4,60	100	100	
		Seksi 2a (Kedung Halang – Kedung Badak)	2,00	100	100	
		Seksi 2b (Kedung Badak – Simpang Yasmin)	2,60	100	100	
		Seksi 3 (Simpang Yasmin – Salabenda)	4,50	0	0	
		Seksi 3a (Simpang Yasmin – Kayu Manis)	3,00	0	0	
		Seksi 3b (Kayu Manis – Salabenda)	1,50	0	0	
		Total	13	71,36	71,36	
8.	Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran	Seksi 1 (Kunciran – Tirtayasa)	2,04	18,11	8,58	PT. Marga Kunciran Cengkareng
		Seksi 2 (Tirtayasa – Benteng Betawi)	3,52	16,54	1,22	
		Seksi 3 (Benteng Betawi – H. Sastranegara)	6,57	54,85	12,33	
		Seksi 4 (H. Sastranegara – SS Benda)	2,06	95,84	55,4	
		Total	14,19	39,17	12,37	
9.	6 Tol Dalam Kota Jakarta	Seksi A (Kelapa Gading – Pulau Gebang)	9,30	80,43	13,56	PT. Jakarta Toll Road Development
		Seksi B (Semanan – Grogol)	9,50	0	0	
		Seksi C (Grogol – Kelapa Gading)	12,40	0	0	
Total	31,16	24,05	4,05			
10.	Jakarta – Cikampek II Elevated	Seksi 1 (Cikunir – Bekasi Barat)	2,94			PT. Jasamarga Jalan Layang Cikampek
		Seksi 2 (Bekasi Barat – Bekasi Timur)	3,42			
		Seksi 3 (Bekasi Timur – Tambun)	4,40			
		Seksi 4 (Tambun – Cibitung)	3,30		40,74	
		Seksi 5 (Cibitung – Cikarang Utara)	4,66			
		Seksi 6 (Cikarang Utara – Cikarang Barat)	1,96			
		Seksi 7 (Cikarang Barat – Cibatu)	3,11			

No.	Ruas	Panjang (km)	Progres (%)		BUJT	
			Tanah Bebas	Konstruksi		
		Seksi 8 (Cibatu – Cikarang Timur)	3,00			
		Seksi 9 (Cikarang Timur – Karawang Barat)	9,58			
		Total	36,37		40,74	
11.	Serpong – Cinere	Seksi 1 (Sepong IC – Pamulang IC)	6,5	64,21	18,11	PT. Cinere Serpong Jaya
		Seksi 2 (Pamulang IC – Cinere IC)	3,65	15,78	0	
		Total	10,15	62,68	11,6	
12.	Kunciran – Serpong	Seksi 1 (Kunciran – Parigi)	6,72	95,29	53,3	PT. Marga Trans Nusantara
		Seksi 2 (Parigi – Serpong)	4,42	92,78	77,9	
		Total	10,14	94,37	63,06	
13.	Jakarta – Cikampek II Sisi Selatan	Seksi 1 (SS Jatiasih – SS Bantar Gebang)	5,75	0	0	PT. Jasmarga Japek Selatan
		Seksi 2 (SS Bantar Gebang – SS Setu)	4,4	0	0	
		Seksi 3 (SS Setu – SS Sukaragam)	9,15	0	0	
		Seksi 4 (SS Sukaragam – SS Taman Mekar)	15,7	0	0	
		Seksi 5 (SS Taman Mekar – SS Kuta Negara)	19,3	0	0	
		Seksi 6 (SS Kuta Negara – SS Sadang)	7,2	0	0	
		Total	61,50	0	0	

Sumber: Badan Pengaturan Jalan Tol (BPJT), status 6 Juli 2018

Tabel 4.5 Jalan Tol Non Trans Jawa dalam Pembangunan

No.	Ruas	Panjang (km)	Progres (%)		BUJT	
			Tanah Bebas	Konstruksi		
1.	Ciawi – Sukabumi	Seksi 1 (Ciawi – Cigombong)	15,35	98,55	91,52	PT. Trans Jabar Toll
		Seksi 2 (Cigombong – Cibadak)	11,9	20,63	0	
		Seksi 3 (Cibadak – Sukabumi Barat)	13,7	0	0	
		Seksi 4 (Sukabumi Barat – Sukabumi Timur)	13,05	0	0	
		Total	54,00	32,83	25,89	
2.		Seksi 1 (Cileunyi – Ranca Kalong)	10,57	37,43	0	



No.	Ruas	Panjang (km)	Progres (%)		BUJT	
			Tanah Bebas	Konstruksi		
	Cileunyi – Sumedang – Dawuan	Seksi 2 Fase 1 (Ranca Kalong – Sumedang)	6,35	100	100	PT. Citra Karya Jabar Tol
		Seksi 2 Fase 2 (Ciherang – Sumedang)	10,7	83,56	42,53	
		Total	27,62	69,69	39,47	
		Seksi 3 (Sumedang – Cimalaka) (BUJT)	3,75	99,74	8,2	
		Seksi 4 (Cimalaka – Legok) (BUJT)	8,2	1,44	0	
		Seksi 5 (Legok – Ujung Jaya) (BUJT)	16,42	0	0	
		Seksi 6 (Ujung Jaya – Dawuan) (BUJT)	4,23	0	0	
		Total	32,60	11,84	0,94	
3.	Krian – Legundi – Bunder – Manyar	Seksi 1 (Krian – Kademean Mengganti)	10,55	85,7	47,04	PT Waskita Bumi Wira
		Seksi 2 (Kademean Mengganti – Boboh)	7,95	86,52	50,99	
		Seksi 3 (Boboh – Bunder)	10,66	93,48	64,34	
		Seksi 4 (Bunder – Manyar)	9,13	0	0	
		Total	38,29	86,99	41,43	
4.	Pandaan – Malang	Seksi 1 (Pandaan – Purwodadi)	15,35	87,16	75,41	PT. Jasamarga Pandaan Malang
		Seksi 2 (Purwodadi – Lawang)	7,4	81,79	50,66	
		Seksi 3 (Lawang – Singosari)	8,25	96	54,83	
		Seksi 4 (Singosari – Pakis)	5,1	75,81	18,01	
		Seksi 5 (Pakis – Malang)	2,38	41,83	9,84	
		Total	38,48	83,71	54,58	
5.	Balikpapan – Samarinda	Seksi 1 (Balikpapan – Samboja)	22,03	95,23	85,8	PT. Jasamarga Balikpapan Samarinda
		Seksi 2 (Samboja – Muara Jawa)	30,98	92,2	58,34	
		Seksi 3 (Muara Jawa – Palaran)	17,5	96,25	73,63	
		Seksi 4 (Palaran – Samarinda)	17,95	95,48	51,47	
		Seksi 5 (Balikpapan –	11,09	96	40,67	

No.	Ruas	Panjang (km)	Progres (%)		BUJT	
			Tanah Bebas	Konstruksi		
	Bandara Sepinggang)					
	Total	99,55	94,6	63,89		
6.	Manado – Bitung	Seksi 1 (Ring Road Manado – Sukur – Airmadidi)	14	89,13	59,02	PT. Jasa Marga Manado Bitung
		Seksi 1a (Maumbi – Suwaan)	7	96,14	46,56	
		Seksi 1b (Sukur – Tumuluntung)	7	82,11	71,48	
		Seksi 2 (Airmadidi – Bitung)	25	79,06	37,71	
		Seksi 2a (Paslaten – Watudambo II)	11,5	98,84	73,74	
		Seksi 2b (Sagerat – Pateten)	13,5	67,5	7,02	
		Total	39,00	82,67	45,36	
7.	Serang – Panimbang	Porsi BUJT	50,68	17,79	0,05	PT. Wijaya Karya Serang Panimbang
		Porsi Pemerintah	33	0	0	
		Total	83,68	0,41	0,41	

Sumber: Badan Pengaturan Jalan Tol (BPJT), status 6 Juli 2018

Tabel 4.6 Jalan Tol Trans Sumatera dalam Pembangunan

No.	Ruas	Panjang (km)	Progres (%)		BUJT	
			Tanah Bebas	Konstruksi		
1.	Bakauheuni – Terbanggi Besar	Paket 1 (Bakauheuni – Sidomulyo)	39,4	99,82	87,66	PT Utama Karaya
		Paket 2 (Sidomulyo – Kotabaru)	40,6	99,58	85,45	
		Paket 3 (Kotabaru – Metro)	29	97,78	77,14	
		Paket 4 (Metro – Terbanggi Besar)	31,93	99,2	84,63	
		Total	140,70	95,02	81,04	
2.	Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayuagung	Seksi 1 (Terbanggi Besar – Pematang Panggang)	112,2	84,43	64,98	PT Utama Karaya
		Seksi 2 (Pematang Panggang – Kayu Agung)	77	93,39	61,43	
		Total	189,20	88,08	63,53	



No.	Ruas	Panjang (km)	Progres (%)		BUJT	
			Tanah Bebas	Konstruksi		
3.	Kayuagung – Palembang – Betung	Seksi 1 (Kayu Agung – Jakabaring)	33,5	99,48	31,35	PT Sriwijaya Markmore Persada
		Seksi 2 (Jakabaring – Musilindas)	33,9	70,49	50,78	
		Seksi 3 (Musilindas – Betung)	44,29	97,86	11,98	
		Total	111,69	88,35	29,57	
4.	Pelambang – Indralaya	Seksi 1 (Palembang – Pamulatan)	7	100	100	PT Utama Karaya
		Seksi 2 (Pamulatan – KTM)	5,65	100	71,95	
		Seksi 3 (KTM – Simpang Indralaya)	9,28	100	98,77	
		Total	21,93	100	88,41	
5.	Pekanbaru – Kandis – Dumai	Seksi 1 (Pekanbaru – Minas)	9,2	83,61	29,26	PT Utama Karaya
		Seksi 2 (Minas – Petapahan)	23,6	69,6	11,35	
		Seksi 3 (Petapahan – Kandis Utara)	17,45	83,65	17,13	
		Seksi 4 (Kandis Utara – Duri Selatan)	28,95	58,31	0,47	
		Seksi 5 (Duri Selatan – Duri Utara)	27,23	51,56	0	
		Seksi 6 (Duri Utara – Dumai)	25,05	78,57	0,73	
		Total	131,48	75,69	17,59	
6.	Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi	Seksi 1a (BUJT)	3,25	97,05	100	PT. Jasamarga Kualanamu Tol
		Seksi 1b (Pemerintah)	7,5	99,85	100	
		Seksi 2	7,05	100	100	
		Seksi 3	4,4	100	100	
		Seksi 4a	6,6	100	100	
		Seksi 4b	6,22	100	100	
		Seksi 5	9,6	100	100	
		Seksi 6	7,8	100	100	
		Seksi 7a	4,49	77	50,39	
		Seksi 7b	4,81	92,09	71,09	
Total	61,70	94,14	94,14			
7.	Medan – Binjai	Seksi 1 (Tj. Mulia – Helvetia)	6,27			PT Utama Karaya
		Segmen SS Helvetia – Jln Veteran	2,8	76,9	84,33	

No.	Ruas	Panjang (km)	Progres (%)		BUJT
			Tanah Bebas	Konstruksi	
	Segmen Jln Veteran – Tj. Mulia	3,47			
	Seksi 2 (Helvetia –Semayang)	6,18	100	100	
	Seksi 3 (Semayang – Binjai)	4,28	100	100	
	Total	16,73	94,35	91,52	

Sumber: Badan Pengaturan Jalan Tol (BPJT), status 6 Juli 2018

Pada Tabel 4.7 disajikan data mengenai jalan tol dalam perencanaan. Terdapat 7 ruas jalan tol dalam perencanaan. Salah satu ruas dalam proses tender adalah ruas Serang – Panimbang (33,7 km), 6 ruas lainnya berstatus persiapan tender.

Tabel 4.7 Jalan Tol dalam Perencanaan

No	Ruas Jalan Tol	Panjang (km)	Nilai Investasi (Triliun)	Keterangan
1.	Serang – Panimbang	33,7	3,4	Proses Tender
2.	Semarang – Demak	25,25	dalam persiapan	Persiapan Tender
3.	Kamal – Teluk Naga – Rajeg	39,4	17	Persiapan Tender
4.	Semanan – Balaraja	31,67	10,3	Persiapan Tender
5.	Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap	184	46,6	Persiapan Tender
6.	Akses Pelabuhan Patimban	37,63	5,35	Persiapan Tender
7.	Jembatan Balikpapan – Penajam Passer Utara	7,6	16,5	Persiapan Tender

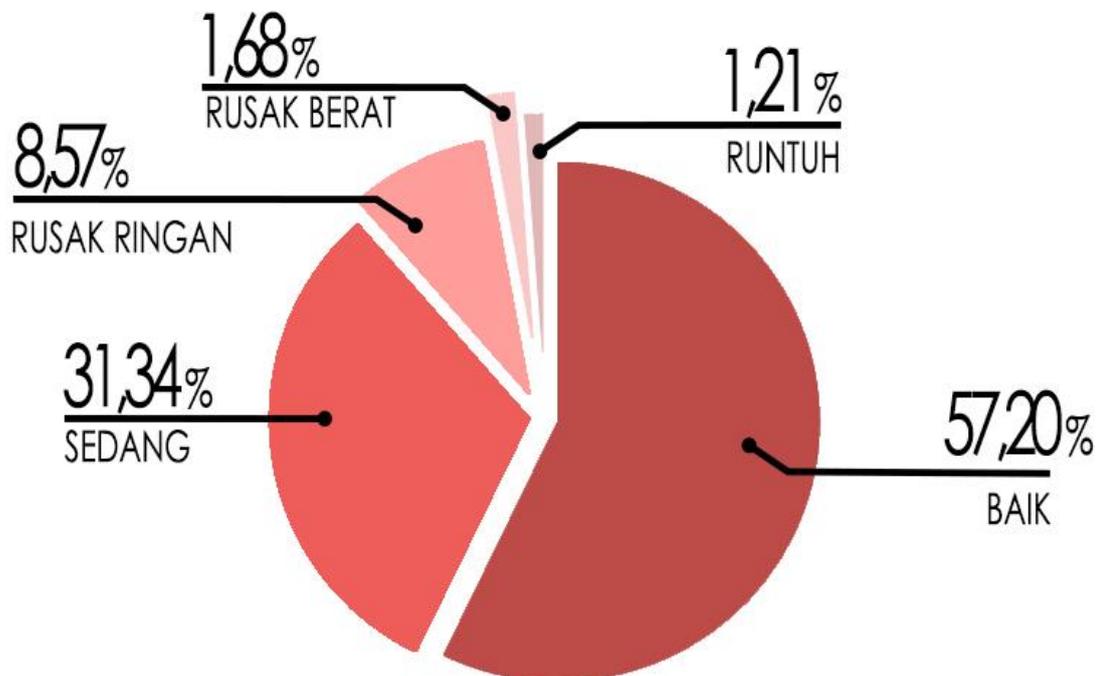
Sumber: Badan Pengaturan Jalan Tol (BPJT), status 6 Juli 2018

C. Jembatan Nasional

Jembatan merupakan bangunan infrastruktur yang digunakan untuk menghubungkan dua tempat yang pisah karena kondisi geografis. Menurut Peraturan Menteri PUPR No. 41/PRT/M/2015 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan, jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah. Ada 3 jenis jembatan yaitu:

- a. Jembatan pelengkung, jembatan dengan struktur setengah lingkaran dimana pada kedua ujungnya bertumpu pada abutment.
- b. Jembatan beruji kabel, stuktur jembatan yang mempunyai sederet kabel lurus dan memikul elemen horizontal kaku (berupa balok, rangka, atau box). Jembatan ini terdiri dari sistem struktur berupa gelagar menerus yang didukung oleh penunjang berupa kabel yang dibentang miring dan dihubungkan ke pylon sebagai penahan utama.
- c. Jembatan kabel gantung, tipe jembatan dimana dek jembatan digantung di bawah kabel penggantung dengan menggunakan penggantung vertical (*hanger*).

Pada tahun 2018 tercatat sepanjang 307.715,9 km dari 537.991,2 km (57,20%) jembatan di Indonesia dalam kondisi baik, sedangkan 1,21% lainnya dalam kondisi runtuh. Provinsi yang memiliki total panjang jembatan terpanjang adalah Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 33.606 km, 45,96% dalam keadaan baik; 42,67% sedang; 10,43% rusak ringa; 0,94% rusak berat; dan 0% runtuh. Pada Tabel 4.11 tersaji kondisi jembatan nasional seluruh provinsi di Indonesia.



Gambar 4.2 Persentase Kondisi Jembatan Nasional Tahun 2018

Tabel 4.8 Kondisi Jembatan Nasional Tahun 2018

Provinsi	Kondisi Panjang Jembatan Nasional (km)					Total
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Runtuh	
Aceh	17.442,6	6.966,7	1.575,2	70,2	0,0	26.054,7
Sumatera Utara	12.163,0	9.789,4	3.261,2	269,6	0,0	25.483,2
Sumatera Barat	13.126,3	4.673,9	765,5	198,2	54,0	18.817,9
Riau	5.500,3	7.075,0	2.623,7	65,8	0,0	15.264,8
Jambi	4.179,6	5.985,3	482,6	150,9	0,0	10.798,4
Sumatera Selatan	869,1	11.834,1	3.649,0	82,1	0,0	16.434,3
Bengkulu	2.830,0	2.410,3	2.863,7	1.230,6	0,0	9.334,6
Lampung	7.632,2	1.663,7	1.511,0	12,5	0,0	10.819,4
Kepulauan Bangka Belitung	1.798,2	922,8	18,3	8,4	29,1	2.776,8
Kepulauan Riau	5.068,7	2.251,5	236,3	71,5	0,0	7.628,0
DKI Jakarta	3.842,5	1.342,6	685,0	0,0	0,0	5.870,1
Jawa Barat	15.446,8	14.339,6	3.504,7	314,9	0,0	33.606,0
Jawa Tengah	18.204,6	11.465,7	1.613,6	648,1	0,0	31.932,0
DI Yogyakarta	4.736,6	513,4	1.184,7	0,0	0,0	6.434,7
Jawa Timur	24.322,3	3.578,3	728,5	121,4	4,2	28.754,7
Banten	4.234,6	2.063,3	369,9	63,0	0,0	6.730,8
Bali	8.072,4	1.390,6	140,4	171,3	0,0	9.774,7
Nusa Tenggara Barat	4.447,5	3.372,9	892,3	35,7	0,0	8.748,4
Nusa Tenggara Timur	5.043,3	4.471,1	1.696,6	77,8	0,0	11.288,8
Kalimantan Barat	11.567,8	8.944,4	2.358,0	81,0	0,0	22.951,2
Kalimantan Tengah	14.233,8	15.306,2	870,0	1.020,4	0,0	31.430,4
Kalimantan Selatan	13.377,1	2.515,6	2.082,2	259,4	128,0	18.362,3
Kalimantan Timur	7.347,3	1.613,1	47,5	3,0	0,0	9.010,9
Kalimantan Utara	1.898,0	5.012,5	502,0	8,0	0,0	7.420,5
Sulawesi Utara	8.970,1	6.943,3	285,1	0,0	0,0	16.198,5
Sulawesi Tengah	12.674,8	11.119,3	909,9	5,0	0,0	24.709,0
Sulawesi Selatan	11.908,8	3.592,9	1.324,1	14,1	0,0	16.839,9
Sulawesi Tenggara	8.888,5	3.020,5	501,6	34,9	0,0	12.445,5
Gorontalo	2.968,9	2.630,7	604,5	7,0	0,0	6.211,1
Sulawesi Barat	7.947,5	305,9	327,1	10,6	5,5	8.596,6
Maluku	17.039,5	2.001,9	2.241,1	277,6	3.542,6	25.102,7
Maluku Utara	5.552,8	3.697,3	2.589,4	2.137,8	62,2	14.039,5
Papua Barat	9.746,6	334,8	249,0	298,3	80,0	10.708,7
Papua	14.633,8	5.469,6	3.431,2	1.273,0	2.604,5	27.412,1
Indonesia	307.715,9	168.618,2	46.124,9	9.022,1	6.510,1	537.991,2

Sumber: Subdirektorat Analisa Data dan Pengembangan Sistem, Direktorat Jenderal Bina Marga.



D. Jalan Daerah

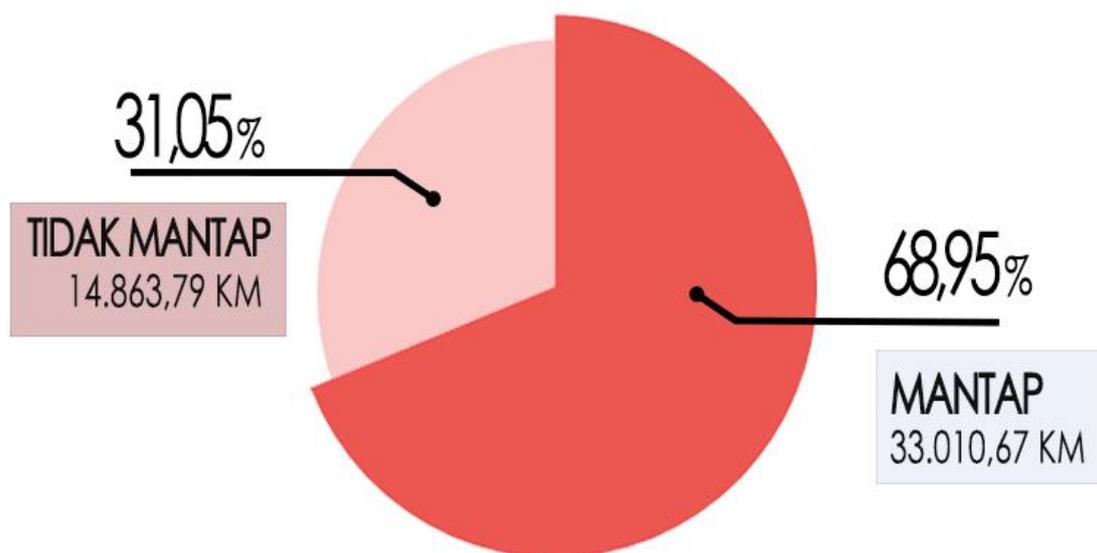
Jalan daerah merupakan jalan yang kewenangan pembinaannya berada ditangan pemerintah daerah. Jalan daerah antara lain jalan provinsi, jalan kota, dan jalan kabupaten. Panjang jalan daerah sering terjadi perubahan, hal ini disebabkan adanya pembangunan jalan baru, perubahan status kewenangan jalan, serta ada beberapa jalan yang belum ditetapkan status kewenangannya. Panjang jalan daerah ditetapkan melalui surat keputusan kepala daerah.

Peran Kementerian PUPR dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Marga selaku penyelenggara jalan adalah memberikan fasilitas kepada penyelenggara jalan daerah berupa pembinaan, sosialisasi, pelatihan, serta bantuan pendanaan. Data jalan daerah diperoleh berdasarkan hasil entri dari daerah. Pengumpulan data jalan daerah dilakukan Direktorat Jenderal Bina Marga terkait dengan pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK).

D.1. Jalan Provinsi

Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis nasional. Pembinaan jalan provinsi menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi/gubernur.

Apabila dilakukan agregasi terhadap kondisi kemantapan jalan provinsi, persentase mantap jalan provinsi Indonesia sebesar 68,95%. Pada Tabel 4.8 dapat dilihat secara rinci kondisi panjang jalan provinsi tahun 2018. Kondisi jalan provinsi di Provinsi Jawa Tengah memiliki kondisi jalan mantap terbaik dengan persentase kemantapan jalan sebesar 98,88%. Sama halnya dengan 2 provinsi lainnya yaitu Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan masing-masing persentase sebesar 98,17% dan 93,03%. Kondisi berbeda terjadi di Provinsi Kalimantan Utara, persentase kemantapan jalan di provinsi ini sebesar 12,15%.



Gambar 4.3 Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Tahun 2018

Tabel 4.9 Kondisi Panjang Jalan Provinsi Tahun 2018

Provinsi	Panjang (km)	Mantap		Tidak Mantap	
		km	%	km	%
Aceh	1.781,72	1.129,51	63,39	652,21	36,61
Sumatera Utara	3.048,50	2.570,22	84,31	478,28	15,69
Sumatera Barat	1.525,20	1.083,68	71,05	441,52	28,95
Riau	2.799,81	1.636,23	58,44	1.163,58	41,56
Jambi	1.032,84	783,44	75,85	249,40	24,15
Sumatera Selatan	1.513,65	1.170,82	77,35	342,84	22,65
Bengkulu	1.562,67	851,60	54,50	711,07	45,50
Lampung	1.693,27	1.304,27	77,03	389,00	22,97
Kepulauan Bangka Belitung	850,99	791,71	93,03	59,28	6,97
Kepulauan Riau	896,45	614,25	68,52	282,20	31,48
DKI Jakarta*)	-	-	-	-	-
Jawa Barat	2.360,58	2.317,49	98,17	43,09	1,83
Jawa Tengah	2.404,74	2.377,70	98,88	27,04	1,12
DI Yogyakarta	760,45	549,50	72,26	210,95	27,74
Jawa Timur	1.421,00	1.283,34	90,31	137,67	9,69
Banten	762,03	627,97	82,41	134,06	17,59
Bali	743,34	621,27	83,58	122,07	16,42
Nusa Tenggara Barat	1.484,43	1.145,51	77,17	338,92	22,83
Nusa Tenggara Timur	2.650,00	1.689,09	63,74	960,92	36,26
Kalimantan Barat	1.534,75	1.282,19	83,54	252,57	16,46
Kalimantan Tengah	1.272,08	676,78	53,20	595,30	46,80



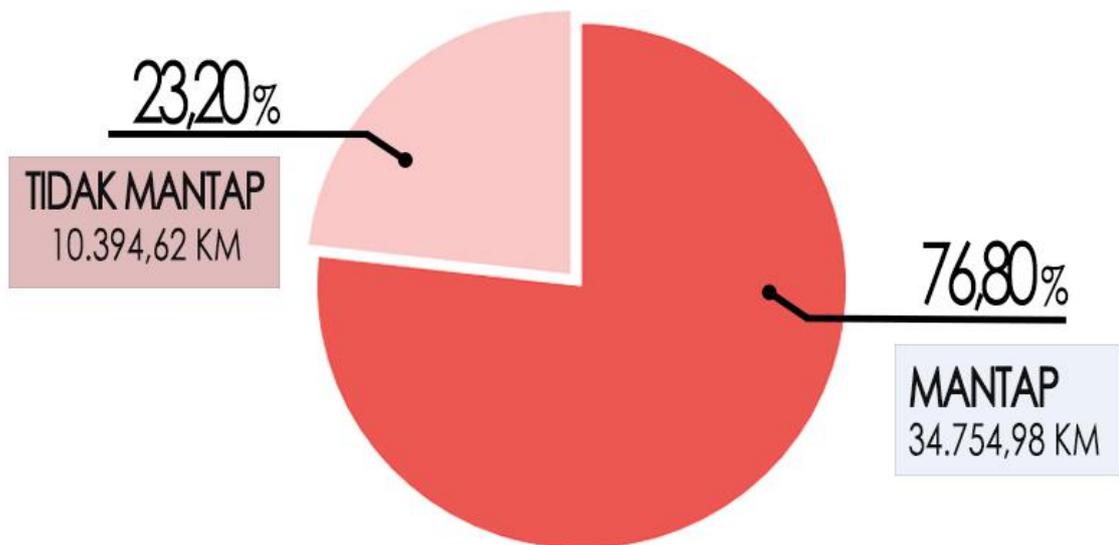
Provinsi	Panjang (km)	Mantap		Tidak Mantap	
		km	%	km	%
Kalimantan Selatan	762,61	541,96	71,07	220,65	28,93
Kalimantan Timur	884,80	457,05	51,66	427,75	48,34
Kalimantan Utara	851,88	103,54	12,15	748,33	87,85
Sulawesi Utara	926,74	660,30	71,25	266,44	28,75
Sulawesi Tengah	1.643,74	1.000,84	60,89	642,90	39,11
Sulawesi Selatan	2.015,23	1.154,16	57,27	861,07	42,73
Sulawesi Tenggara	1.009,28	734,70	72,79	274,58	27,21
Gorontalo	467,17	193,67	41,46	273,50	58,54
Sulawesi Barat	185,96	105,43	56,69	80,54	43,31
Maluku	1.080,30	470,34	43,54	609,96	56,46
Maluku Utara	1.276,80	450,25	35,26	826,56	64,74
Papua Barat	2.309,65	1.460,99	63,26	848,65	36,74
Papua	2.361,76	1.170,87	49,58	1.190,89	50,42
Indonesia					

Sumber : Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah, Status Agustus 2018.
Keterangan: *) Provinsi DKI Jakarta tidak mengajukan DAK pada Kementerian PUPR.

D.2. Jalan Kota

Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota. Wewenang penyelenggaraan jalan kota dilaksanakan oleh pemerintah kota/walikota.

Secara umum kondisi kemantapan jalan kota di Indonesia dalam keadaan baik, dapat dilihat pada Gambar 4.3. Persentase jalan kota mantap secara agregat sebesar 76,80%. Pada Tabel 4.9 dapat dilihat secara terperinci menurut provinsi. Provinsi dengan persentase mantap tertinggi adalah Provinsi Jawa Barat sebesar 92,20%. Dua provinsi lainnya yang memiliki persentase kondisi mantap tinggi adalah Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Timur yaitu masing-masing sebesar 89,77% dan 88,85%. Provinsi dengan persentase kondisi mantap terendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur 51,94%.



Gambar 4.4 Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Kota Tahun 2018

Tabel 4.10 Kondisi Panjang Jalan Kota Tahun 2018

Provinsi	Panjang (km)	Mantap		Tidak Mantap	
		km	%	km	%
Aceh	2.349,61	1.619,78	68,94	729,83	31,06
Sumatera Utara	5.531,90	4.462,20	80,66	1.069,70	19,34
Sumatera Barat	3.437,92	2.471,58	71,89	966,34	28,11
Riau	2.476,14	1.641,53	66,29	834,62	33,71
Jambi	703,18	526,49	74,87	176,69	25,13
Sumatera Selatan	1.905,93	1.449,12	76,03	456,81	23,97
Bengkulu	942,57	763,31	80,98	179,26	19,02
Lampung	961,97	712,63	74,08	249,34	25,92
Kepulauan Bangka Belitung	403,14	326,70	81,04	76,44	18,96
Kepulauan Riau	1.065,99	796,88	74,76	269,10	25,24
DKI Jakarta*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jawa Barat	4.323,89	3.986,70	92,20	337,19	7,80
Jawa Tengah	1.895,55	1.648,51	86,97	247,04	13,03
DI Yogyakarta	233,23	191,09	81,93	42,14	18,07
Jawa Timur	3.469,16	3.082,48	88,85	386,68	11,15
Banten**)	893,00	801,68	89,77	91,32	10,23
Bali	486,16	369,32	75,97	116,85	24,03
Nusa Tenggara Barat	627,95	472,01	75,17	155,94	24,83
Nusa Tenggara Timur	1.574,78	817,89	51,94	756,89	48,06
Kalimantan Barat	705,71	450,91	63,89	254,80	36,11
Kalimantan Tengah	911,83	490,73	53,82	421,11	46,18



Provinsi	Panjang (km)	Mantap		Tidak Mantap	
		km	%	km	%
Kalimantan Selatan	1.345,41	1.020,13	75,82	325,27	24,18
Kalimantan Timur	1.577,82	1.257,29	79,69	320,53	20,31
Kalimantan Utara	225,50	134,34	59,57	91,17	40,43
Sulawesi Utara	1.922,89	1.524,49	79,28	398,40	20,72
Sulawesi Tengah	851,56	601,69	70,66	249,87	29,34
Sulawesi Selatan	1.460,24	1.119,40	76,66	340,84	23,34
Sulawesi Tenggara	887,76	595,07	67,03	292,69	32,97
Gorontalo	237,29	202,79	85,46	34,50	14,54
Sulawesi Barat***)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maluku	620,51	499,40	80,48	121,11	19,52
Maluku Utara	683,22	380,77	55,73	302,45	44,27
Papua Barat	179,41	152,25	84,86	27,16	15,14
Papua	258,36	185,82	71,92	72,54	28,08
Indonesia					

Sumber : Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah, status Agustus 2018.

Keterangan: *) Provinsi DKI Jakarta tidak mengajukan DAK pada Kementerian PUPR.

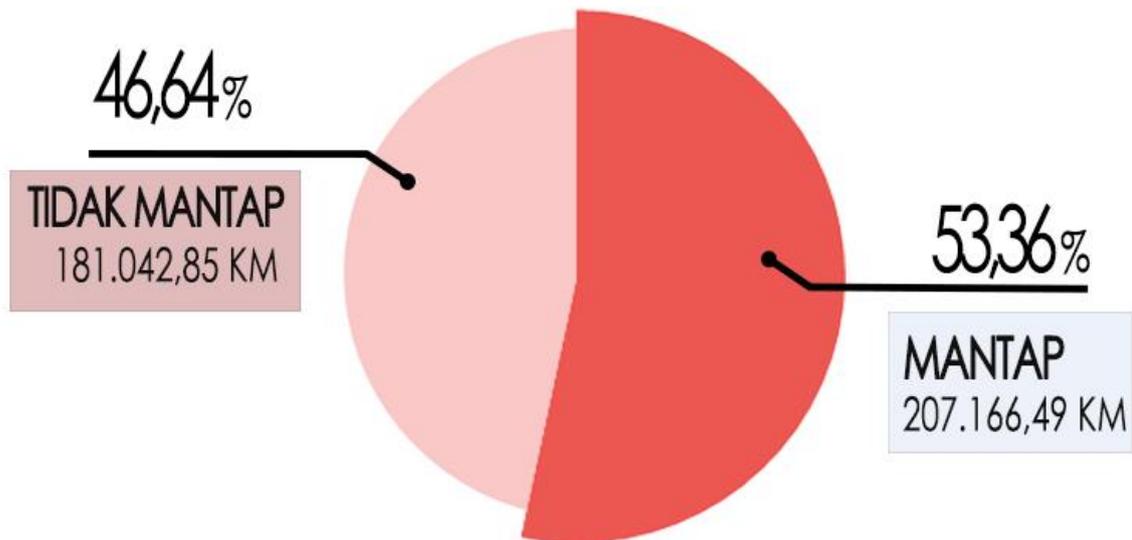
**) Tanpa Kota Tangerang Selatan, tidak mengajukan DAK kepada Kementerian PUPR.

***) Provinsi Sulawesi Barat tidak memiliki kota.

D.3. Jalan Kabupaten

Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. Wewenang pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/bupati. Selain jalan kabupaten, pemerintah kabupaten pun berwenang atas penyelenggaraan jalan desa.

Secara keseluruhan kondisi kematapan jalan kabupaten di Indonesia dalam kondisi mantap, dengan persentase sebesar 53,36%. Pada Tabel 4.10 menampilkan kondisi kematapan jalan kabupaten berdasarkan provinsi. Provinsi dengan persentase mantap jalan tertinggi adalah Provinsi Banten yaitu sebesar 77,51%, diikuti Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat masing-masing sebesar 73,73% dan 72,37%. Sedangkan provinsi dengan persentase kondisi mantap terendah adalah Provinsi Papua Barat yaitu sebesar 29,10%.



Gambar 4.5 Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun 2018

Tabel 4.11 Kondisi Panjang Jalan Kabupaten Tahun 2018

Provinsi	Panjang (km)	Mantap		Tidak Mantap	
		km	%	km	%
Aceh	17.416,66	6.667,72	38,28	10.748,95	61,72
Sumatera Utara	27.552,70	13.183,10	47,85	14.369,61	52,15
Sumatera Barat	15.975,87	7.946,08	49,74	8.029,79	50,26
Riau	17.297,66	8.641,28	49,96	8.656,39	50,04
Jambi	9.485,77	5.611,62	59,16	3.874,16	40,84
Sumatera Selatan	13.747,62	8.730,68	63,51	5.016,94	36,49
Bengkulu	5.940,35	3.152,46	53,07	2.787,89	46,93
Lampung	16.812,18	8.739,78	51,98	8.072,41	48,02
Kepulauan Bangka Belitung	3.525,66	2.543,41	72,14	982,25	27,86
Kepulauan Riau	3.137,00	1.228,16	39,15	1.908,84	60,85
DKI Jakarta*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jawa Barat	18.681,04	13.518,99	72,37	5.162,05	27,63
Jawa Tengah	24.758,09	17.464,19	70,54	7.293,90	29,46
DI Yogyakarta	3.128,38	2.306,43	73,73	821,95	26,27
Jawa Timur	32.286,80	22.216,41	68,81	10.070,39	31,19
Banten	3.163,93	2.452,38	77,51	711,55	22,49
Bali	6.679,91	4.759,69	71,25	1.920,22	28,75
Nusa Tenggara Barat	5.457,08	2.888,61	52,93	2.568,47	47,07
Nusa Tenggara Timur	17.488,75	8.638,02	49,39	8.850,73	50,61
Kalimantan Barat	13.932,94	6.439,86	46,22	7.493,08	53,78



Provinsi	Panjang (km)	Mantap		Tidak Mantap	
		km	%	km	%
Kalimantan Tengah	13.751,22	6.356,85	46,23	7.394,38	53,77
Kalimantan Selatan	10.134,89	5.222,43	51,53	4.912,46	48,47
Kalimantan Timur	9.157,43	4.475,62	48,87	4.681,80	51,13
Kalimantan Utara	2.238,88	1.164,32	52,00	1.074,56	48,00
Sulawesi Utara	5.491,96	2.679,39	48,79	2.812,57	51,21
Sulawesi Tengah	12.039,03	5.484,26	45,55	6.554,77	54,45
Sulawesi Selatan	25.248,15	13.924,83	55,15	11.323,32	44,85
Sulawesi Tenggara	9.639,24	3.794,91	39,37	5.844,33	60,63
Gorontalo	4.020,83	2.219,62	55,20	1.801,21	44,80
Sulawesi Barat	4.722,69	2.348,91	49,74	2.373,77	50,26
Maluku	6.672,38	2.698,92	40,45	3.973,46	59,55
Maluku Utara	4.191,03	1.866,72	44,54	2.324,31	55,46
Papua Barat	8.462,24	2.462,84	29,10	5.999,40	70,90
Papua	15.920,95	5.288,00	33,21	10.632,94	66,79
Indonesia					

Sumber: Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah, Status Agustus 2018
Keterangan: *) Provinsi DKI Jakarta tidak mengajukan DAK pada Kementerian PUPR

PDAM



KONDISI 209 SEHAT

103 KURANG SEHAT

66 SAKIT



SPAM

210.829 L/det
Kap asitas
Terpasang

162.336 L/det
Kap asitas
Produksi



A. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dalam kualitas dan kuantitas yang memadai. Air minum adalah air rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Seiring meningkatnya populasi dan aktivitas manusia, kebutuhan air minum pun meningkat. Hal ini juga memengaruhi ketersediaan dan kualitas air di alam. Untuk itu perlu suatu sistem penyediaan air minum, guna memenuhi kebutuhan air minum masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum menerangkan bahwa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana air minum. Penyelenggaraan SPAM merupakan serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikut proses dasar manajemen untuk menyediakan air minum kepada masyarakat.

SPAM dapat dilakukan melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan. Dalam SPAM jaringan perpipaan, air minum disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan. Sementara SPAM bukan perpipaan air minum disalurkan atau diakses langsung oleh pelanggan tanpa sistem perpipaan. SPAM Jaringan perpipaan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan. Sementara SPAM bukan jaringan perpipaan meliputi sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, bangunan penangkap mata air.

A.1. Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan

Tabel 5.1 dan 5.2 menampilkan data teknis SPAM jaringan perpipaan Tahun 2018. Tercatat kapasitas produksi sebesar 162.336 liter/detik, dengan yang paling tinggi adalah Provinsi Jawa Timur dengan 28.727 liter/detik. Sementara pada Tabel 5.3 dan 5.4 ditampilkan data pelayanannya. Tercatat cakupan pelayanan di Indonesia sebesar 22,57% dengan yang tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta dengan 59,45%.

Tabel 5.1 Data Teknis Sistem Penyediaan Air Minum

Provinsi	Kapasitas Terpasang (liter/detik)	Kapasitas Produksi (liter/detik)	Kapasitas Distribusi (liter/detik)
Aceh	4.176	2.371	1.522
Sumatera Utara	10.703	9.558	8.115
Sumatera Barat	5.040	3.465	3.156
Riau	3.286	1.628	1.280
Jambi	3.150	2.138	1.756
Sumatera Selatan	7.901	8.132	3.850
Bengkulu	1.972	1.505	1.073
Lampung	2.473	1.329	1.146
Kepulauan Bangka Belitung	1.053	578	360
Kepulauan Riau	3.482	2.981	2.603
DKI Jakarta	33.075	26.820	32.231
Jawa Barat	20.255	15.406	13.952
Jawa Tengah	18.977	14.675	13.852
DI Yogyakarta	2.643	1.675	1.377
Jawa Timur	35.342	28.727	18.753
Banten	7.447	6.645	6.037
Bali	5.333	4.352	2.656
Nusa Tenggara Barat	3.117	2.407	2.241
Nusa Tenggara Timur	3.634	1.313	1.162
Kalimantan Barat	4.050	2.616	2.497
Kalimantan Tengah	1.735	1.252	1.139
Kalimantan Selatan	6.045	3.855	3.753
Kalimantan Timur	6.217	5.575	5.256
Kalimantan Utara	1.466	860	612
Sulawesi Utara	2.542	1.903	1.402
Sulawesi Tengah	1.566	1.089	997
Sulawesi Selatan	5.887	3.819	3.668
Sulawesi Tenggara	2.193	1.540	1.488
Gorontalo	473	343	316
Sulawesi Barat	853	510	491
Maluku	1.145	747	594
Maluku Utara	981	820	664
Papua Barat	549	405	346
Papua	2.069	1.296	1.034
Indonesia	210.829	162.336	141.379

Sumber : Data Warehouse Sistem Penyediaan Air Minum, Cipta Karya, 27 Agustus 2018

Tabel 5.2 Data Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (lanjutan)

Provinsi	Kapasitas Air Terjual (liter/detik)	Kapasitas Belum Terpakai (liter/detik)	Kehilangan Air (%)
Aceh	744	1.763	51,14
Sumatera Utara	2.533	947	68,79
Sumatera Barat	1.768	1.733	43,97
Riau	823	1.591	35,68
Jambi	1.107	911	36,96
Sumatera Selatan	2.417	1.696	37,22
Bengkulu	594	555	44,63
Lampung	712	845	37,87
Kepulauan Bangka Belitung	153	305	57,45
Kepulauan Riau	1.784	529	31,48
DKI Jakarta	16.931	6.255	47,47
Jawa Barat	8.429	3.965	39,58
Jawa Tengah	8.824	4.446	36,30
DI Yogyakarta	914	952	33,64
Jawa Timur	10.380	7.224	44,65
Banten	4.200	1.004	30,42
Bali	1.773	880	33,23
Nusa Tenggara Barat	1.405	692	37,30
Nusa Tenggara Timur	801	2.382	31,03
Kalimantan Barat	2.075	922	16,91
Kalimantan Tengah	848	463	25,58
Kalimantan Selatan	2.469	2.159	34,21
Kalimantan Timur	2.797	557	46,78
Kalimantan Utara	402	568	34,21
Sulawesi Utara	560	583	60,05
Sulawesi Tengah	656	528	34,20
Sulawesi Selatan	1.362	1.578	62,86
Sulawesi Tenggara	666	691	55,22
Gorontalo	203	130	35,89
Sulawesi Barat	434	233	11,62
Maluku	343	562	42,30
Maluku Utara	472	161	28,90
Papua Barat	133	172	61,66
Papua	500	777	51,61
Indonesia	80.213	48.761	

Sumber : Data Warehouse Sistem Penyediaan Air Minum, Cipta Karya, 27 Agustus 2018

Tabel 5.3 Data Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum

Provinsi	Jumlah Unit	Sambungan Rumah (unit)	Hidran Umum (unit)
Aceh	108	149.008	1.637
Sumatera Utara	184	482.703	7.079
Sumatera Barat	134	265.608	601
Riau	120	87.363	141
Jambi	96	158.225	278
Sumatera Selatan	257	452.670	181
Bengkulu	56	80.390	91
Lampung	83	91.214	366
Kepulauan Bangka Belitung	80	35.160	235
Kepulauan Riau	42	188.829	109
DKI Jakarta	4	1.381.524	4.348
Jawa Barat	233	1.238.196	29.824
Jawa Tengah	299	1.558.124	13.929
DI Yogyakarta	47	159.346	2.046
Jawa Timur	380	2.270.855	8.744
Banten	68	260.919	248
Bali	43	351.848	2.440
Nusa Tenggara Barat	59	235.175	1.783
Nusa Tenggara Timur	85	106.697	1.249
Kalimantan Barat	99	215.827	520
Kalimantan Tengah	101	101.540	749
Kalimantan Selatan	110	353.787	4.152
Kalimantan Timur	104	280.038	26
Kalimantan Utara	28	43.539	0
Sulawesi Utara	82	75.953	598
Sulawesi Tengah	66	73.397	456
Sulawesi Selatan	163	377.023	2.794
Sulawesi Tenggara	163	95.802	740
Gorontalo	46	35.847	873
Sulawesi Barat	50	41.951	145
Maluku	58	34.144	526
Maluku Utara	36	66.525	475
Papua Barat	24	32.454	271
Papua	108	89.126	137
Indonesia	3.616	11.470.807	87.791

Sumber : Data Warehouse Sistem Penyediaan Air Minum, Cipta Karya, 27 Agustus 2018



Tabel 5.4 Data Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (lanjutan)

Provinsi	Sambungan Komersial Non Domestik	Penduduk Terlayani (Jiwa)	Cakupan Pelayanan (%)
Aceh	50.907	1.027.872	22,87
Sumatera Utara	56.870	2.179.577	16,83
Sumatera Barat	35.581	1.264.320	26,09
Riau	1.052	439.403	7,93
Jambi	15.161	587.550	19,00
Sumatera Selatan	2.218	2.050.913	27,53
Bengkulu	19.915	346.648	20,21
Lampung	5.562	679.493	8,93
Kepulauan Bangka Belitung	7.555	119.131	9,74
Kepulauan Riau	23.797	703.007	41,87
DKI Jakarta	206.575	5.712.259	59,45
Jawa Barat	159.258	7.768.269	18,04
Jawa Tengah	68.820	7.782.936	24,60
DI Yogyakarta	4.939	973.710	28,16
Jawa Timur	29.211	7.546.975	20,62
Banten	4.168	1.202.352	11,31
Bali	33.232	1.676.382	43,09
Nusa Tenggara Barat	18.211	1.016.518	22,67
Nusa Tenggara Timur	3.397	650.500	13,97
Kalimantan Barat	9.294	535.062	12,22
Kalimantan Tengah	9.949	541.736	24,49
Kalimantan Selatan	30.435	1.747.872	48,20
Kalimantan Timur	16.141	1.356.479	44,79
Kalimantan Utara	2.306	262.711	50,07
Sulawesi Utara	10.360	349.785	15,44
Sulawesi Tengah	5.598	452.421	17,17
Sulawesi Selatan	25.914	1.976.403	25,35
Sulawesi Tenggara	492	504.630	22,64
Gorontalo	940	312.499	30,04
Sulawesi Barat	1.463	300.578	25,94
Maluku	5.650	222.877	14,53
Maluku Utara	735	337.868	32,55
Papua Barat	702	169.400	22,28
Papua	6.281	400.289	14,19
Indonesia	872.689	53.198.425	22,57

Sumber : Data Warehouse Sistem Penyediaan Air Minum, Cipta Karya, 27 Agustus 2018

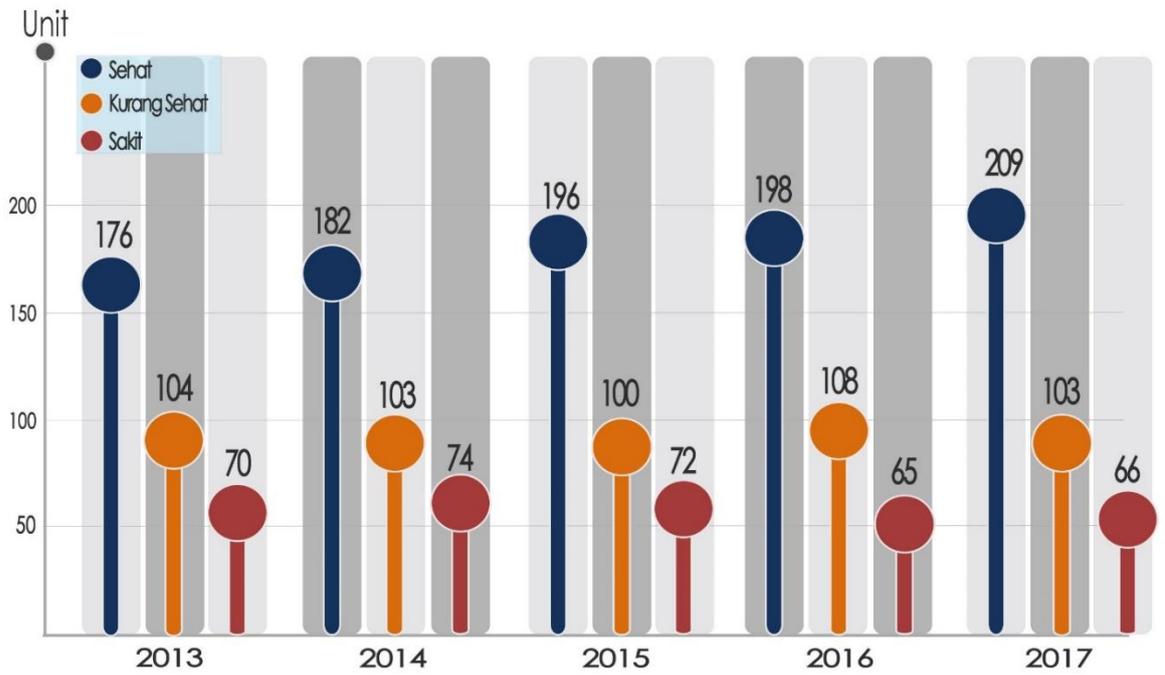
Penyelenggaraan SPAM bisa dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), UPT, UPTD atau badan usaha. Untuk penyelenggaraan yang dilakukan oleh BUMN dan atau BUMD khususnya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), yang sebelumnya bernama Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, melakukan penilaian kinerjanya secara berkala setiap tahunnya. Kinerja tersebut dilakukan dengan menilai 4 aspek, yaitu aspek keuangan, pelayanan, operasional, dan sumber daya manusia. Yang dilakukan penilaian oleh BPPSPAM adalah BUMD penyelenggara SPAM (PDAM), bukan SPAM non PDAM.

Pada Tabel 5.5 dan Gambar 5.1-5.2 terlihat perkembangan kinerja PDAM di Indonesia hasil penilaian BPPSPAM dari tahun 2010 hingga 2017. Jumlah PDAM yang dinilai setiap tahunnya bertambah. Persentase PDAM dalam kondisi sehat menunjukkan peningkatan di tahun 2017, yaitu 55,29% dengan jumlah 209 dari 378 PDAM yang dinilai. Selain jumlah tersebut, masih terdapat 13 PDAM yang belum dapat dinilai kinerjanya dikarenakan berbagai hal.

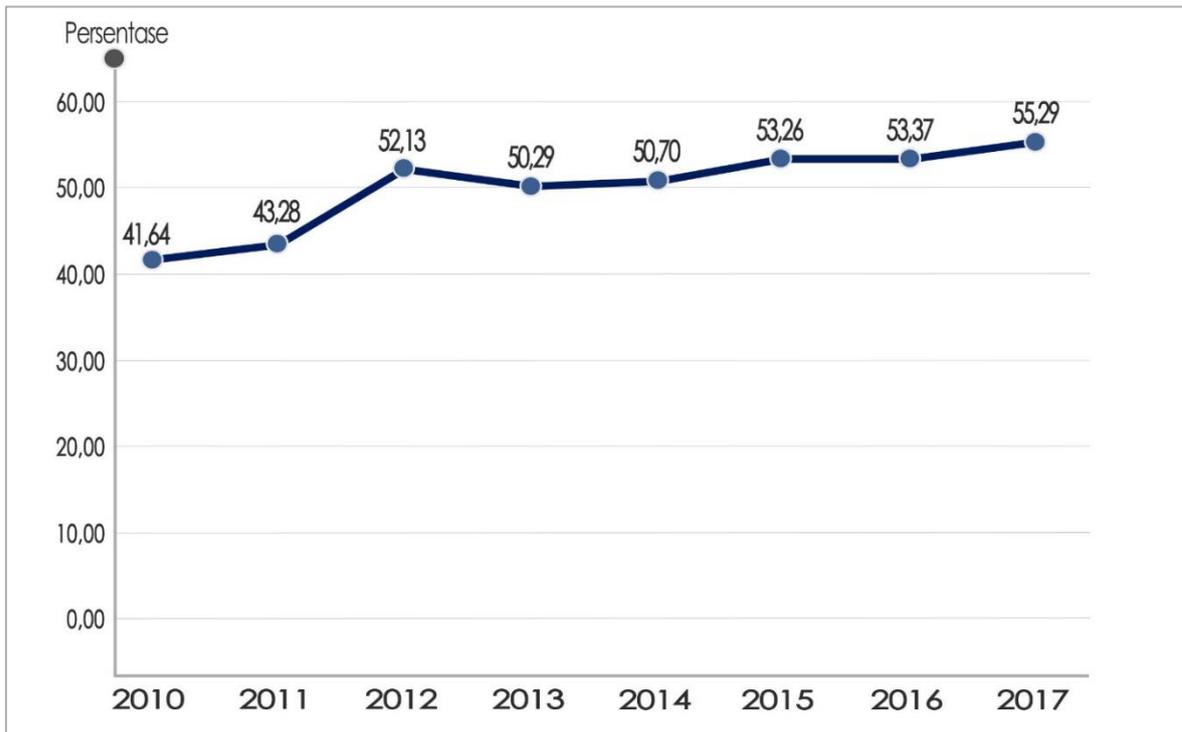
Tabel 5.5 Perkembangan Kinerja PDAM Tahun 2010-2017

Tahun	Kinerja PDAM			Jumlah	Persentase PDAM		
	Sehat	Kurang Sehat	Sakit		Sehat	Kurang Sehat	Sakit
2010	142	129	70	341	41,64	37,83	20,53
2011	145	103	87	335	43,28	30,75	25,97
2012	171	101	56	328	52,13	30,79	17,07
2013	176	104	70	350	50,29	29,71	20,00
2014	182	103	74	359	50,70	28,69	20,61
2015	196	100	72	368	53,26	27,17	19,57
2016	198	108	65	371	53,37	29,11	17,52
2017	209	103	66	378	55,29	27,25	17,46

Sumber : Kinerja PDAM 2012, 2013, 2014, 2017
Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum



Gambar 5.1 Perkembangan Kinerja PDAM Tahun 2013-2017



Gambar 5.2 Persentase PDAM Dalam Kondisi Sehat Tahun 2010-2017

Pada Tabel 5.6. di bawah ini ditampilkan hasil evaluasi kinerja PDAM tahun 2017 menurut provinsi. Sementara pada Tabel 5.7. disajikan data hasil rekapitulasi kapasitas serta jumlah

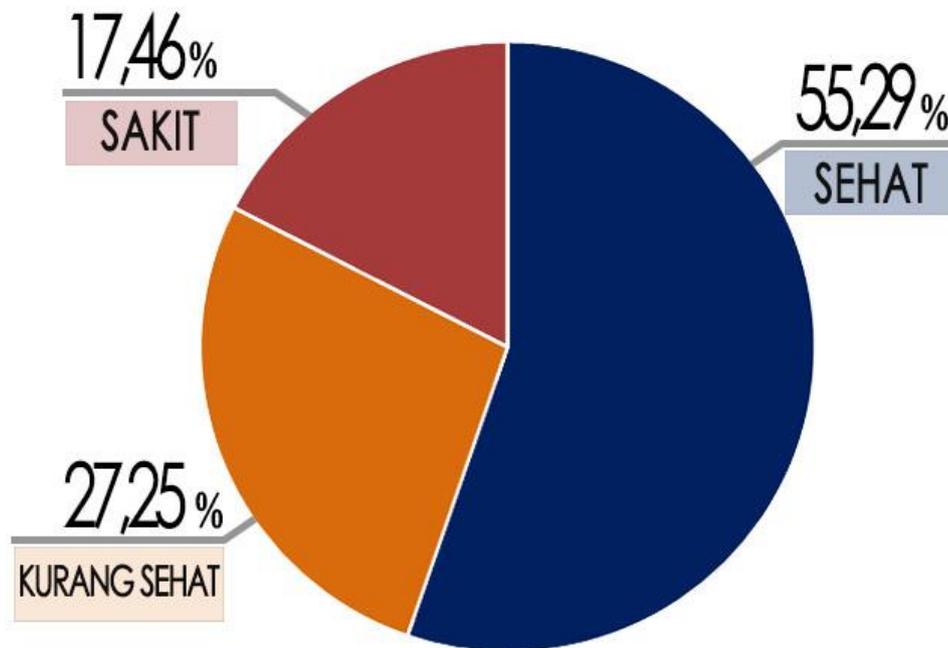


pelanggan dan penduduk terlayani PDAM di masing-masing provinsi di Indonesia. Beberapa provinsi yang proporsi PDAMnya dalam kondisi sakit mencapai setengah atau lebih dari jumlah PDAM yang terdapat di provinsi tersebut antara lain, Riau, Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Papua.

Tabel 5.6 Kinerja PDAM di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2017

Provinsi	Sehat	Kurang Sehat	Sakit	Jumlah
Aceh	3	7	7	17
Sumatera Utara	8	5	5	18
Sumatera Barat	7	9	-	16
Riau	2	1	3	6
Jambi	7	2	-	9
Sumatera Selatan	1	8	4	13
Bengkulu	2	4	1	7
Lampung	3	1	4	8
Kepulauan Bangka Belitung	1	3	2	6
Kepulauan Riau	2	1	1	4
DKI Jakarta	1	-	-	1
Jawa Barat	22	1	-	23
Jawa Tengah	33	2	-	35
DI Yogyakarta	5	-	-	5
Jawa Timur	32	5	1	38
Banten	6	-	-	6
Bali	9	-	-	9
Nusa Tenggara Barat	5	1	2	8
Nusa Tenggara Timur	4	7	4	15
Kalimantan Barat	3	6	4	13
Kalimantan Tengah	5	6	3	14
Kalimantan Selatan	9	3	-	12
Kalimantan Timur	7	2	-	9
Kalimantan Utara	4	-	1	5
Sulawesi Utara	1	4	5	10
Sulawesi Tengah	4	5	-	9
Sulawesi Selatan	10	7	7	24
Sulawesi Tenggara	1	3	6	10
Gorontalo	2	3	-	5
Sulawesi Barat	1	2	1	4
Maluku	3	2	1	6
Maluku Utara	3	2	2	7
Papua Barat	1	1	-	2
Papua	2	-	2	4
Indonesia	209	103	66	378

Sumber : Kinerja PDAM 2017, Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum



Gambar 5.3 Persentase Kinerja PDAM di Indonesia Tahun 2017

Tabel 5. 7 Kapasitas dan Layanan PDAM di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2017

Provinsi	Kapasitas Terpasang (l/det)	Volume Produksi Riil (l/det)	Jumlah Pelanggan (SL)	Jumlah Penduduk di Wilayah Pelayanan (jiwa)	Penduduk Terlayani (jiwa)
Aceh	4.512	2.617	194.997	3.581.310	1.106.999
Sumatera Utara	11.622	10.083	736.814	8.954.722	3.658.307
Sumatera Barat	5.526	3.336	285.732	3.301.649	1.778.971
Riau	1.734	722	61.187	2.053.452	476.531
Jambi	3.328	2.062	170.800	1.728.017	1.083.559
Sumatera Selatan	8.974	5.615	426.593	4.888.490	2.739.687
Bengkulu	1.771	1.196	79.091	898.454	486.622
Lampung	1.602	898	77.200	1.779.098	568.208
Kepulauan Bangka Belitung	1.038	288	21.544	723.429	134.392
Kepulauan Riau	678	494	35.131	520.639	195.698
DKI Jakarta	19.082	18.861	839.393	9.679.267	6.062.927
Jawa Barat	22.839	17.037	1.466.374	26.318.198	10.820.022
Jawa Tengah	21.801	15.340	1.471.885	22.906.959	9.397.367
DI Yogyakarta	2.232	1.505	153.021	2.400.347	1.067.073
Jawa Timur	29.561	21.895	1.765.620	24.133.951	11.035.889

Provinsi	Kapasitas Terpasang (l/det)	Volume Produksi Riil (l/det)	Jumlah Pelanggan (SL)	Jumlah Penduduk di Wilayah Pelayanan (jiwa)	Penduduk Terlayani (jiwa)
Banten	7.945	6.433	258.310	5.929.206	2.897.619
Bali	6.693	5.190	408.048	3.547.712	2.440.263
Nusa Tenggara Barat	3.955	2.772	252.902	3.403.968	1.552.481
Nusa Tenggara Timur	2.756	1.242	133.115	2.565.257	916.614
Kalimantan Barat	3.926	2.565	194.899	3.316.132	1.080.515
Kalimantan Tengah	2.380	1.373	131.764	1.198.452	742.110
Kalimantan Selatan	6.621	3.774	394.862	3.538.101	2.125.081
Kalimantan Timur	7.223	5.911	396.673	3.302.719	2.394.456
Kalimantan Utara	1.538	755	46.861	499.071	288.575
Sulawesi Utara	2.288	1.212	68.851	1.211.360	493.430
Sulawesi Tengah	1.828	925	96.966	1.462.777	600.889
Sulawesi Selatan	8.050	5.684	423.293	5.954.347	2.644.532
Sulawesi Tenggara	1.656	855	82.103	1.383.926	451.122
Gorontalo	1.282	575	64.544	879.776	519.692
Sulawesi Barat	446	319	35.743	601.575	229.296
Maluku	1.248	424	40.121	501.709	280.502
Maluku Utara	1.204	747	66.396	806.717	400.473
Papua Barat	129	121	10.565	163.563	65.560
Papua	1.004	834	40.915	548.753	256.966
Indonesia	198.472	143.660	10.932.313	154.683.103	70.992.428

Sumber : Kinerja PDAM 2017, Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
Catatan : SL = Sambungan Langsung

A.2. Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan

Sebagaimana disampaikan bahwa SPAM dapat dijalankan melalui sistem jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. Bukan jaringan perpipaan meliputi sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, bangunan penangkap mata air. Tabel 5.8 di bawah ini menampilkan jumlah rumah tangga pengguna SPAM bukan jaringan perpipaan menurut provinsi. Rumah tangga pengguna SPAM bukan jaringan perpipaan tertinggi ada di Provinsi Jawa Barat, yaitu lebih dari 12 juta rumah tangga.



Tabel 5.8 Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

Provinsi	BJP (Rumah Tangga)				Jumlah Rumah Tangga
	Sumur Bor/Pompa	Sumur Terlindungi	Mata Air Terlindungi	Air Hujan	
Aceh	98.391	360.962	51.610	7.693	1.196.127
Sumatera Utara	656.885	531.913	167.653	90.100	3.267.415
Sumatera Barat	111.379	272.932	104.377	25.959	1.219.670
Riau	413.038	341.567	13.813	247.442	1.511.499
Jambi	63.993	222.936	8.852	85.258	848.029
Sumatera Selatan	103.490	501.462	32.510	105.733	1.955.419
Bengkulu	41.197	67.706	12.249	755	475.726
Lampung	204.885	639.312	69.840	21.047	2.072.766
Kepulauan Bangka Belitung	70.647	131.566	4.373	1.035	355.310
Kepulauan Riau	8.886	92.255	14.422	8.253	518.881
DKI Jakarta	1.419.168	68.056	496	735	2.631.943
Jawa Barat	3.945.364	1.775.046	782.453	22.515	12.441.287
Jawa Tengah	1.628.833	2.424.205	810.032	65.302	9.100.116
DI Yogyakarta	110.030	541.489	33.790	38.412	1.110.412
Jawa Timur	2.741.749	2.479.158	893.058	58.030	10.676.470
Banten	1.277.224	175.316	46.337	11.859	2.792.850
Bali	292.147	88.363	199.649	36.127	1.118.749
Nusa Tenggara Barat	131.042	383.146	91.487	1.101	1.332.164
Nusa Tenggara Timur	26.759	160.946	207.871	32.903	1.088.577
Kalimantan Barat	51.115	54.866	55.331	429.788	1.129.137
Kalimantan Tengah	130.445	66.512	9.230	46.563	649.073
Kalimantan Selatan	124.305	102.383	8.957	19.887	1.090.869
Kalimantan Timur	80.811	64.594	14.999	32.384	868.363
Kalimantan Utara	12.164	3.550	5.397	48.511	137.604
Sulawesi Utara	103.338	121.203	82.394	8.279	614.771
Sulawesi Tengah	111.191	79.287	110.370	3.891	694.437
Sulawesi Selatan	379.700	308.409	128.055	28.424	1.861.110
Sulawesi Tenggara	68.217	143.347	70.532	9.461	574.156
Gorontalo	28.693	68.373	15.639	117	273.287
Sulawesi Barat	26.699	59.763	11.146	4.937	288.210
Maluku	29.815	63.359	44.639	5.431	349.848
Maluku Utara	5.146	50.667	9.606	8.789	244.145
Papua Barat	26.520	29.359	12.683	27.293	180.109
Papua	66.564	67.489	50.545	140.933	820.835
Indonesia	14.589.830	12.541.497	4.174.395	1.674.947	65.489.364

Sumber : Data Warehouse Sistem Penyediaan Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Agustus 2018

B. Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP)

B.1. Persampahan

Pengelolaan sampah telah diatur dalam undang-undang No. 18 Tahun 2008. Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Jenis sampah yang dikelola yaitu, sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga merupakan sampah hasil kegiatan rumah tangga, tidak termasuk tinja. Sampah sejenis sampah rumah tangga yaitu sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan khusus, kawasan industri, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Sedangkan sampah spesifik adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah dampak dari bencana, puing bongkahan bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, serta sampah yang timbul secara tidak periodik. Sampah-sampah tersebut harus dikelola dengan baik agar tercipta lingkungan hidup yang sehat, sekaligus memperoleh manfaat yang mungkin masih bisa diperoleh dari keberadaannya.

Tempat pemrosesan akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Pemrosesan sampah didahului dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah/volume sampah. Selain itu, penyediaan TPA di kota-kota besar menghadapi kendala keterbatasan lahan. Oleh sebab itu, pengelolaan TPA secara regional menjadi lebih dibutuhkan.

Tabel 5.9 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Menurut Provinsi

Provinsi	Jumlah TPA Sampah	Kapasitas TPA
Aceh	11	950.820,15
Sumatera Utara	1	264.587,00
Sumatera Barat	4	144.475,00
Riau	1	677.440,00
Jambi	6	30.949,75
Sumatera Selatan	1	4.750,64
Bengkulu	7	221.073,20
Lampung	5	1.773.900,00
Kepulauan Bangka Belitung	2	33.966,95
Kepulauan Riau	2	30.000,00
Jawa Barat	11	2.291.109,30
Jawa Tengah	7	458.440,00
DI Yogyakarta	1	252.000,00



Provinsi	Jumlah TPA Sampah	Kapasitas TPA
Jawa Timur	19	1.489.059,70
Banten	11	2.346.554,00
Bali	4	4.014.088,00
Nusa Tenggara Barat	6	455.466,00
Nusa Tenggara Timur	5	560.070,00
Kalimantan Barat	8	166.700,00
Kalimantan Tengah	13	892.145,75
Kalimantan Selatan	13	88.000,00
Kalimantan Timur	4	1.276.500,00
Kalimantan Utara	2	208.940,00
Sulawesi Utara	20	1.861.685,00
Sulawesi Tengah	3	1.017.450,00
Sulawesi Selatan	14	1.068.329,45
Sulawesi Tenggara	10	55.700,00
Gorontalo	3	96.115,00
Sulawesi Barat	5	35.905,00
Maluku	14	2.148.148,00
Maluku Utara	9	198.720,00
Papua Barat	4	105.198,20
Papua	7	137.284,00
Indonesia	233	25.355.570,09

Sumber : Subdit Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
Direktorat Jenderal Cipta Karya

B.2. Pengelolaan Air Limbah

Lingkungan layak huni adalah lingkungan yang sehat. Kondisi lingkungan yang sehat dapat berdampak besar pada aspek kehidupan lainnya. Permasalahan kesehatan lingkungan yang sering muncul di antaranya berkaitan dengan pembuangan limbah. Limbah yang dibuang ke lingkungan harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu, baik limbah air, udara, maupun tanah. Limbah yang tidak melalui proses pengolahan akan merusak sumber air baik air permukaan maupun air tanah, menimbulkan bau tidak sedap, dan dapat merusak tanah.

Untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat maka pemerintah membangun sarana dan prasarana pengolahan limbah. Sistem pengelolaan limbah dilakukan dengan 2 cara yaitu sistem setempat/kawasan (*on site*) dan sistem terpusat (*off site*). Kota-kota besar pada umumnya menggunakan IPAL terpusat, yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya



pencemaran oleh air limbah rumah tangga. Kedala dalam pengembangan IPAL terpusat adalah biaya investasi yang besar, maka dikembangkan pula IPAL kawasan yang dapat melayani daerah perkotaan maupun desa dengan sistem komunal.

Tabel 5.10 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Menurut Provinsi

Provinsi	Jumlah IPAL	Cakupan Pelayanan
Aceh	1	5.000
Sumatera Utara	1	60.000
Sumatera Barat	1	400
Riau	1	200
Sumatera Selatan	3	20.276
Kepulauan Bangka Belitung	2	750
Kepulauan Riau	1	50
Jawa Barat	2	425
Jawa Tengah	10	19.544
DI Yogyakarta	6	10.403
Jawa Timur	4	1.777
Banten	3	450
Bali	6	17.719
Nusa Tenggara Barat	2	1.110
Nusa Tenggara Timur	1	168
Kalimantan Barat	1	173
Kalimantan Tengah	8	897
Kalimantan Selatan	1	200
Kalimantan Timur	2	700
Kalimantan Utara	1	226
Sulawesi Utara	1	100
Sulawesi Tengah	1	150
Sulawesi Selatan	2	325
Sulawesi Tenggara	5	460
Gorontalo	4	800
Sulawesi Barat	12	1.982
Maluku	9	1.884
Maluku Utara	3	700
Papua Barat	2	450
Indonesia		

Sumber : Subdit Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
Direktorat Jenderal Cipta Karya



Penyediaan sanitasi yang layak bagi masyarakat merupakan suatu upaya menciptakan lingkungan yang sehat. Sarana dan prasarana pengelolaan lumpur tinja merupakan salah satu yang terpenting dalam penyediaan sanitasi yang sehat. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki tangki septik yang memenuhi syarat, yaitu kedap air. Tangki septik yang dimiliki masyarakat saat ini perlu dilakukan pemeliharaan/penyedotan dalam 2-3 tahun, apabila tidak maka dapat mencemari air tanah.

Tabel 5.11 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Menurut Provinsi

Provinsi	Jumlah IPLT	Cakupan Pelayanan
Aceh	16	132.359
Sumatera Utara	2	24.000
Sumatera Barat	2	4.165
Riau	4	10.400
Jambi	6	36.000
Sumatera Selatan	1	12.500
Bengkulu	3	86.213
Lampung	8	13.900
Kepulauan Bangka Belitung	5	17.500
Kepulauan Riau	3	33.563
Jawa Barat	3	462.476
Jawa Tengah	13	127.000
DI Yogyakarta	2	15.900
Jawa Timur	8	216.000
Banten	2	35.167
Bali	5	4.848
Nusa Tenggara Barat	3	108.002
Kalimantan Barat	1	2.000
Kalimantan Tengah	8	585.237
Kalimantan Selatan	4	60.000
Kalimantan Timur	1	85.000
Kalimantan Utara	1	2.800
Sulawesi Utara	8	326.583
Sulawesi Tengah	1	3.000
Sulawesi Selatan	11	91.970
Sulawesi Tenggara	2	52.459
Gorontalo	1	200
Sulawesi Barat	5	25.470
Maluku	4	32.379
Maluku Utara	8	147.335
Papua Barat	5	16.250
Papua	4	46.000
Indonesia		

Sumber : Subdit Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
Direktorat Jenderal Cipta Karya



C. Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP)

Sesuai dengan agenda Nawacita yang diusung oleh Pemerintah, terdapat 2 poin yang berkaitan dengan pengembangan permukiman. Yang pertama yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, dan yang kedua adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Agenda tersebut diwujudkan melalui penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang mendukung pengembangan ekonomi di kawasan pinggiran dan perdesaan, membangun perumahan dan kawasan permukiman dengan fokus pada permukiman kumuh, pelayanan air minum, pelayanan sanitasi, keselamatan bangunan dan gedung, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur.

Permukiman layak huni didefinisikan sebagai lingkungan tempat tinggal sekaligus tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, digunakan tiga strategi pendekatan, yaitu membentuk sistem yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang, memberikan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) sebagai nahkoda pembangunan dan pengembangan permukiman di daerah, serta memberdayakan komunitas dan para pemangku kepentingan.

Pembangunan infrastruktur permukiman pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 tujuan strategis, yaitu :

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan desa, dengan tujuan meningkatkan peran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan akses infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi lokal.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan memperluas lapangan kerja.
- 3) Meningkatkan kualitas lingkungan, dengan tujuan mengurangi luasan kawasan kumuh, meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan permukiman dan meningkatkan pelayanan infrastruktur permukiman.

C.1. Kawasan Permukiman Perkotaan

Terdapat 2 strategi penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman perkotaan. Yang pertama ditujukan untuk pembangunan perkotaan, dijalankan dengan melakukan



pengembangan kawasan perkotaan yang menunjang pengembangan perkotaan yang sudah ada maupun pembangunan kawasan permukiman baru dalam rangka membentuk struktur ruang, serta pelayanan infrastruktur permukiman perkotaan yang memenuhi standar pelayanan baik kualitas maupun kuantitas. Yang kedua ditujukan bagi pembangunan kawasan permukiman, dilakukan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh baru dan meningkatkan kualitas permukiman.

Pembangunan permukiman perkotaan menghadapi permasalahan rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman sehingga menyebabkan rendahnya kualitas permukiman dan kehidupan penghuninya. Dari identifikasi yang dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya, diketahui di Indonesia terdapat permukiman kumuh dengan luas mencapai 38.431 ha yang tersebar di 4.108 kawasan. Kawasan kumuh muncul sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang salah satunya dipicu oleh laju urbanisasi. Pertumbuhan penduduk ini tidak mampu diimbangi oleh ketersediaan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak sehingga memicu tumbuhnya jumlah penduduk yang tinggal di daerah kumuh. Selain itu, penanganan kawasan kumuh memerlukan koordinasi lintas sektor dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Diperlukan SK Bupati/Walikota tentang permukiman kumuh sebagai acuan dalam memadukan upaya penanganan permukiman kumuh.

Terdapat 7 kriteria dalam lingkup keciptakaryaan yang menjadi indikator permukiman dikatakan kumuh atau tidak, yaitu pemenuhan pelayanan air bersih perpipaan, pelayanan pengolahan air kotor, drainase dan pengendalian banjir, pemadam kebakaran, ruang terbuka hijau, pengelolaan persampahan, dan penanggulangan bencana. Kriteria tersebut bersama dengan beberapa kriteria dari aspek lainnya menjadi bagian dari kriteria kota layak huni.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dijelaskan mengenai pencegahan, peningkatan kualitas dan pengelolaan permukiman kumuh. Pencegahan dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru, yang terdiri atas pengawasan dan pengendalian berkaitan dengan kesesuaian perizinan, standar teknis, dan peraturan perundang-undangan. Peningkatan kualitas kawasan kumuh



didahului dengan penetapan lokasi kumuh dan dilakukan melalui pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali. Kemudian pengelolaan dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas permukiman secara berkelanjutan oleh masyarakat secara swadaya atau difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Berikut ini adalah kota-kota yang menjadi prioritas untuk mendapat penanganan permukiman kumuh perkotaan dari Kementerian PUPR.

Tabel 5.12 Lokasi Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

Kabupaten/Kota	Provinsi
Kota Batam	Kepulauan Riau
Kota Palembang	Sumatera Selatan
Kota Bogor	Jawa Barat
Kota Bandung	Jawa Barat
Kota Semarang	Jawa Tengah
Kota Surakarta	Jawa Tengah
Kota Yogyakarta	DI Yogyakarta
Kota Malang	Jawa Timur
Kota Surabaya	Jawa Timur
Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan
Kota Makasar	Sulawesi Selatan
Kota Palu	Sulawesi Tengah
Kota Mataram	Nusa Tenggara Barat
Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur
Kota Sorong	Papua Barat
Lhokseumawe	Aceh
Kota Medan	Sumatera Utara
Kota Bandar Lampung	Lampung
DKI Jakarta	DKI Jakarta
Kota Cirebon	Jawa Barat
Kota Tegal	Jawa Tengah
Kota Pekalongan	Jawa Tengah
Kota Balikpapan	Kalimantan Timur
Kota Samarinda	Kalimantan Timur
Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah
Kota Pontianak	Kalimantan Barat
Kota Manado	Sulawesi Utara



Kabupaten/Kota	Provinsi
Kota Kendari	Sulawesi Tenggara
Kota Ambon	Maluku
Kota Jayapura	Papua

Sumber : Paparan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman “Peran Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Layak Huni dan Berkelanjutan”

C.2. Kawasan Permukiman Perdesaan

Beberapa isu strategis dan yang menjadi tantangan pembangunan kawasan permukiman perdesaan adalah adanya kesenjangan antar wilayah, baik kesenjangan pertumbuhan ekonomi maupun persebaran penduduk; belum seimbang nya pembangunan perdesaan dan perkotaan; tingginya angka kemiskinan dan pengangguran; kurang optimalnya pengelolaan potensi sumber daya, serta minimnya kualitas pelayanan infrastruktur di kawasan permukiman perdesaan.

Kawasan perdesaan memiliki beragam potensi seperti potensi sumber daya alam (pertanian dan perkebunan, perikanan, dan pariwisata), sumber daya manusia (budaya, kearifan lokal, dan kewirausahaan) yang apabila dikelola secara optimal akan mampu meningkatkan kualitas kawasan permukiman perdesaan sekaligus mensejahterakan masyarakatnya. Oleh sebab itu, penanganan kawasan perdesaan dilakukan dengan konsep pengembangan kawasan strategis kabupaten (KSK). Pengembangan KSK dilakukan untuk memperkuat ekonomi setempat, di antaranya melalui pengembangan komoditas unggulan, pemberdayaan pelaku usaha masyarakat, penyediaan permodalan pengembangan komoditas unggulan dan usaha lokal, dan penguatan kelembagaan pengelola KSK. Selain itu, dalam pengembangan KSK juga dilakukan penyediaan infrastruktur dasar wilayah seperti pendidikan, kesehatan, energi, air bersih dan sanitasi, transportasi, dan pelayanan publik. Berbagai kegiatan tersebut diharapkan dapat membuka peluang penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat di perdesaan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan dan pada akhirnya dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah.



C.3. Kawasan Permukiman Khusus

Penyelenggaraan permukiman khusus pada dasarnya merupakan bagian dari penyelenggaraan permukiman perkotaan dan perdesaan, namun memiliki karakter khusus, seperti kawasan perbatasan, kawasan pulau-pulau kecil terluar, kawasan rawan bencana, kawasan pasca bencana, dan kawasan permukiman tertentu yang ditetapkan melalui undang-undang.

Kawasan Permukiman Perbatasan

Kawasan perbatasan merupakan bagian dari wilayah NKRI yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan termasuk pulau-pulau kecil terluar memiliki nilai strategis dalam menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara serta mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu, kawasan perbatasan juga menjadi wajah terdepan dan representasi bangsa sekaligus pintu gerbang keluar dan masuknya manusia dan barang.

Pengembangan kawasan perbatasan dilakukan dengan membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan pengembangan infrastruktur pendukung di sekitarnya. PLBN Terpadu merupakan pos pemeriksaan orang dan barang keluar masuk batas wilayah negara. Fungsi yang dijalankan oleh PLBN antara lain keimigrasian, kepabeanan, karantina, keamanan, serta fungsi-fungsi lain yang diperlukan. Infrastruktur yang terdapat di PLBN meliputi gedung PLBN, bangunan pemeriksaan terpadu, bangunan *check point*, koridor pejalan kaki, klinik, wisma Indonesia, tempat ibadah, mess karyawan, dan lain-lain. Sementara pengembangan infrastruktur pendukung di wilayah perbatasan meliputi penyediaan jaringan transportasi, air minum, drainase, pengolahan limbah, serta persampahan. Dengan adanya pembangunan ini diharapkan adanya pengikatan ekonomi, pertahanan, keamanan, dan sumber daya manusia di wilayah perbatasan; tercipta kelembagaan lintas batas negara yang terpadu; serta peningkatan kerjasama dengan negara tetangga.

Pada periode 2015-2019, kawasan perbatasan yang menjadi prioritas untuk mendapat penanganan meliputi 13 provinsi, 41 kabupaten/kota dan 187 kecamatan. Untuk pembangunan PLBN dimulai pada tahun 2015 di 7 lokasi yang terletak di 3 provinsi. Di Provinsi Kalimantan Barat terdapat tiga lokasi yaitu, Entikong, Nanga Badau, dan Aruk.



Tiga lokasi PLBN yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu, Mota'ain, Motamasin, dan Wini. Satu PLBN lainnya terdapat di Provinsi Papua yaitu Skouw.

Selain pembangunan PLBN, dilakukan pula pengembangan infrastruktur permukiman (PIP) di 9 kawasan, yaitu Entikong, Nanga Badau, Aruk, Mota'ain, Motamasin, Wini, Skouw, Sebatik Tengah, dan Long Apari.

Tabel 5.13 Pos Lintas Batas Negara

Lokasi	Kota/Kabupaten	Provinsi	Luas Lahan (ha)	Luas Bangunan (m ²)
Entikong	Sanggau	Kalimantan Barat	8,03	19.493,00
Nanga Badau	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	8,80	7.619,00
Aruk	Sambas	Kalimantan Barat	9,10	4.118,00
Motaain	Belu	Nusa Tenggara Timur	8,03	8.554,12
Motamasin	Malaka	Nusa Tenggara Timur	11,29	3.077,88
Wini	Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur	4,42	5.025,68
Skouw	Jayapura	Papua	10,70	7.619,00

Sumber : Booklet Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu, Direktorat Jenderal Cipta Karya

Tabel 5.14 Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kawasan Perbatasan

Kawasan	Kabupaten/Kota	Provinsi
Entikong	Sanggau	Kalimantan Barat
Nanga Badau	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat
Aruk	Sambas	Kalimantan Barat
Mota'ain	Belu	Nusa Tenggara Timur
Motamasin	Malaka	Nusa Tenggara Timur
Wini	Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur
Skouw	Jayapura	Papua
Sebatik Tengah	Nunukan	Kalimantan Utara
Long Apari	Mahakam Hulu	Kalimantan Timur

Sumber : Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya



Kawasan Permukiman Pulau-Pulau Kecil Terluar

Pulau-pulau kecil terluar merupakan pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. Dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dijelaskan bahwa pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atas sama dengan 2.000 km² beserta dengan kesatuan ekosistemnya.

Dalam Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar terdapat 111 pulau sebagai pulau-pulau kecil terluar yang menjadi pagar terdepan Indonesia. Pulau-pulau tersebut ada yang dihuni oleh penduduk dan ada yang tidak.

Pulau-pulau kecil terluar memiliki nilai strategis nasional untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasana. Selain itu, pengembangan kawasan permukiman dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan berkelanjutan serta memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Kawasan Permukiman Rawan dan Pasca Bencana

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dijelaskan bahwa bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologi.

Indonesia merupakan negeri yang rawan bencana alam karena berada di jalur gunung berapi teraktif di dunia, yaitu Cincin Api Pasifik. Selain itu, wilayah Indonesia terdiri atas tiga tumpukan lempeng benua yang aktif, yaitu lempeng Austronesia, Asia, dan Pasifik. Oleh sebab itu perkembangan permukiman di Indonesia tidak dapat lepas dari mempertimbangkan kondisi yang tidak dapat dihindari tersebut. Meskipun demikian, dengan berbagai penanganan diharapkan dapat meminimalisir jumlah kerugian yang mungkin timbul bencana.

Strategi yang dapat dilakukan untuk penanganan risiko pada daerah rawan bencana adalah:



- Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan sektoral dan wilayah
- Penyediaan kajian dan peta risiko untuk perencanaan pembangunan
- Penyusunan RPJMD dan RTRWP/K yang sensitif terhadap risiko bencana
- Penyediaan dan operasionalisasi sistem peringatan dini
- Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan
- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan terhadap bencana
- Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Sementara apabila sudah terjadi bencana, maka yang dapat dilakukan adalah penanganan pasca bencana, yaitu melalui :

- Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah
- Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan terhadap bencana
- Perkuatan kapasitas manajemen penanggulangan bencana pada fase pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana dan peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat
- Partisipasi dan peran serta multi pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Masyarakat dan pemerintah harus memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan agar dapat melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana, baik dengan memperkecil ancaman kawasan, mengurangi kerentanan, serta meningkatkan kapasitas kawasan yang terancam.

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

Direktorat Jenderal Cipta Karya juga mendukung pelaksanaan proyek strategis percepatan pembangunan infrastruktur di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.



Dukungan penanganan permukiman di kawasan strategis pariwisata dilakukan untuk pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yang aman, nyaman, menarik, mudah dijangkau, berwawasan lingkungan, serta dapat meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan juga masyarakat. Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata diarahkan untuk pengembangan perintisan DPN, peningkatan kualitas dan daya saing, serta pengendalian bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung. Penyediaan prasarana umum yang menjadi bagian dari tugas Direktorat Jenderal Cipta Karya di DPN meliputi jaringan air bersih dan sistem pengelolaan limbah. Sementara prasarana umum yang menjadi tugas instansi lain meliputi jaringan listrik dan lampu penerangan serta jaringan telekomunikasi.

Berikut ini merupakan 10 KSPN yang menjadi prioritas untuk ditangani dimulai dari perencanaan di tahun 2016 hingga pelaksanaan fisik di tahun 2017-2018.

Tabel 5.15 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas

Kawasan	Provinsi
Danau Toba	Sumatera Utara
Tanjung Kelayang	Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Seribu	DKI Jakarta
Tanjung Lesung	Banten
Borobudur	Jawa Tengah
Bromo Tengger Semeru	Jawa Timur
Mandalika	Nusa Tenggara Barat
Labuan Bajo	Nusa Tenggara Timur
Wakatobi	Sulawesi Tenggara
Morotai	Maluku Utara

Sumber : Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya

Kawasan Permukiman Nelayan/Tepi Air

Penataan kampung nelayan merupakan program yang diinisiasi oleh Presiden RI pada tahun 2015. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan permukiman pesisir berbasis ekonomi perikanan di berbagai lokasi di Indonesia.



Terdapat 11 kawasan permukiman nelayan/tepi air yang berpotensi menjadi percontohan di setiap pulau besar. Kawasan percontohan ini diharapkan dapat menghasilkan strategi inovatif untuk dikembangkan sebagai acuan pengembangan permukiman pesisir berbasis ekonomi perikanan. Pada kawasan percontohan ini dilaksanakan pengembangan secara bertahap yang direncanakan selesai pada tahun 2019. Berikut ini 11 kawasan tersebut :

Tabel 5.16 Kawasan Permukiman Nelayan/Tepi Air Percontohan

Kawasan	Kabupaten/Kota	Provinsi
Kampung Nelayan Indah	Kota Medan	Sumatera Utara
Kampung Sumber Jaya	Kota Bengkulu	Bengkulu
Kampung Nelayan Tegalsari	Kota Tegal	Jawa Tengah
Kampung Tambak Lorok	Kota Semarang	Jawa Tengah
Kampung Moro Demak	Demak	Jawa Tengah
Kampung Karangsong	Indramayu	Jawa Tengah
Kampung Nelayan Oesapa	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur
Kampung Beting	Kota Pontianak	Kalimantan Barat
Kampung Kuin	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan
Kampung Nelayan Untia	Kota Makassar	Sulawesi Selatan
Kampung Hamadi	Kota Jayapura	Papua

Sumber : Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya

D. Bina Penataan Bangunan (BPB)

D.1. Pengembangan Kota Hijau

Kota hijau merupakan kota yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya, seperti air dan energi secara efektif dan efisien, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, mensinergikan lingkungan alami dan buatan berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan menjadi strategi perencanaan pembangunan untuk menjamin daya dukung lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.



Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang secara tegas mengamankan 30% dari wilayah kota berwujud Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Pengalokasian 30% RTH ini ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang RTRW Kota dan RTRW Kabupaten.

Sejak tahun 2011, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang menginisiasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) sebagai bentuk implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota/Kabupaten. Untuk mewujudkan kota hijau melalui P2KH, diterapkan sub-sistem lingkungan yang diistilahkan dengan 8 (delapan) atribut Kota Hijau, yaitu :

- 1) perencanaan dan perancangan kota yang ramah lingkungan
- 2) ketersediaan ruang terbuka hijau
- 3) peningkatan peran masyarakat sebagai komunitas hijau
- 4) pengelolaan sampah ramah lingkungan
- 5) pengelolaan air yang efektif
- 6) penerapan sistem transportasi yang berkelanjutan
- 7) konsumsi energi yang efisien
- 8) bangunan hijau.

P2KH menjadi bentuk tanggung jawab yang Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR) bersama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten untuk mewujudkan ruang perkotaan yang lebih berkualitas melalui perencanaan yang baik dan perwujudan delapan atribut kota hijau sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan sebagai upaya untuk menjawab tantangan perubahan iklim. Dimulai sejak 2011, saat ini P2KH telah mencakup sebanyak 187 kota dan kabupaten di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun anggaran 2017, peserta P2KH ada sebanyak 9 kabupaten/kota yang merupakan penjangkaran tahun 2016 dan 14 kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi lanjutan dari tahun sebelumnya.

Tabel 5.17 Kabupaten/Kota Program Pengembangan Kota Hijau Tahun 2017

Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kegiatan			Satus Kepesertaan
		Pembangun- an RTH (fisik)	Perencana- an RTH	Peta & Aksi Komunitas Hijau, Festival Hijau	
Aceh	Kota Sabang	<input type="checkbox"/>			MOU 2015
Sumatera Barat	Dharmasraya	<input type="checkbox"/>			MOU 2015
Jambi	Bungo	<input type="checkbox"/>			MOU 2015



Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kegiatan			Satus Kepesertaan
		Pembangun- an RTH (fisik)	Perencana- an RTH	Peta & Aksi Komunitas Hijau, Festival Hijau	
Kepulauan Bangka Belitung	Bangka Tengah	<input type="checkbox"/>			MOU 2012
Sumatera Selatan	Kota Palembang	<input type="checkbox"/>			MOU 2015
Sumatera Selatan	Muara Enim	<input type="checkbox"/>			MOU 2014
Bengkulu	Kota Bengkulu	<input type="checkbox"/>			MOU 2015
Jawa Timur	Kota Surabaya	<input type="checkbox"/>			MOU 2015
Kalimantan Selatan	Banjar	<input type="checkbox"/>			MOU 2015
Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	<input type="checkbox"/>			MOU 2014
Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	<input type="checkbox"/>			MOU 2015
Sulawesi Utara	Minahasa Utara	<input type="checkbox"/>			MOU 2014
Sulawesi Selatan	Gowa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MOU 2015
Sulawesi Tengah	Palu	<input type="checkbox"/>			MOU 2011
Jawa Tengah	Klaten		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MOU 2016
Jawa Tengah	Batang		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MOU 2016
Kalimantan Selatan	Barito Kuala		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MOU 2016
Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru		<input type="checkbox"/>		MOU 2015
Kalimantan Barat	Landak		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MOU 2016
Kalimantan Timur	Kota Samarinda		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MOU 2016
Bali	Tabanan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MOU 2016
Bali	Kota Denpasar		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MOU 2016
Papua Barat	Kota Sorong		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MOU 2016

Sumber : Panduan Penyelenggaraan P2KH, Bina Penataan Bangunan
Direktorat Jenderal Cipta Karya

D.2. Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka

Aset pusaka merupakan rekam jejak sejarah bangsa Indonesia, dari era kerajaan nusantara hingga setelah memperoleh kemerdekaan bangsa. Aset-aset tersebut memiliki nilai kearifan lokal yang otentik dan amat penting keberadaannya. Oleh sebab itu, negara



bertanggung jawab untuk menjaga kelestariannya. Kota Pusaka adalah kota yang di dalamnya terdapat kawasan cagar budaya dan atau bangunan cagar budaya yang memiliki nilai-nilai penting bagi kota, menempatkan penerapan kegiatan penataan dan pelestarian aset pusaka sebagai strategi utama pengembangan kotanya.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya disebutkan bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Sejalan dengan peraturan tersebut, Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sudah lebih dulu menyatakan bahwa bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar budaya harus dilindungi dan dilestarikan. Dan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyiratkan pentingnya memperhatikan nilai budaya dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Di tahun pertama pelaksanaan program ini, sebanyak 29 kota/kabupaten menyatakan diri sebagai Kota Pusaka, dengan menandatangani Piagam Komitmen Kota Pusaka dan menyusun Rencana Aksi Kota Pusaka. Dengan ditandatanganinya Piagam Komitmen Kota Pusaka di 2017 oleh 5 kabupaten, maka saat ini sudah 58 kabupaten/kota yang ikut serta dalam program ini. Dan di tahun ke-5 pelaksanaannya, selain sudah membuat Rencana Aksi Kota Pusaka, kabupaten/kota anggota P3KP sudah menyusun perencanaan penataan Kota Pusaka, beberapa bahkan sudah melakukan penataan fisik kawasan-kawasan pusaka di kotanya. Untuk mewujudkan Rencana Aksi Kota Pusaka tentunya dibutuhkan dukungan berbagai pihak, baik berupa pendanaan maupun partisipasi lainnya. Selain pemerintah dan pemerintah daerah, seluruh komponen masyarakat, LSM, praktisi, pemerhati, pengusaha, harus dilibatkan dalam gerakan ini.

Tabel 5.18 Anggota Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka

Provinsi	Kabupaten/Kota	Tahun Mulai
Aceh	Kota Banda Aceh	2012
Sumatera Barat	Kota Sawahlunto	2012
Sumatera Selatan	Kota Palembang	2012
Jawa Barat	Kota Bogor	2012
Jawa Tengah	Kota Semarang	2012
DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta	2012
Bali	Kota Denpasar	2012



Provinsi	Kabupaten/Kota	Tahun Mulai
Bali	Karangasem	2015
Sulawesi Tenggara	Kota Baubau	2012
Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	2012
Maluku Utara	Kota Ternate	2012
Sumatera Utara	Kota Medan	2012
Sumatera Barat	Kota Bukittinggi	2012
Kepulauan Bangka Belitung	Bangka Barat	2012
Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang	2012
Jawa Barat	Kota Cirebon	2012
Jawa Tengah	Kota Pekalongan	2012
Jawa Tengah	Kota Surakarta	2012
Jawa Tengah	Cilacap	2012
Jawa Tengah	Banjarnegara	2012
Jawa Tengah	Batang	2012
Jawa Tengah	Boyolali	2012
Jawa Tengah	Brebes	2012
Jawa Tengah	Rembang	2012
Jawa Tengah	Kota Salatiga	2012
Jawa Tengah	Kota Tegal	2012
Jawa Timur	Kota Blitar	2012
Jawa Timur	Ngawi	2012
Jawa Timur	Kota Malang	2012
Jambi	Kota Sungai Penuh	2014
Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu Timur	2014
Bengkulu	Kota Bengkulu	2014
Banten	Kota Tengerang Selatan	2014
Banten	Kota Tangerang	2014
Jawa Tengah	Kebumen	2014
Jawa Tengah	Temanggung	2014
Jawa Tengah	Purworejo	2014
Jawa Tengah	Purbalingga	2014
Jawa Tengah	Wonosobo	2014
Jawa Timur	Kota Probolinggo	2014
Kalimantan Barat	Kota Singkawang	2014
Sulawesi Selatan	Kota Palopo	2014
Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	2014

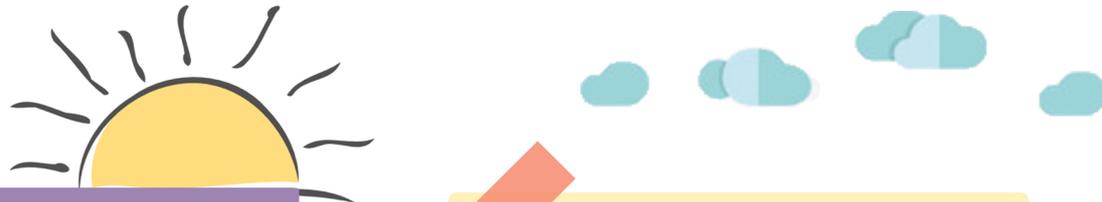


Provinsi	Kabupaten/Kota	Tahun Mulai
Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	2014
Maluku Utara	Tidore Kepulauan	2014
Kalimantan Selatan	Balangan	2015
Kalimantan Selatan	Tabalong	2015
Kalimantan Selatan	Banjar	2015
Sulawesi Selatan	Takalar	2015
Bali	Gianyar	2015
Kepulauan Riau	Lingga	2015
Gorontalo	Kota Gorontalo	2015
Jawa Timur	Kota Pasuruan	2015
Riau	Siak	2017
Sumatera Barat	Tanah Datar	2017
Kalimantan Barat	Sambas	2017
Jawa Timur	Sumenep	2017
Sulawesi Tengah	Parigi Moutong	2017

Sumber : Panduan Pelaksanaan P3KP 2016, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR
ciptakarya.pu.go.id, dan Berita PUPR "Lima Kabupaten Tandatangani Piagam Kota Pusaka"

**BAB
6**

STATISTIK INFRASTRUKTUR PERUMAHAN



Rumah Susun (unit)
6.142



Rumah Swadaya (unit)
112.936



112.936



Rumah Umum & Komersial (unit)
18.853



Rumah Khusus
4.976 (unit)



Rumah (papan) merupakan kebutuhan primer manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Dalam UU tersebut dijelaskan pula, penyelenggaraan perumahan dan permukiman meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak huni maka pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR selaku penanggung jawab penyelenggaraan perumahan meluncurkan beberapa program bantuan pembangunan sarana dan prasarana perumahan. Program-program yang tersebut antara lain pembangunan rumah susun, rumah khusus, bantuan pembangunan fasilitas pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), bantuan pembiayaan perumahan, dan bantuan stimulus rumah swadaya (peningkatan kualitas dan pembangunan baru).

A. Rumah Susun (Rusun)

Untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan perumahan dan permukiman yang dapat terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan atau untuk memenuhi tuntutan atau pemenuhan pola hidup modern berupa bangunan pasar modern dan permukiman modern, pemerintah selalu dihadapkan pada permasalahan keterbatasan luas tanah yang tersedia untuk pembangunan terutama di daerah perkotaan yang berpenduduk padat. Pembangunan Rumah Susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan permukiman terutama di daerah perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningkat, karena pembangunan Rumah Susun dapat mengurangi penggunaan tanah, membuat ruang-ruang terbuka kota yang lebih lega.

Menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang dimaksud dengan Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.



Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, penyelenggaraan rumah susun adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, penguasaan dan pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan, pengendalian, kelembagaan, pendanaan dan pembiayaan, serta peran masyarakat yang diselenggarakan secara sistematis, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Berdasarkan jenisnya rumah susun terbagi menjadi rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara dan rumah susun komersial. Pembinaan penyelenggaraan rumah susun menjadi tanggung jawab pemerintah.

Tabel 6.1 menunjukkan jumlah rumah susun sejak tahun 2016-2018 yang dijabarkan menurut provinsi.

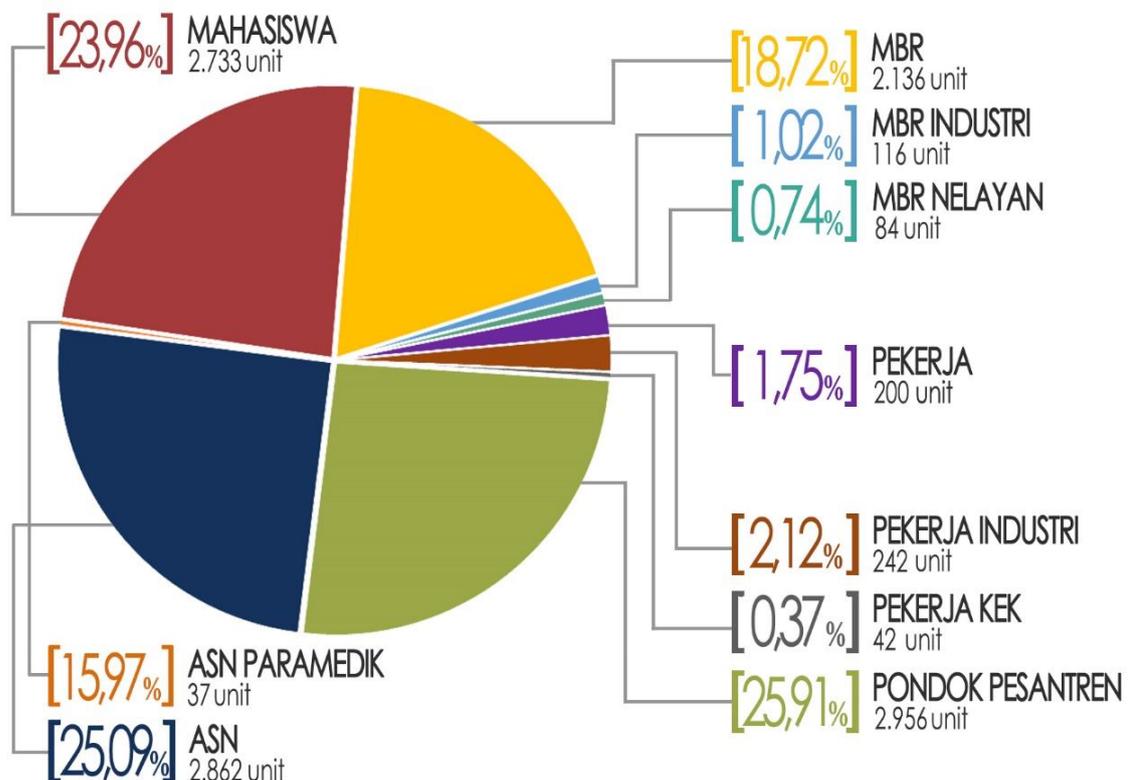
Tabel 6.1 Jumlah Rumah Susun Menurut Provinsi Tahun 2016-2018

Provinsi	Tahun (unit)			Jumlah
	2016	2017	2018	
Aceh	151	100	380	631
Sumatera Utara	332	30	188	550
Sumatera Barat	297	367	448	1.112
Riau	103	256	145	504
Jambi	30	140	229	399
Sumatera Selatan	414	97	354	865
Bengkulu	90		108	198
Lampung	432	274	419	1.125
Kepulauan Bangka Belitung	-	-	126	126
Kepulauan Riau	0	264	219	483
DKI Jakarta	231	83	-	314
Jawa Barat	164	170	400	734
Jawa Tengah	774	570	917	2.261
DI Yogyakarta	1.252	341	1.480	3.073
Jawa Timur	250	280	417	947
Banten	796	717	1.396	2.909
Bali	125	47	42	214
Nusa Tenggara Barat	196	128	363	687
Nusa Tenggara Timur	47	104	309	460
Kalimantan Barat	117	387	184	688
Kalimantan Tengah	47	54	221	322
Kalimantan Selatan	77	100	318	495
Kalimantan Timur	0	230	169	399
Kalimantan Utara	70	-	77	147

Provinsi	Tahun (unit)			Jumlah
	2016	2017	2018	
Sulawesi Utara	82	90	313	485
Sulawesi Tengah	157	180	246	583
Sulawesi Selatan	579	241	579	1.399
Sulawesi Tenggara	161	114	279	554
Gorontalo	91	160	176	427
Sulawesi Barat	275	-	163	438
Maluku	91	0	256	347
Maluku Utara	227	227	168	622
Papua	-	-	198	198
Papua Barat	82	74	121	277
Indonesia	7.740	5.825	11.408	24.973

Sumber: Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

Gambar 6.1 menunjukkan persentase tiga terbesar pembangunan rumah susun berdasarkan kegiatan pada tahun 2018. Sebanyak 25,91% merupakan pembangunan rumah susun yang diperuntukkan bagi pondok pesantren, 25,09% diperuntukkan bagi ASN dan 23,96 % diperuntukkan bagi mahasiswa. Tabel 6.2 menyajikan jumlah rumah susun pada tahun 2018 berdasarkan kegiatan.



Gambar 6.1 Persentase Rumah Susun berdasarkan Kegiatan Tahun 2018

Tabel 6.2 Jumlah Rumah Susun berdasarkan Kegiatan Tahun 2018

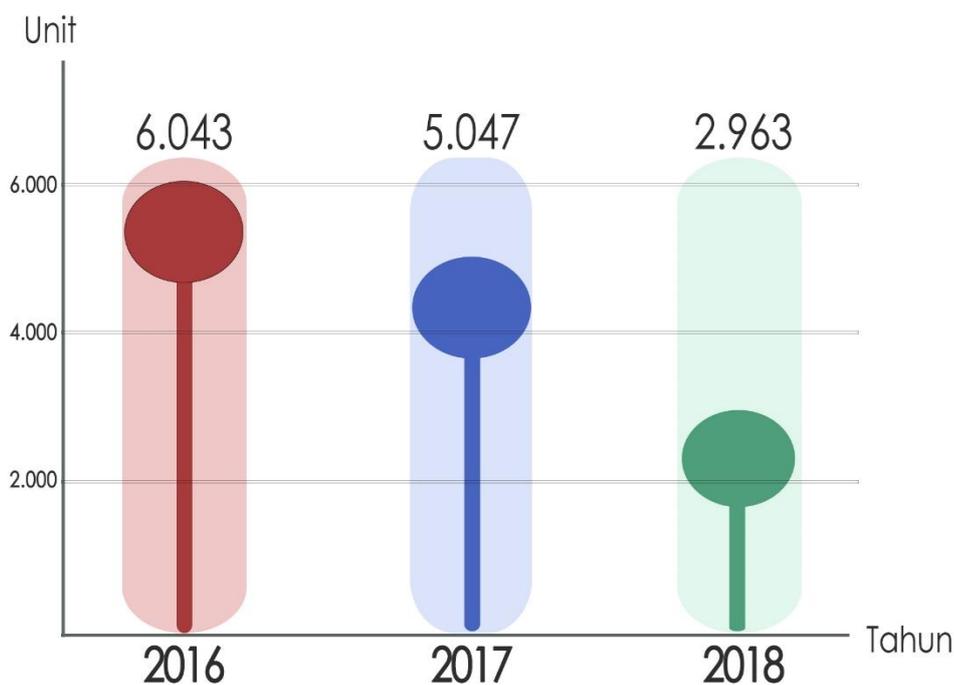
Kegiatan	Jumlah
ASN	2.862
ASN Paramedik	37
Mahasiswa	2.733
MBR	2.136
MBR Industri	116
MBR Nelayan	84
Pekerja	200
Pekerja Industri	242
Pekerja KEK	42
Pondok Pesantren	2.956
Jumlah	11.408

Sumber: Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

B. Rumah Khusus

Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa, rumah khusus merupakan rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus yang dimaksud adalah peruntukan pembangunan rumah tersebut, seperti rumah untuk korban bencana, masyarakat di daerah terpencil, masyarakat di daerah perbatasan, tokoh, Polri, TNI, dan lainnya.

Gambar 6.2 menyajikan data jumlah rumah khusus dari tahun 2016-2018. Jumlah pembangunan rumah khusus menurun setiap tahunnya, seiring terpenuhinya kebutuhan rumah masyarakat. Dalam 3 tahun terakhir rumah khusus yang telah terbangun sebanyak 14.053 unit. Jumlah rumah khusus menurut provinsi pada 3 tahun terakhir dapat dilihat Tabel 6.3.



Gambar 6.2 Jumlah Rumah Khusus Tahun 2016-2018

Tabel 6.3 Jumlah Rumah Khusus menurut Provinsi Tahun 2016-2018

Provinsi	Tahun (unit)			Jumlah
	2016	2017	2018	
Aceh	52	342	50	444
Sumatera Utara	35	178	50	263
Sumatera Barat	401	334	50	785
Riau	21	100	50	171
Jambi	13	150	130	293
Sumatera Selatan	29	100	-	129
Bengkulu	70	71	50	191
Lampung	137	100	100	337
Kepulauan Bangka Belitung	118	-	50	168
Kepulauan Riau	89	95	50	234
DKI Jakarta	16	-	-	16
Jawa Barat	61	-	-	61
Jawa Tengah	140	200	100	440
DI Yogyakarta	85	50	78	213
Jawa Timur	16	50	-	66
Banten	43	154	50	247
Bali	12	-	-	12
Nusa Tenggara Barat	208	205	230	643



Provinsi	Tahun (unit)			Jumlah
	2016	2017	2018	
Nusa Tenggara Timur	363	-	40	403
Kalimantan Barat	163	40	50	253
Kalimantan Tengah	13	-	50	63
Kalimantan Selatan	30	101	100	231
Kalimantan Timur	56	50	50	156
Kalimantan Utara	233	151	50	434
Sulawesi Utara	63	250	100	413
Sulawesi Tengah	119	209	110	438
Sulawesi Selatan	187	419	170	776
Sulawesi Tenggara	230	275	200	705
Gorontalo	281	130	100	511
Sulawesi Barat	215	100	150	465
Maluku	267	150	50	467
Maluku Utara	294	302	200	796
Papua	1.173	350	255	1.778
Papua Barat	810	391	250	1.451
Total	6.043	5.047	2.963	14.053

Sumber: Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

Tabel 6.4 Jumlah Rumah Khusus Menurut Kegiatan Tahun 2018

Kegiatan	Jumlah
Korban Bencana	90
Daerah tertinggal	1.105
Ex Transmigran	50
MBR	50
MBR Penanganan Khusus	50
MBR Penanganan Khusus 2	50
Nelayan	950
Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP)	120
Perbatasan	290
Petugas Negara Kawasan Perbatasan	28
Suku Anak Dalam	80
N/A	100
Jumlah	2.963

Sumber: Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

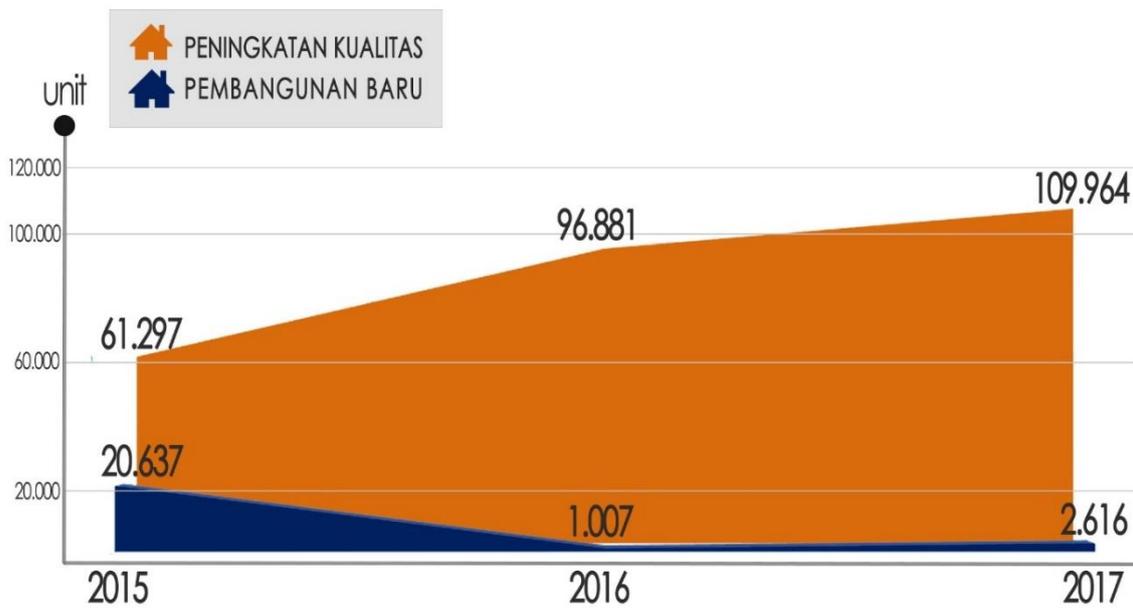
C. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Kegiatan pembangunan rumah secara swadaya seringkali belum memenuhi kualitas rumah layak huni seperti sarana, prasarana, dan utilitas yang memadai. BSPS diberikan pada masyarakat berpenghasilan rendah. Sasaran BSPS adalah rumah tidak layak huni yang merupakan tanah milik sendiri, bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh masyarakat atau terkena konsolidasi tanah, relokasi dalam rangka peningkatan perumahan dan permukiman kumuh, rumah yang terkena bencana, kerusakan sosial atau kebakaran. Kategori rumah tidak layak huni yang menjadi target kegiatan BSPS adalah sebagai berikut:

1. Bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV,
2. Bahan dinding berupa bambu/kayu/rotan atau kayu kelas IV,
3. Tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan,
4. Bahan atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh,
5. Rusak berat dan atau rusak sedang dan luas lantai bangunan tidak mencukupi.

Bentuk bantuan program BSPS dapat berupa uang atau barang. Uang yang didapat digunakan untuk membeli bahan bangunan. Namun apabila penerima bantuan tidak memiliki kemampuan (lanjut usia, dan penyandang disabilitas) bantuan uang tersebut dapat digunakan untuk upah kerja. Bantuan dalam bentuk barang berupa bahan bangunan untuk rumah, dan bahan bangunan untuk PSU.

Pada tahun 2017 jumlah rumah swadaya sebanyak 112.580 unit. Pada Tabel 6.5 memperlihatkan rincian jumlah BSPS menurut provinsi. Hingga tahun 2017 provinsi yang mendapat BSPS terbanyak adalah Provinsi Jawa Timur, yaitu sebanyak 8.226 unit.



Gambar 6.3 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2015-2017

Tabel 6.5 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya menurut Provinsi Tahun 2015-2017

Provinsi	2015		2016		2017		Jumlah
	PB	PK	PB	PK	PB	PK	
Aceh	-	1.605	-	1.946	57	2.663	6.271
Sumatera Utara	-	2.339	-	3.377	75	3.195	8.986
Sumatera Barat	2	4.154	59	2.558	60	4.044	10.877
Riau	-	410	-	1.959	-	2.484	4.853
Jambi	542	603	-	2.126	-	2.500	5.771
Sumatera Selatan	136	1.764	-	3.453	94	3.003	8.450
Bengkulu	377	1.042	-	2.201	-	2.204	5.824
Lampung	1.159	1.592	2	2.354	-	3.197	8.304
Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	1.183	-	1.988	3.171
Kepulauan Riau	-	239	-	1.735	-	1.479	3.453
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	3.116	5.548	198	8.632	376	7.634	25.504
Jawa Tengah	1.322	12.468	95	10.160	933	6.039	31.017
DI Yogyakarta	1.746	575	-	2.224	-	1.643	6.188
Jawa Timur	1.617	5.043	158	6.490	74	8.226	21.608
Banten	826	13	-	1.998	311	2.359	5.507
Bali	1.080	609	-	1.758	-	2.112	5.559



Provinsi	2015		2016		2017		Jumlah
	PB	PK	PB	PK	PB	PK	
Nusa Tenggara Barat	3.090	1.587	276	2.402	-	3.727	11.082
Nusa Tenggara Timur	-	-	-	2.457	96	4.707	7.260
Kalimantan Barat	9	3.164	-	2.396	78	4.268	9.915
Kalimantan Tengah	-	1.721	-	2.316	-	2.000	6.037
Kalimantan Selatan	3	1.742	-	2.215	-	2.859	6.819
Kalimantan Timur	-	488	-	2.208	-	2.627	5.323
Kalimantan Utara	1	110	-	2.510	-	1.574	4.195
Sulawesi Utara	-	693	1	2.434	-	3.613	6.741
Sulawesi Tengah	1.350	3.318	-	3.898	210	3.891	12.667
Sulawesi Selatan	-	2.173	23	4.040	81	5.381	11.698
Sulawesi Tenggara	218	2.974	4	3.332	72	3.340	9.940
Gorontalo	1.616	1.437	72	2.220	-	1.621	6.966
Sulawesi Barat	167	1.353	-	2.137	-	2.200	5.857
Maluku	-	1.398	-	2.389	99	3.340	7.226
Maluku Utara	583	927	119	2.242	-	3.169	7.040
Papua	818	208	-	1.534	-	3.377	5.937
Papua Barat	859	-	-	1.997	-	3.500	6.356
Total	20.637	61.297	1.007	96.881	2.616	109.964	292.402

Sumber: Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

D. Fasilitas Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Rumah Umum

Pengertian rumah Umum sesuai dengan UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pembangunan rumah umum untuk MBR mengalami kendala pada aksesibilitas, dan harga rumah yang tidak sebanding dengan pendapatan/penghasilan masyarakat. Kendala tersebut di atas juga ditambah dengan masih buruknya pelayanan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

Rumah yang layak huni tak hanya berkaitan dengan kondisi bangunan yang sesuai standar namun aksesibilitas terhadap Prasarana, Sarana, serta Utilitas (PSU) di perumahan dan



kawasan permukiman tersebut pun harus terpenuhi sehingga kawasan permukiman tersebut dapat dikatakan layak huni. Oleh karena itu Kementerian PUPR memberi bantuan pembangunan PSU. Pemberian bantuan fasilitas pembangunan PSU perumahan diperuntukkan bagi rumah umum berupa rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun. Pemberian bantuan tersebut bersifat stimulan. Berdasarkan Keputusan Menteri No. 896/KPTS/M/2016 bantuan PSU antara lain berupa bantuan pembangunan jalan, ruang terbuka non hijau, sanitasi, air minum, rumah ibadah, jaringan listrik, dan penerangan jalan umum. Pada Tabel 6.6 disajikan data bantuan pembangunan PSU menurut provinsi pada tahun 2015 sampai tahun 2017.

Tabel 6.6 Jumlah Pembangunan PSU Rumah Umum Tahun 2015-2017

Provinsi	Tahun		
	2015	2016	2017
Aceh	431	-	354
Sumatera Utara	522	1.162	360
Sumatera Barat	76	462	-
Riau	2.341	2.162	1.198
Jambi	-	559	519
Sumatera Selatan	1.408	1.883	296
Bengkulu	-	521	260
Lampung	674	560	360
Kep. Bangka Belitung	-	364	-
Kepulauan Riau	1.525	570	834
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	5.712	2.656	1.052
Jawa Tengah	-	677	293
DI Yogyakarta	-	-	305
Jawa Timur	1.144	661	497
Banten	2.381	3.443	374
Bali	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	-	710	425
Nusa Tenggara Timur	-	330	-
Kalimantan Barat	1.728	616	1.649
Kalimantan Tengah	600	907	886
Kalimantan Selatan	6.273	2.571	2.508
Kalimantan Timur	674	789	188
Kalimantan Utara	-	-	-

Provinsi	Tahun		
	2015	2016	2017
Sulawesi Utara	770	802	644
Sulawesi Tengah	200	375	207
Sulawesi Selatan	1.358	2.568	2.636
Sulawesi Tenggara	483	375	-
Gorontalo	136	165	-
Sulawesi Barat	-	576	245
Maluku	-	-	-
Maluku Utara	-	-	-
Papua	342	225	783
Papua Barat	-	195	393
Indonesia	28.778	26.884	17.266

Sumber : Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

E. Fasilitas Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP)

Dalam upaya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, pemerintah tak hanya mengeluarkan program pembangunan secara fisik, ada pula program bantuan pembiayaan pembelian rumah melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah. Program tersebut adalah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. FLPP menyediakan dana berupa Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSh) yang terdiri dari rumah sejahtera tapak dan satuan rumah sejahtera susun. Tabel 6.7 menyajikan data jumlah penyaluran KPR-FLPP tahun 2010-2017.

Tabel 6.7 Data Penyaluran KPR Sejahtera FLPP Rumah Tapak dan Rumah Susun Menurut Provinsi Tahun 2010-2017

Provinsi	Rumah Tapak	Rumah Susun	Total
Aceh	1.097	-	1.097
Sumatera Utara	22.735	3	22.738



Provinsi	Rumah Tapak	Rumah Susun	Total
Sumatera Barat	5.014	-	5.014
Riau	23.173	-	23.173
Jambi	10.481	-	10.481
Sumatera Selatan	22.223	-	22.223
Bengkulu	4.798	-	4.798
Lampung	4.737	-	4.737
Kepulauan Bangka Belitung	2.876	-	2.876
Kepulauan Riau	11.904	8	11.912
DKI Jakarta	8	300	308
Jawa Barat	190.648	30	190.678
Jawa Tengah	27.379	-	27.379
DI Yogyakarta	1.295	-	1.295
Jawa Timur	33.376	-	33.376
Banten	53.480	-	53.480
Bali	1.107	-	1.107
Nusa Tenggara Barat	1.431	-	1.431
Nusa Tenggara Timur	1.906	-	1.906
Kalimantan Barat	16.960	-	16.960
Kalimantan Tengah	8.415	-	8.415
Kalimantan Selatan	31.467	-	31.467
Kalimantan Timur	2.096	8	2.104
Kalimantan Utara	61	-	61
Sulawesi Utara	7.534	-	7.534
Sulawesi Tengah	3.665	-	3.665
Sulawesi Selatan	12.787	-	12.787
Sulawesi Tenggara	4.159	-	4.159
Gorontalo	2.133	-	2.133
Sulawesi Barat	1.591	-	1.591
Maluku	55	-	55
Maluku Utara	266	-	266
Papua Barat	4.508	-	4.508
Papua	4.120	-	4.120
Indonesia	519.485	349	519.834

Sumber : Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, Status Desember 2017

BAB
7

STATISTIK BINA KONSTRUKSI



234.842 Jiwa
Tenaga Ahli Konstruksi



511.340 Jiwa
Tenaga Terampil Konstruksi



Badan Usaha Jasa Konstruksi

651.877 (Tahun 2018)





Pembangunan infrastruktur tidak lepas dari kegiatan konstruksi. Konstruksi merupakan kegiatan yang menghasilkan bangunan yang menyatu dengan lahan kedudukannya. Hasil kegiatan konstruksi antara lain, gedung, jalan, jembatan, bangunan air dan drainase, sanitasi, dan lainnya. Berdasarkan data PDB tahun 2017, kontribusi sektor konstruksi pada perekonomian Indonesia relatif besar yaitu sebesar 10,37%. Sedangkan laju pertumbuhan PDB tahun 2017 sektor konstruksi mencapai 6,79%. Hal ini menandakan bahwa sektor konstruksi merupakan salah satu sektor yang penting bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang diterbitkan oleh BPS tahun 2015, kegiatan konstruksi terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Konstruksi Gedung meliputi semua jenis gedung/bangunan, baik pembangunan gedung baru, perbaikan, penambahan dan renovasi bangunan, pendirian bangunan atau struktur prafabrikasi pada lokasi dan konstruksi yang bersifat sementara.
2. Konstruksi Bangunan Sipil mencakup kegiatan konstruksi berat seperti fasilitas industri, proyek infrastruktur dan sarana umum, sistem pembuangan dan irigasi, saluran pipa dan jaringan listrik, fasilitas olahraga umum dan lain-lain.
3. Konstruksi Khusus merupakan kegiatan konstruksi yang dilakukan dengan keahlian khusus. Kegiatan konstruksi khusus mencakup penyelesaian gedung, instalasi seperti pipa-pipa ledeng, pemanas, pendingin ruangan, sistem alarm dan pekerjaan listrik lain, sistem penyiraman, lift dan tangga berjalan, dan lainnya.

A. Badan Usaha Jasa Konstruksi

Seiring dengan pembangunan infrastruktur nasional yang semakin pesat, banyak perusahaan penyedia jasa konstruksi bermunculan, baik perseorangan atau badan usaha. Jasa konstruksi merupakan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, jenis usaha jasa konstruksi meliputi usaha jasa konsultasi konstruksi, usaha pekerjaan konstruksi, dan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi.

Badan usaha jasa konstruksi harus memiliki sertifikasi untuk dapat mengikuti tender pengadaan jasa konstruksi. Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) adalah bukti pengakuan formal tingkat kompetensi usaha jasa pelaksana konstruksi (kontraktor) dan usaha jasa perencana konstruksi atau jasa pengawas konstruksi (konsultan) sebagai

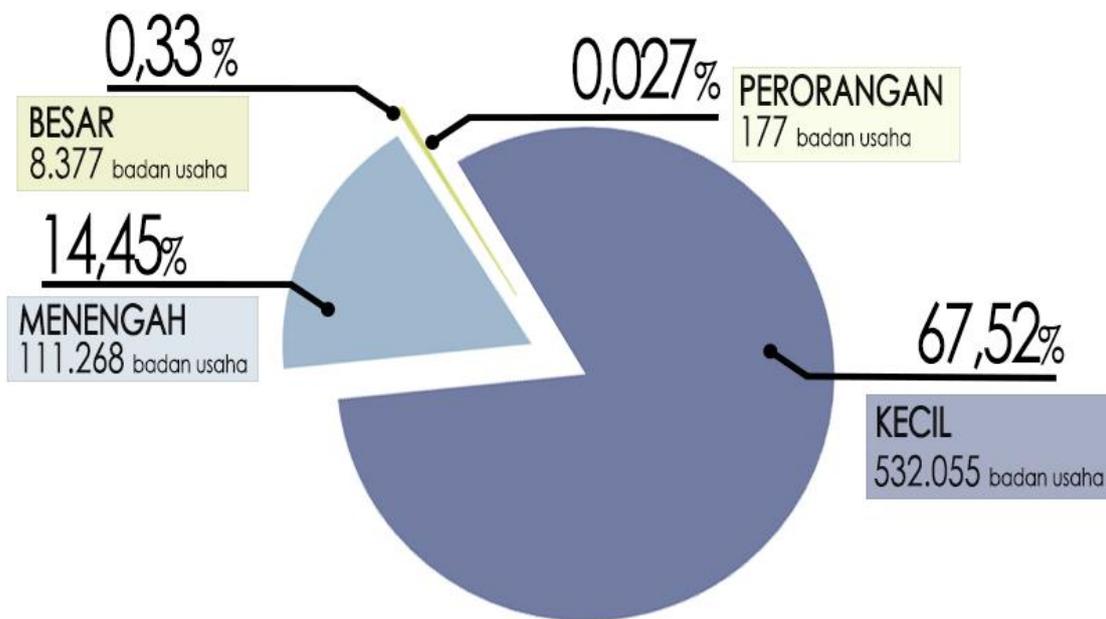


perwujudan hasil sertifikasi dan registrasi badan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Usaha jasa konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi bersifat umum dan spesialis. Usaha jasa konsultasi konstruksi umum diklasifikasi menjadi arsitektur, rekyasa, rekayasa terpadu, dan arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah. Sedangkan klasifikasi usaha jasa konsultasi konstruksi antara lain konsultasi ilmiah dan teknis, serta pengujian dan analisis teknis.

Penetapan kualifikasi usaha dilaksanakan melalui penilaian terhadap penjualan tahunan, kemampuan keuangan, ketersediaan tenaga kerja konstruksi, dan kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. Kualifikasi tersebut dibagi menjadi 4 yaitu, perorangan, kecil, menengah, dan besar.

Sebagian besar badan usaha jasa konstruksi terqualifikasi sebagai badan usaha kecil terdapat sebesar 67,52%. Kualifikasi menengah terdapat sebesar 14,45%. Kualifikasi lainnya yaitu besar dan perorangan masing-masing sebesar 0,33% dan 0,027%. Tabel 7.1



Gambar 7.1 Persentase Kualifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi



Tabel 7.1 Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi

Provinsi	Perorangan	Kecil			Menengah	
		K1	K2	K3	M1	M2
Aceh	11	24.675	3.223	1.142	4.417	470
Sumatera Utara	12	22.964	3.263	2.833	4.130	782
Sumatera Barat	14	17.788	1.614	852	1.547	212
Riau	-	15.022	2.661	3.324	3.514	440
Jambi	4	7.161	979	544	1.262	264
Sumatera Selatan	17	10.328	1.156	1.078	2.418	461
Bengkulu	-	4.232	471	292	534	70
Lampung	-	10.447	1.142	546	1.735	177
Kepulauan Bangka Belitung	2	3.379	304	232	349	45
Kepulauan Riau	15	6.264	1.132	2.261	1.581	375
DKI Jakarta	62	9.606	1.298	1.624	15.708	3.737
Jawa Barat	-	43.796	2.336	1.350	9.410	880
Jawa Tengah	1	38.977	2.479	1.911	5.514	537
DI Yogyakarta	-	3.844	516	348	612	92
Jawa Timur	-	46.768	4.673	2.677	6.538	1.151
Banten	16	15.551	1.102	748	2.455	383
Bali	-	5.172	543	388	791	139
Nusa Tenggara Barat	-	10.687	373	175	781	85
Nusa Tenggara Timur	1	10.839	1.051	726	1.229	237
Kalimantan Barat		17.099	1.127	517	2.509	316
Kalimantan Tengah	2	7.144	1.350	1.513	1.510	263
Kalimantan Selatan	1	10.500	874	489	1.514	131
Kalimantan Timur	9	13.502	1.462	1.140	4.183	669
Kalimantan Utara	-	714	173	99	294	102
Sulawesi Utara	-	4.194	2.121	5.383	1.718	881
Sulawesi Tengah	2	9.512	1.060	452	1.243	149
Sulawesi Selatan	-	23.274	2.809	1.436	4.225	1.111
Sulawesi Tenggara	-	7.800	1.850	1.931	1.622	354
Gorontalo	2	2.804	996	1.087	790	126
Sulawesi Barat	4	4.227	596	451	543	58
Maluku	-	3.683	1.086	1.101	1.286	285
Maluku Utara	-	4.135	746	999	1.452	272
Papua Barat	-	11.361	535	962	2.585	543
Papua	2	12.668	957	3.269	4.165	1.307
Indonesia	177	440.117	48.058	43.880	94.164	17.104

Sumber: Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Status Mei 2018

Tabel 7.2 Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi (lanjutan)

Provinsi	Perorangan	Besar			Total
		B	B1	B2	
Aceh	11	2	70	4	34.014
Sumatera Utara	12	18	70	12	34.084
Sumatera Barat	14	-	30	-	22.057
Riau	-	4	77	13	25.055
Jambi	4	4	10	-	10.228
Sumatera Selatan	17	-	59	2	15.519
Bengkulu	-	-	2		5.601
Lampung	-	18	34	5	14.104
Kep. Bangka Belitung	2	-	5		4.316
Kepulauan Riau	15	-	27	12	11.667
DKI Jakarta	62	1.410	2.001	1.843	37.289
Jawa Barat	-	399	237	104	58.512
Jawa Tengah	1	70	98	5	49.592
DI Yogyakarta	-	13	12		5.437
Jawa Timur	-	86	316	62	62.271
Banten	16	33	113	70	20.471
Bali	-	2	13	1	7.049
Nusa Tenggara Barat	-	-	23	3	12.127
Nusa Tenggara Timur	1	2	7	-	14.092
Kalimantan Barat		8	12	4	21.592
Kalimantan Tengah	2	7	21	-	11.810
Kalimantan Selatan	1	20	22	1	13.552
Kalimantan Timur	9	2	198	34	21.199
Kalimantan Utara	-	-	31	3	1.416
Sulawesi Utara	-	-	40	2	14.339
Sulawesi Tengah	2	-	7	-	12.425
Sulawesi Selatan	-	62	123	38	33.078
Sulawesi Tenggara	-	-	11	-	13.568
Gorontalo	2	-	12	-	5.817
Sulawesi Barat	4	-	3	-	5.882
Maluku	-	9	26	1	7.477
Maluku Utara	-	-	40	-	7.644
Papua Barat	-	-	41	-	16.027
Papua	2	4	184	10	22.566
Indonesia	177	2.173	3.975	2.229	651.877

Sumber: Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Status Mei 2018



B. Tenaga Kerja

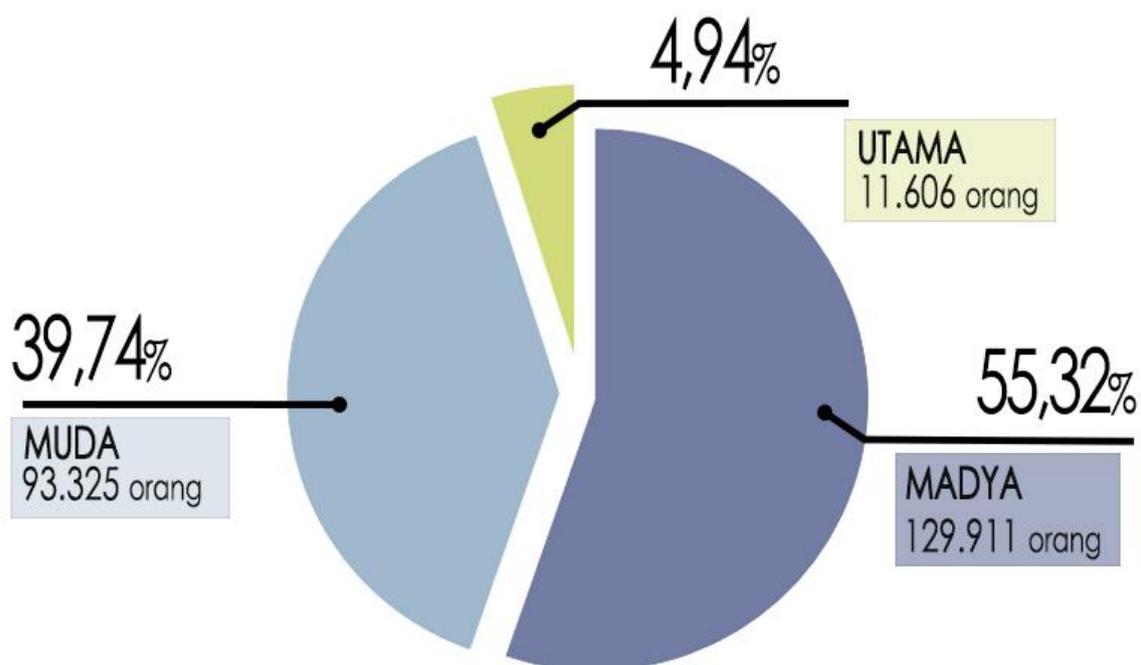
Setiap tenaga kerja konstruksi harus memiliki sertifikat kompetensi kerja. Sertifikat kompetensi kerja dibagi berdasarkan kualifikasi tenaga kerja. Kualifikasi tenaga kerja konstruksi merupakan penggolongan profesi dan keahlian atau keterampilan kerja orang perseorangan di bidang konstruksi menurut tingkat kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian. Kualifikasi tenaga kerja konstruksi terbagi menjadi 2 yaitu tenaga ahli dan tenaga terampil.

Kualifikasi tenaga ahli yaitu muda, madya, dan utama. Tenaga ahli yang sudah memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dengan kualifikasi muda dapat ditingkatkan menjadi ahli madya, dan tenaga ahli madya dapat ditingkatkan menjadi ahli utama. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 09/PRT/M/2013 persyaratan khusus kualifikasi tenaga ahli adalah sebagai berikut:

- a. Utama : minimal D4 dengan pengalaman minimal 6 tahun lulusan S1 dengan pengalaman minimal 5 tahun, atau S1 Terapan dengan pengalaman minimal 4 tahun.
- b. Madya : minimal lulusan D3 dengan pengalaman minimal 5 tahun. Lulusan D4 pengalaman minimal 3 tahun, dan S1 pengalaman minimal 1 tahun.
- c. Muda : minimal lulusan D3 dengan pengalaman minimal 3 tahun. Lulusan D4 pengalaman minimal 1 tahun, dan S1 pengalaman minimal 1 tahun.

Tenaga ahli bersertifikat keahlian merupakan salah satu persyaratan utama untuk mengajukan permohonan sertifikasi dan registrasi SBU bidang jasa konstruksi golongan kecil (K1, K2, dan K3), dan ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) atau Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK).

Pada tahun 2018 terdapat 234.842 orang tenaga ahli konstruksi yang tersertifikasi. Pada Gambar 7.1 dapat dilihat bahwa tenaga ahli madya merupakan yang terbanyak dari seluruh tenaga ahli bersertifikat di Indonesia dengan persentase sebesar 55,32%. Sedangkan tenaga ahli muda dan utama masing-masing memiliki persentase sebesar 39,74% dan 4,94%. Rincian data tenaga ahli konstruksi berdasarkan provinsi disajikan pada Tabel 7.2.



Gambar 7.2 Persentase Kualifikasi Tenaga Ahli Konstruksi

Tabel 7.3 Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi

Provinsi	Kualifikasi (orang)			Total
	Muda	Madya	Utama	
Aceh	4.706	5.937	-	10.643
Sumatera Utara	2.053	2.507	-	4.560
Sumatera Barat	5.632	7.175	-	12.807
Riau	16.856	24.785	-	41.641
Jambi	764	1.311	-	2.075
Sumatera Selatan	1.322	1.803	-	3.125
Bengkulu	289	343	-	632
Lampung	405	804	-	1.209
Kepulauan Bangka Belitung	217	200	-	417
Kepulauan Riau	17.530	26.287	1	43.818
DKI Jakarta	4.696	8.443	11.605	24.744
Jawa Barat	3.084	5.060	-	8.144
Jawa Tengah	3.308	2.969	-	6.277
DI Yogyakarta	1.426	1.173	-	2.599
Jawa Timur	3.415	3.183	-	6.598
Banten	2.429	2.604	-	5.033
Bali	1.127	1.140	-	2.267
Nusa Tenggara Barat	895	463	-	1.358



Provinsi	Kualifikasi (orang)			Total
	Muda	Madya	Utama	
Nusa Tenggara Timur	1.573	1.219	-	2.792
Kalimantan Barat	1.082	2.317	-	3.399
Kalimantan Tengah	1.023	1.082	-	2.105
Kalimantan Selatan	349	344	-	693
Kalimantan Timur	1.805	2.415	-	4.220
Kalimantan Utara	6	4	-	10
Sulawesi Utara	4.416	7.596	-	12.012
Sulawesi Tengah	1.066	1.156	-	2.222
Sulawesi Selatan	1.852	4.202	-	6.054
Sulawesi Tenggara	691	619	-	1.310
Gorontalo	6.894	9.564	-	16.458
Sulawesi Barat	580	724	-	1.304
Maluku	668	833	-	1.501
Maluku Utara	182	403	-	585
Papua Barat	588	569	-	1.157
Papua	396	677	-	1.073
Indonesia	93.325	129.911	11.606	234.842

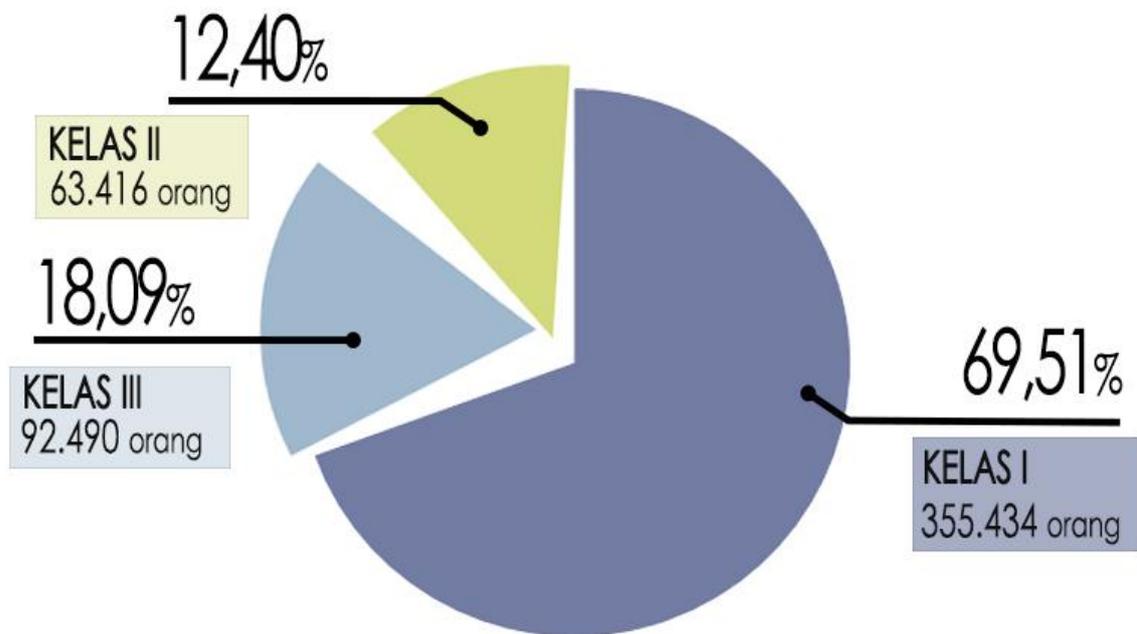
Sumber: Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Status Mei 2018

Kualifikasi tenaga terampil yaitu kelas III, kelas II, dan kelas I. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 09/PRT/M/2013 persyaratan khusus kualifikasi tenaga terampil adalah sebagai berikut:

- a. Kelas I : minimal lulusan D1 dengan pengalaman minimal 3 tahun.
- b. Kelas II : minimal lulusan SMK dengan pengalaman minimal 2 tahun atau SLTA dengan pengalaman minimal 3 tahun.
- c. Kelas III : minimal lulusan SD dengan pengalaman minimal 3 tahun atau SLTP dengan pengalaman minimal 2 tahun.

Sertifikat Keterampilan (SKT) adalah sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga terampil konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsiian dan/atau keterampilan tertentu. Setiap badan usaha jasa konstruksi golongan kecil (K1, K2, dan K3) yang akan mengajukan permohonan sertifikast dan registrasi badan usaha harus memiliki tenaga kerja terampil bersertifikat, sebagai persyaratan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT).

Indonesia memiliki 511.340 tenaga kerja bersertifikat keterampilan. Sebanyak 69,51% dari seluruh tenaga ber-SKT adalah kelas I. Sedangkan persentase kelas II dan kelas III sebesar 12,40% dan 18,09%. Pada Tabel 7.3 tersaji rincian jumlah tenaga terampil bersertifikat keterampilan berdasarkan provinsi.



Gambar 7.3 Persentase Tenaga Terampil Konstruksi

Tabel 7.4 Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi

Provinsi	Kualifikasi (orang)			Total
	Kelas III	Kelas II	Kelas I	
Aceh	1.918	903	14.107	16.928
Sumatera Utara	3.627	4.128	4.570	12.325
Sumatera Barat	1.687	2.828	21.615	26.130
Riau	8.444	7.159	87.610	103.213
Jambi	2.432	412	2.991	5.835
Sumatera Selatan	2.556	525	5.950	9.031
Bengkulu	636	247	1.129	2.012
Lampung	1.455	1.250	289	2.994
Kepulauan Bangka Belitung	482	376	1.306	2.164
Kepulauan Riau	10.558	11.553	72.751	94.862
DKI Jakarta	9.964	461	4.519	14.944
Jawa Barat	7.596	6.718	8.327	22.641



Provinsi	Kualifikasi (orang)			Total
	Kelas III	Kelas II	Kelas I	
Jawa Tengah	9.363	2.765	6.851	18.979
DI Yogyakarta	2.430	1.253	2.320	6.003
Jawa Timur	6.941	1.933	12.167	21.041
Banten	2.450	3.546	6.177	12.173
Bali	952	260	3.749	4.961
Nusa Tenggara Barat	1.208	1.970	3.298	6.476
Nusa Tenggara Timur	620	167	5.426	6.213
Kalimantan Barat	320	867	11.449	12.636
Kalimantan Tengah	21	184	4.771	4.976
Kalimantan Selatan	1.037	808	2.668	4.513
Kalimantan Timur	879	1.114	5.212	7.205
Kalimantan Utara	10	1	13	24
Sulawesi Utara	1.197	853	20.764	22.814
Sulawesi Tengah	2.971	1.859	1.763	6.593
Sulawesi Selatan	3.729	1.181	4.231	9.141
Sulawesi Tenggara	1.160	498	859	2.517
Gorontalo	3.913	5.021	29.525	38.459
Sulawesi Barat	557	785	1.071	2.413
Maluku	1	17	2.644	2.662
Maluku Utara	519	492	1.415	2.426
Papua Barat	313	688	2.350	3.351
Papua	544	594	1.547	2.685
Total	92.490	63.416	355.434	511.340

Sumber: Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Status Mei 2018

APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT



Unit Organisasi

Laki-Laki
16.269 Jiwa

Perempuan
6.321 Jiwa

11

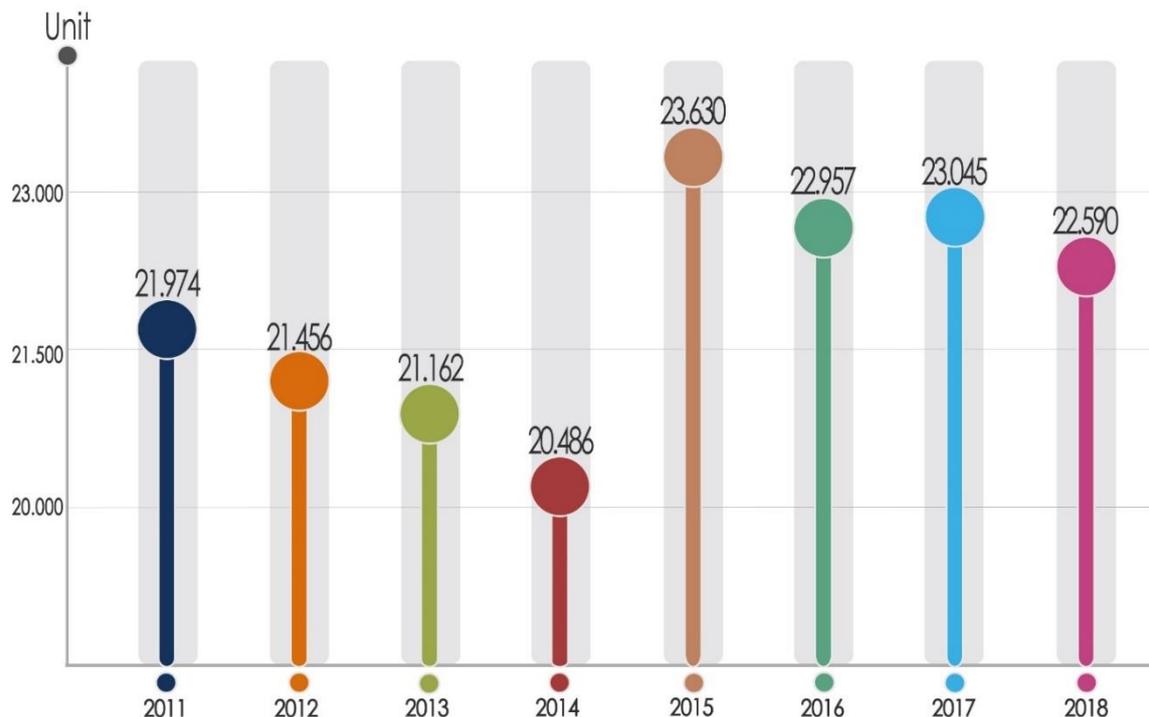
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Direktorat Jenderal Bina Marga
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Badan Penelitian dan Pengembangan
Badan Pengembangan SDM



A. Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian PUPR

Sumber daya manusia merupakan salah satu hal penting dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur. Peran penting SDM dalam pembangunan infrastruktur adalah sebagai perancang, penyusun, pelaksana, serta pengawas. Oleh karena itu peningkatan kualitas SDM Kementerian PUPR dirasa perlu dilakukan guna menunjang pembangunan infrastruktur.

Jumlah pegawai Kementerian PUPR mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Pada tahun 2010 ke 2011 terjadi peningkatan lebih dari 1.000 pegawai. Hal ini terjadi karena adanya penerimaan pegawai secara *online*, yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai. Peningkatan yang tertinggi terdapat pada tahun 2015. Hal tersebut dikarenakan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, dalam Perpres tersebut ditetapkan penggabungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Pada Gambar 7.1 dapat dilihat perbedaan jumlah pegawai laki-laki dan perempuan. Jumlah pegawai laki-laki dari tahun ke tahun selalu lebih banyak dibandingkan pegawai wanita.



Gambar 8.1 Perkembangan Jumlah SDM Kementerian PUPR Tahun 2011-2018



Tabel 8.1 Jumlah SDM Kementerian PUPR tahun 2011-2018

Tahun	Jumlah Pegawai			Persentase	
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan
2011	16.535	5.439	21.974	75,25	24,75
2012	15.966	5.490	21.456	74,41	25,59
2013	15.722	5.440	21.162	74,29	25,71
2014	15.059	5.427	20.486	73,51	26,49
2015	17.484	6.146	23.630	73,99	26,01
2016	16.971	5.986	22.957	73,93	26,07
2017	17.002	6.043	23.045	73,78	26,22
2018	16.269	6.321	22.590	72,02	27,98

Sumber: Biro Kepegawaian dan Ortala, Status Oktober 2018

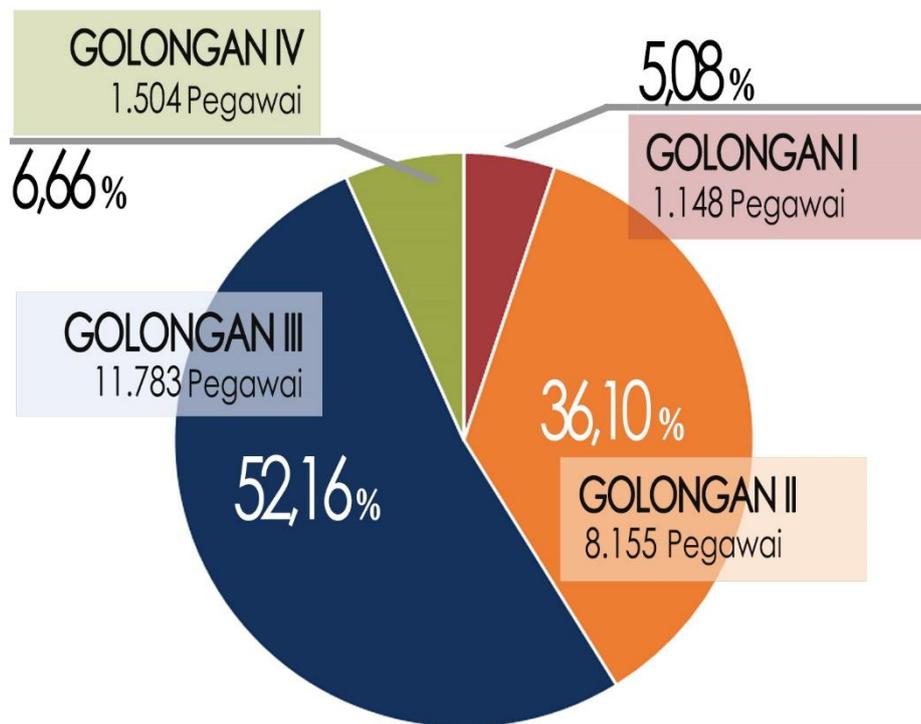
Total jumlah SDM pada tahun 2018 sebanyak 22.590 pegawai. Pada Tabel 7.2 dapat dilihat jumlah SDM Kementerian PUPR pada tahun 2018 berdasarkan unit organisasi. Kementerian PUPR memiliki 11 unit organisasi. Unit organisasi yang memiliki jumlah pegawai terbanyak adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) sebanyak 37,39% dari keseluruhan jumlah pegawai Kementerian PUPR. Direktorat Jenderal Bina Marga menempati posisi kedua dengan persentase jumlah pegawai mencapai 35,61%. Tabel 7.2 menyajikan data jumlah pegawai menurut unit organisasi yang jabarkan berdasarkan gender.

Tabel 8.2 Jumlah SDM Kementerian PUPR berdasarkan Unit Organisasi Tahun 2018

Unit Organisasi	Jumlah Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Total
Sekretariat Jenderal	460	239	699
Inspektorat Jenderal	118	104	222
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	6.472	1.975	8.447
Direktorat Jenderal Bina Marga	5.955	2.090	8.045
Direktorat Jenderal Cipta Karya	1.633	971	2.604
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan	284	150	434
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	260	171	431
Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan	84	55	139
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	88	76	164
Badan Penelitian dan Pengembangan	632	321	953
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	283	169	452
Jumlah	16.269	6.321	22.590

Sumber: Biro Kepegawaian dan Ortala, Status Oktober 2018

Dilihat dari golongan kepangkatan, jumlah pegawai Kementerian PUPR tahun 2018 yang telah menjadi golongan IV sebesar 6,7% atau sekitar 1.504 pegawai. Pegawai yang termasuk golongan III terdapat sebanyak 11.783 pegawai atau sekitar 52,2% dari seluruh pegawai Kementerian PUPR. Pada golongan II dan kurang terdapat sebanyak 9.303 pegawai atau sekitar 41,2%. Pada Tabel 7.3 disajikan data pegawai berdasarkan golongan untuk setiap unit organisasi yang ada di Kementerian PUPR.



Gambar 8.2 Persentase Jumlah SDM Kementerian PUPR Berdasarkan Golongan Tahun 2018

Tabel 8.3 Jumlah SDM menurut Golongan Tahun 2018

Golongan	Jumlah Pegawai		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
I/a	383	12	395
I/b	13	0	13
I/c	461	15	476
I/d	257	7	264
II/a	1.687	365	2.052
II/b	752	44	796
II/c	3.192	933	4.125
II/d	902	280	1.182

Golongan	Jumlah Pegawai		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
III/a	1.262	836	2.098
III/b	3.031	1.764	4.795
III/c	1.975	1.106	3.081
III/d	1.193	616	1.809
IV/a	713	241	954
IV/b	289	76	365
IV/c	82	10	92
IV/d	53	10	63
IV/e	24	6	30
Total	16.269	6.321	22.590

Sumber: Biro Kepegawaian dan Ortala, Status Oktober 2018

Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai Kementerian PUPR sebagian besar adalah lulusan SMA ke bawah sekitar 40,92% dari keseluruhan pegawai atau sekitar 9.244 pegawai. Pegawai yang lulus dengan jenjang pendidikan S1 sebanyak 37,68% atau sekitar 8.513 pegawai. Sebanyak 17,05% pegawai Kementerian PUPR merupakan lulusan S2 dan S3 atau sekitar 3.851 pegawai. Kemudian 4,35% pegawai lainnya merupakan lulusan diploma. Pada Tabel 8.5 menyajikan data pegawai Kementerian PUPR menurut jenjang pendidikan.

Tabel 8.4 Jumlah SDM menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2018

Pendidikan yang disematkan	Jumlah Pegawai		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
SLTA kebawah	7.671	1.573	9.244
D1-D3	628	354	982
D4/S1	5.300	3.213	8.513
S2	2.597	1.171	3.768
S3	73	10	83
Total	16.269	6.321	22.590

Sumber: Biro Kepegawaian dan Ortala, Status Oktober 2018



B. Pengarusutamaan Gender

Tujuan utama pembangunan nasional adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, lanjut usia, maupun masyarakat dengan kebutuhan khusus. Bila hasil pembangunan belum dirasakan manfaatnya oleh setiap lapisan masyarakat, hal tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan dalam pemerataan pembangunan.

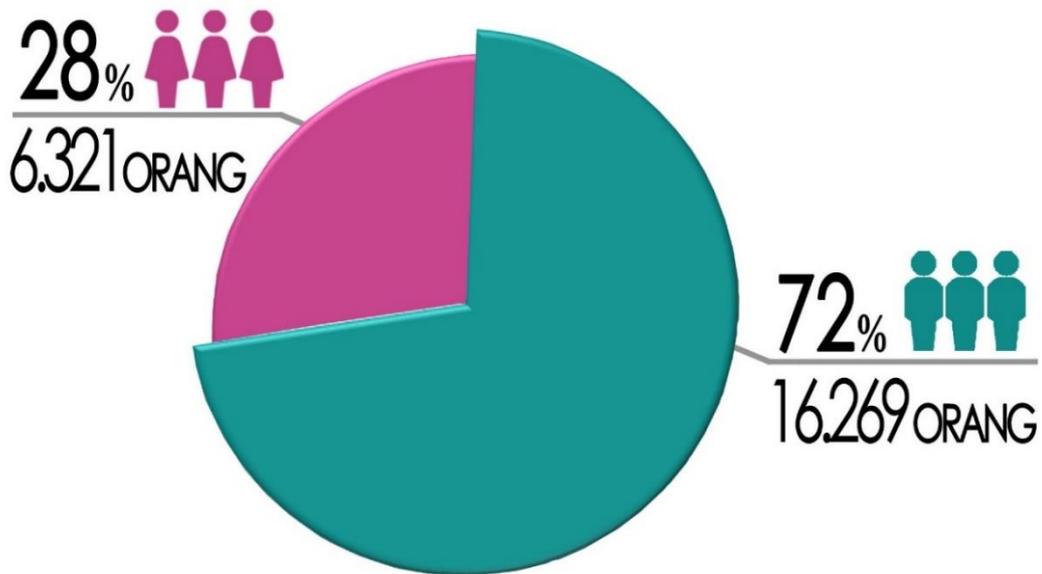
Gender merupakan perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status antara laki-laki dan perempuan yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang luas dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Sementara Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dilakukan untuk mengurangi kesenjangan serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam pemerataan pembangunan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang PUG Dalam Pembangunan Nasional. Pemerataan pembangunan tersebut tercipta apabila masyarakat memperoleh akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat yang sama. Secara umum PUG bukan merupakan konsep untuk memprioritaskan pemberdayaan perempuan saja, namun mengakomodasi seluruh kebutuhan semua gender, baik laki-laki, perempuan, maupun masyarakat dengan kebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak-anak dan *diffabel*. Formulasi mekanisme kebijakan yang tepat perlu dirancang, agar dapat mengakomodir kebutuhan seluruh masyarakat.

Sesuai dengan salah satu strategi dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR, pengarusutamaan gender telah menjadi komitmen Kementerian PUPR yang akan diterapkan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, serta implementasinya melalui program dan kegiatan.

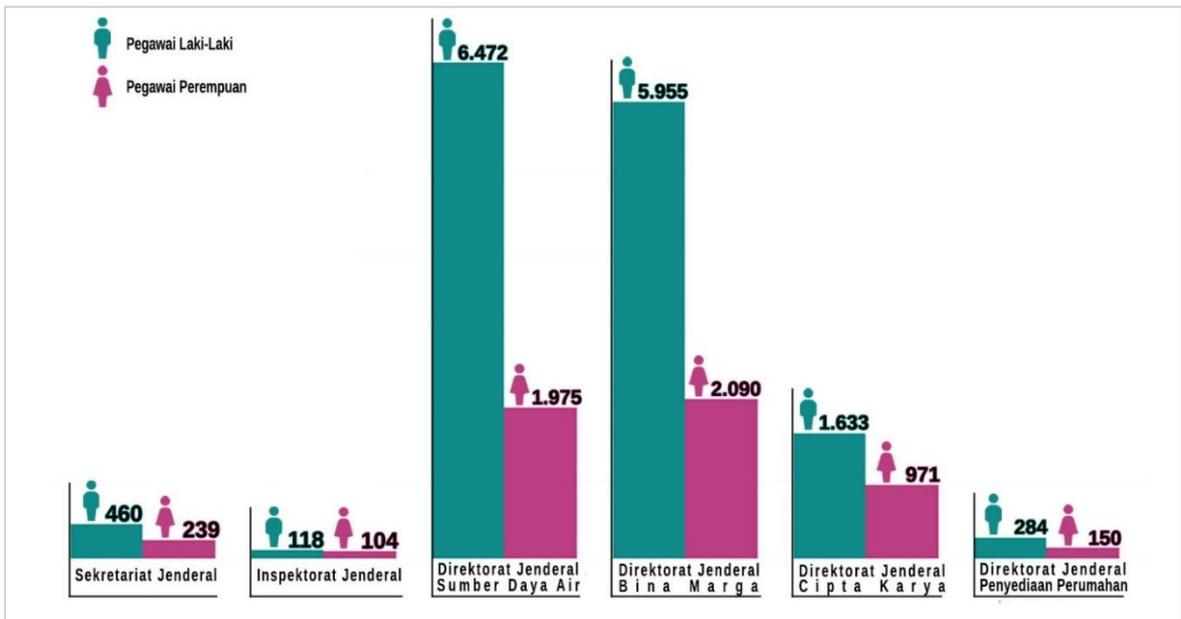
Keterlibatan perempuan dalam kegiatan pembangunan khususnya dalam bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dapat dilihat dari jumlah pegawai perempuan di Kementerian PUPR. Secara umum pegawai Kementerian PUPR didominasi pegawai laki-laki, yaitu sebesar 72%. Sedangkan pegawai perempuan sebesar 28% dari keseluruhan pegawai. Meskipun secara persentase jumlah pegawai perempuan lebih sedikit dibandingkan

dengan pegawai laki-laki, namun hal tersebut tidak menutup kesempatan yang sama untuk dapat berkiperah dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

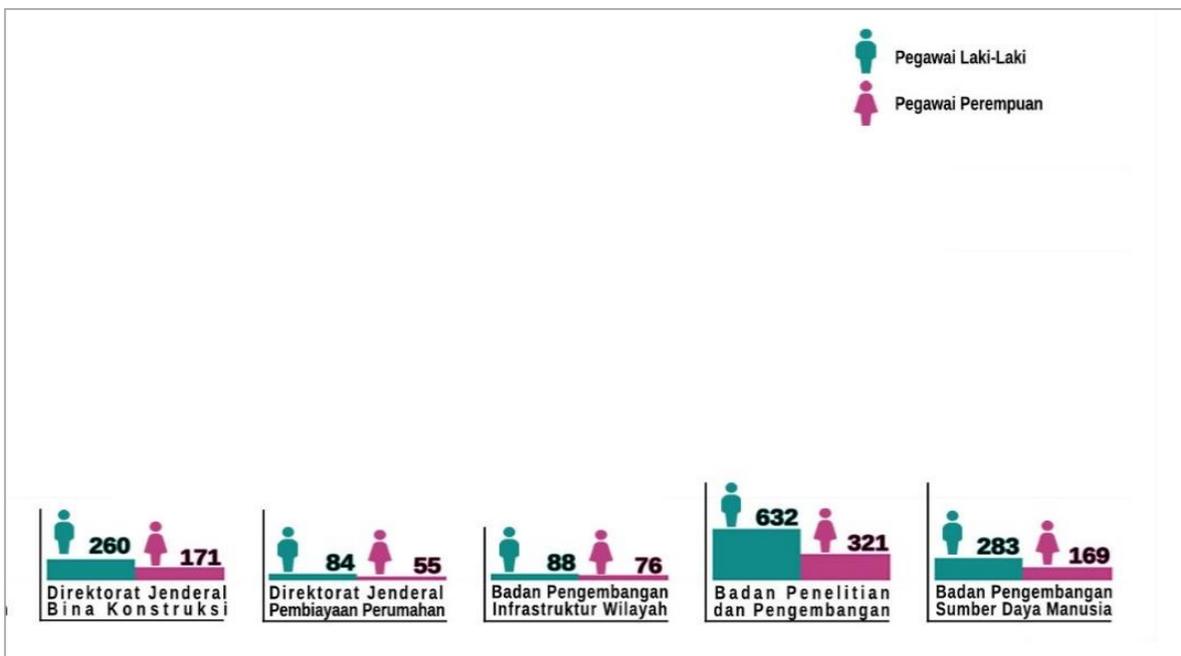


Gambar 8.3 Persentase pegawai Kementerian PUPR menurut Jenis Kelamin Tahun 2018

Dari total keseluruhan jumlah pegawai, jumlah pegawai perempuan terbanyak terdapat di Direktorat Jenderal Bina Marga yaitu sebesar 9,25% atau sekitar 2.090 pegawai, kemudian Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 8,74% atau 1.975 pegawai, dan Direktorat Jenderal Cipta Karya 4,29% atau sebanyak 971 pegawai. Sedangkan untuk jumlah pegawai laki-laki terbanyak berada di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terdapat sebanyak 6.472 pegawai atau sekitar 39,78%, Direktorat Jenderal Bina Marga dengan 5.955 pegawai atau 36,60%, Direktorat Jenderal Cipta Karya 1.633 pegawai atau 10,03%.



Gambar 8.4 Jumlah Pegawai Kementerian PUPR menurut Jenis kelamin dan Unit Organisasi Tahun 2018



Gambar 8.5 Jumlah Pegawai Kementerian PUPR menurut Jenis kelamin dan Unit Organisasi Tahun 2018 (lanjutan)

Rintisan Nama Buku Informasi Statistik



- 2003** Buku Penyediaan Informasi Statistik Prasarana Kimpraswil
- 2006** Buku Induk Kestatistikan
- 2007** Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum
- 2012** Buku Informasi Pekerjaan Umum (BIS-PU) yang dibuat dengan format yang berbeda dalam hal penekanan pada informasi mengenai objek hasil pembangunan infrastruktur ke-PU-an beserta beberapa dokumentasinya.
- 2013 & 2014** Buku Informasi Pekerjaan Umum (BIS-PU) dibuat dengan format data agregat menurut provinsi
- 2015** Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BIS-PUPR) terjadi perubahan struktur organisasi pada Kementerian PU yang kemudian menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 2016** Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 2017** Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BIS-PUPR)



Dalam rangka menyebarluaskan data dan informasi pembangunan infrastruktur bidang PUPR, Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat digunakan sebagai data dan informasi pendukung dalam pengambilan keputusan bagi para pimpinan di lingkungan Kementerian PUPR untuk menyusun berbagai kebijakan program pembangunan. BI diharapkan dapat melengkapi dan memberikan data dan informasi bidang PUPR tingkat nasional dalam sajian yang lebih mudah.

Rintisan Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dimulai pada tahun 2003 dengan nama Buku Penyediaan Informasi Statistik Prasarana Kimpraswil. Pada tahun 2006 BIS-PU berubah nama menjadi Buku Induk Kestatistikan dan pada tahun 2007 menjadi Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum. Tahun 2012, terjadi perubahan nama kembali menjadi Buku Informasi Pekerjaan Umum (BIS-PU) yang dibuat dengan format yang berbeda dalam hal penekanan pada informasi mengenai objek hasil pembangunan infrastruktur ke-PU-an beserta beberapa dokumentasinya. Kemudian pada tahun 2013 dan 2014 BIS-PU dibuat dengan format data agregat menurut provinsi. Di tahun 2015 terjadi perubahan struktur organisasi pada Kementerian PU yang kemudian menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka BIS-PU pun berubah menjadi Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BIS-PUPR). Pada tahun 2016 kembali terjadi perubahan nama menjadi Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan kembali menjadi Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BIS-PUPR) pada tahun 2017. Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersedia dalam format buku dan buku digital (*e-book*) yang dapat dilihat melalui media *website* PU-net.

Pusdatin telah berupaya maksimal dalam menyediakan data dan informasi infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta pengembangan sistem informasi guna mendukung manajemen Kementerian PUPR untuk tingkat nasional secara lengkap. Namun demikian, upaya tersebut masih dirasakan belum optimal dalam memenuhi kebutuhan akan data dan informasi yang senantiasa dinamis keragaman jenisnya dan meningkat jumlah pengguna informasinya.

Dengan diterbitkannya Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diharapkan dapat memberi manfaat tak hanya bagi pimpinan di lingkungan PUPR namun juga untuk masyarakat luas pada umumnya. Selain itu peningkatan kerjasama antar unit organisasi dapat ditingkatkan, sehingga pertukaran data dan informasi berjalan secara mutual dan dapat saling melengkapi untuk dapat dilakukan



sebagai masukan kegiatan dan menghasilkan produk yang bermanfaat dalam mendukung pembangunan nasional.

